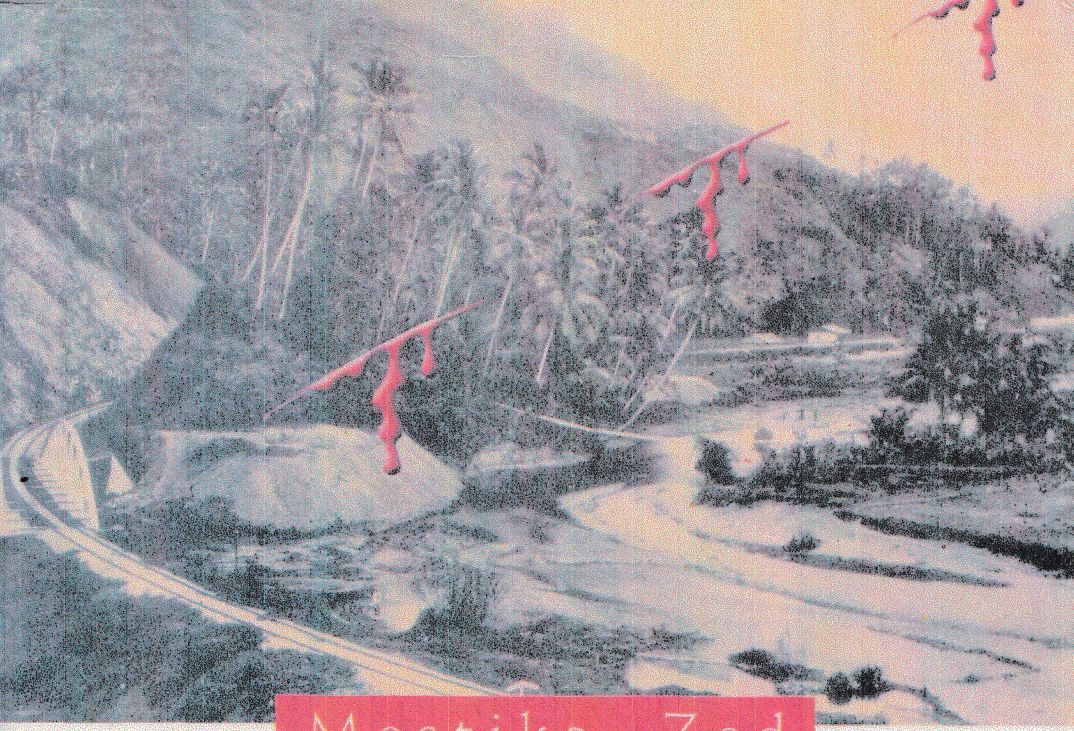

Mestika Zed

PEMBERONTAKAN KOMUNIS SILUNGKANG 1927

Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat

Syarikat INDONESIA

PEMBERONTAKAN KOMUNIS SILUNGKANG 1927

Mestika Zed

PEMBERONTAKAN KOMUNIS SILUNGKANG 1927

Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat

Syarikat INDONESIA

Zed, Mestika
Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 : studi gerakan sosial di Sumatera Barat --Mestika Zed ; penyunting, Saiful Huda S, Suhaelan Z. Wafa. –Cet. 1 – Yogyakarta : Syarikat, Indonesia, 2004.
viii, 210 hlm; 21 x 14,5 cm.

Bibliografi : hlm. 167-173
ISBN 979-96819-7-9

1. Pemberontakan Komunis – Sumatera Barat, 1927.
I. Judul. II. HudaS Saiful.
III. Wafa, Suhaelan Z..

959.813

PEMBERONTAKAN KOMUNIS SILUNGKANG 1927
Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat

Penulis
Mestika Zed

Penyunting
Saiful Huda Shodiq
Suhaelan Z. Wafa

Pra Cetak
Sania Zahra

Desain sampul
Haetami el-Jaed

Penerbit
SYARIKAT INDONESIA
Sidikan UH V/618A Jogjakarta, 55163
Telp/Fax 0274-382530
Email: syarikat@indosat.net.id
Website: http://www.syarikat.org

ISBN: 979-96819-7-9

Kata Pengantar

Jika tertekan terus-menerus dan krisis, sampai mereka sendiri tak mampu mengatasinya, melalui macam apa masyarakat menyatakan dirinya secara kolektif? Tentu mereka dapat bersikap diam atau menghindari (*avoidance*); bingung atau panik. Atau mereka memilih melawan atau memberontak, bersifat spontan dan lokal, atau memilih gerakan yang terorganisir yang melibatkan dan menghanyutkan masyarakat luas. Dan buku kecil ini berusaha mempelajari dan menelaah hal yang terakhir, yaitu peristiwa pemberontakan rakyat di sebuah nagari, Silungkang, Sumatera Barat pada tahun 1927.

Tujuan pokok tulisan ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kemunculan gerakan pemberontakan dengan tekanan-tekanan sosial-ekonomi dan pengaturan-pengaturan yang datang dari rejim penguasa yang menindas. Pergolakan pemberontakan semacam itu telah amat sering terjadi. Puluhan bahkan ratusan kali sejak zaman kolonial, dan juga muncul pada masa setelah Indonesia merdeka. Para pemberontak dan simpatisan umumnya melihat bahwa penguasa bukannya melindungi, melainkan mengeksploitasi rakyat. Pada tahun-tahun belakangan ini, bermunculan banyak risalah yang rinci, baik studi teoritik maupun empirik tentang pemberontakan dengan pelbagai manifestasinya. Hasil kajian tersebut telah

menunjukkan pentingnya sejarah untuk memahami bentuk-bentuk pemberontakan sebagai pengungkapan kolektif.

Buku kecil ini semula ditulis sebagai skripsi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980. Untuk itu, saya harus menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing di Universitas Gadjah Mada. Juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo, yang telah banyak mengarahkan minat studi saya sampai menjadi skripsi. Meski demikian tanggungjawab atas isi skripsi yang kini menjadi buku ini, sepenuhnya tetap ada pada diri saya.

Tidak ada perubahan yang krusial isi buku ini dari naskah aslinya. Dan saya berharap, rentang waktu lebih dua puluh tahun lalu dari isi buku disusun, tetap relevan untuk memahami dinamika masyarakat yang senantiasa berubah, dan siapapun dapat memetik manfaat dari sebagian unsur-unsur masa lalu yang bertahan dan hadir dalam masa sekarang.

Padang, Februari 2004

MTZ

Daftar Isi

Kata Pengantar — v
Daftar Isi — vii

I. Pendahuluan — 1

II. Perubahan Sosial Ekonomi di Sumatera Barat Awal Abad ke-20: — 19
1. Struktur Masyarakat Minangkabau Tradisional — 19
2. Penetrasi Ekonomi Uang — 24
3. Kebijakan Pemerintah Kolonial — 34
4. Modernisasi Minangkabau — 39

III. Gerakan Komunis di Sumatera Barat — 51
1. Jaringan Organisasi — 51
2. Ideologi — 62
3. Prasarana dan Metode — 77
4. Massa Pendukung — 92

IV. Pemberontakan — 105
1. Kondisi Umum Sebelum Pemberontakan — 106
2. Radikalisme Gerakan di Silungkang — 112
3. Kaum Pemberontak Beraksi — 123
4. Reaksi dari pihak penguasa — 139

V. Penutup — 151
- Kepustakaan — 167
- Lampiran — 175
- Biodata Penulis — 203
- Indeks — 205

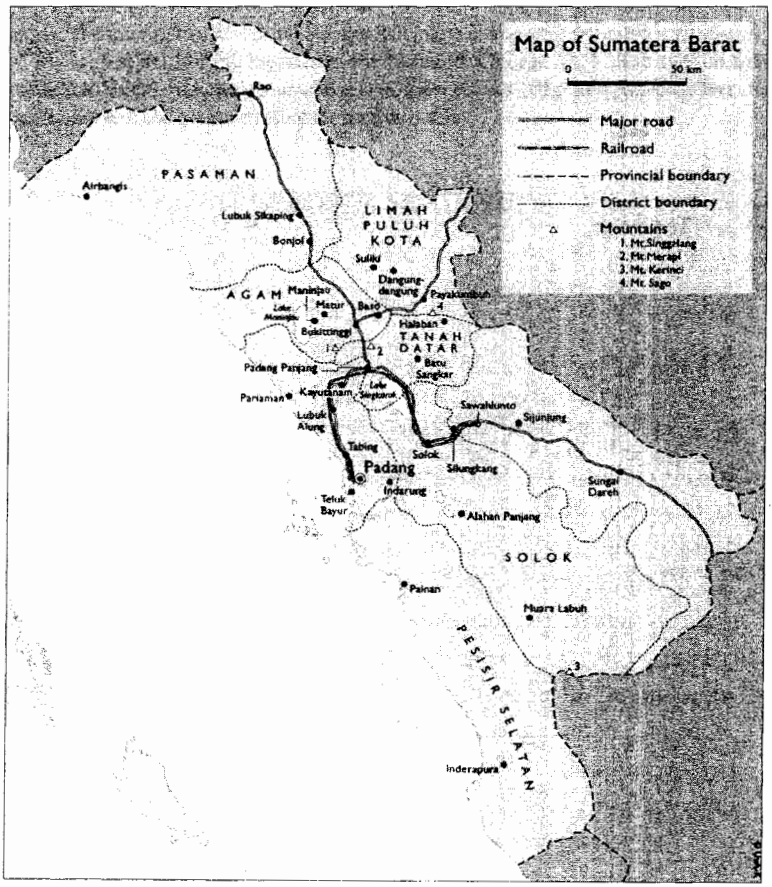
Map of Sumatera Barat
0
50 km
Major road
Railroad
Provincial boundary
District boundary
Mountains
1. Mt.Singgalang
2. Mt.Merapi
3. Mt. Kerinci
4. Mt. Sago
Rao
PASAMAN
Airbangis
Lubuk Sikaping
Bonjol
LIMAH PULUH KOTA
Suliki
Dangung-dangung
Payakumbuh
AGAM
Maninjau
Lake Maninjau
Matur
Baso
Bukittinggi
Halaban
TANAH DATAR
Batu Sangkar
Padang Panjang
Lake Singkarak
Pariaman
Kayutanam
Lubuk Alung
Sawahlunto
Sijunjung
Tabing
Padang
Solok
Silungkang
Indarung
Sungai Dareh
Teluk Bayur
Alahan Panjang
SOLOK
Painan
Muara Labuh
PESISIR SELATAN
Inderapura

I
Pendahuluan

Selama abad ke-20, tiga kali orang Minangkabau di Sumatera Barat memberontak terhadap rejim yang berkuasa. *Pertama*, pemberontakan yang lebih dikenal dengan "Pemberontakan Pajak" yang terjadi di dua tempat; Kamang dan Manggopoh, pada tahun 1908. *Kedua*, "Pemberontakan Silungkang", atau sering juga disebut "pemberontakan komunis", pada tahun 1927. *Ketiga*, "Pemberontakan PRRI" pada tahun-tahun 1958-1961. Kendati ketiga pemberontakan itu diwarnai latar ideologi dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda, ketiganya merupakan contoh konkrit dari perlawanan rakyat Sumatera Barat menentang rejim penguasa yang oleh pelaku sejarahnya dianggap menindas. Ketiganya berakhir dengan kekalahan dan menimbulkan malapetaka yang menyengsarakan rakyat.

Mengapa mereka memberontak? Bagaimana pemberontakan itu berlangsung dan apa akibatnya? Buku kecil ini ingin memberikan perhatian secara khusus kepada Pemberontakan Silungkang. Kasus ini menarik, pertama-tama karena secara ideologis ia merupakan representasi campuran

antara ideologi tradisional yang bercorak nativistik seperti tercermin dari kasus Pemberontakan Pajak 1908, dan ideologi nasionalisme modern yang sedang tumbuh di Indonesia tahun 1920-an. Kedua, stigma komunis dalam sejarah bangsa sejak "Pemberontakan Madiun" pada tahun 1948 dan "Gerakan 30 September" pada tahun 1965 yang diyakinkan sebagai pemberontakan PKI, telah mengacaukan pemahaman sejarah generasi masa kini terhadap setiap bentuk gerakan komunis. Padahal, sebagaimana yang akan ditunjukkan dalam studi ini, Pemberontakan Silungkang yang melibatkan kelompok komunis pada masa itu jelas-jelas merupakan manifestasi pergerakan nasional menentang rejim kolonial. Bagi kaum komunis, seperti juga bagi kebanyakan kaum pergerakan dari berbagai aliran ideologi waktu itu, sejarah kolonial adalah sejarah perampasan dan penindasan oleh kekuasaan asing dan karena itu harus diusir dari muka bumi Indonesia. Kendati Indonesia sudah merdeka, tetapi kalau rejim penguasa masih melakukan penindasan dan perampasan terhadap rakyatnya, perbuatan itu tetap kolonial. Paling tidak itu yang dapat diketahui dari teori neo-kolonialisme sejak tahun 1970-an.

Pemberontakan Silungkang yang melibatkan kelompok komunis, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis pada periode yang lebih kemudian, baik semangatnya, sifat dan kerangka kerjanya, juga konteks pengalaman historis yang berlaku. Kekacauan pemahaman sejarah bangsa, —khususnya tentang Pemberontakan Silungkang,— mungkin sebab ia belum pernah ditulis, atau karena masalah tafsir sejarah, atau juga sebab ideologi rejim Orde Baru yang menggeneralisasikan tiap peristiwa historis secara hitam-putih menurut kaca-mata penguasa.

Memang, sejauh ini kasus Pemberontakan Silungkang belum pernah ditulis. Tulisan-tulisan Belanda tentang sejarah

kasus pemberontakan ini sebenarnya sudah lumayan banyak. Salah satu yang terpenting diantaranya seperti yang ditulis oleh Schriekê dalam salah satu bagian dari bukunya yang terkenal itu, *Indonesian Sociological Studies* (1960).[1] Karya Schrieke dengan sangat cemerlang berhasil menelusuri akar persoalan yang melatarbelakangi pemberontakan itu. Datanya juga didukung oleh studi lapangan yang cukup andal. Akan tetapi sayang, kesarjanaan Schrieke sebagai guru-besar terkemuka di Sekolah Tinggi Hukum Batavia tahun 1920-an, telah dicemarkan oleh afiliasi keahliannya sebagai indolog yang mengabdikan diri dan ilmunya untuk kekuasaan. Penyelidikannya tentang "Sebab-sebab Pemberontakan Komunis di Sumatera Barat" (1927) sesungguhnya adalah karya yang bermutu, tetapi mutu itu jadi sedikit cacat karena tafsir sejarahnya terjebak pada prasangka-prasangka kolonial yang melihat pemberontakan itu sebagai "pembusukan" dari dalam masyarakat sendiri dan bukannya merupakan bagian dari akibat kebijakan kolonial yang menindas. Schrieke sejak dini telah terperangkap dengan prasangka kolonial dan lebih tertarik — sejalan dengan pesan sponsor— untuk mendalami sebab-sebab pemberontakan, ketimbang merekam deskripsi peristiwa pemberontakan itu sendiri. Karenanya menjadi sia-sia untuk mengharapkan cerita tentang pemberontakan dalam karya Schrieke.

Penulis lain, Petrus Blumberger dalam bukunya berjudul *De Communistische Beweging in Nederlansch-Indie* (1953) juga telah menyajikan beberapa deskripsi peristiwa Pemberontakan Silungkang. Buku ini bisa melengkapi kekurangan karya Schrieke. Buku ini pada dasarnya menggunakan bahan-bahan yang dikutip langsung dari dokumen resmi pemerintah.[2] Namun begitu, ia juga tidak luput dari penilaian-penilaian sejarah yang menimbulkan kesan bahwa karya ini lebih me-

wakili sejarah kolonial.[3] Blumberger misalnya terlalu menekankan segi-segi kejelekan dan kelemahan-kelemahan dari gerakan komunis itu, dan cenderung mengabaikan kenyataan bahwa sejarah Indonesia dalam periode itu menunjukan keanekaragaman pencerminan yang perlu mendapat perhatian yang bersungguh-sungguh, baik terhadap kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maupun terhadap sikap pemerintah kolonial pada waktu itu. Ini perlu bagi pengamatan yang lebih cermat dan teliti, sehingga semuanya dapat dijalin dalam suatu uraian yang bulat untuk memungkinkan pandangan yang menyeluruh dan seimbang.

Selain dari kedua karangan penting di atas, perlu juga disebutkan karya Arnold C. Brackman berjudul *Indonesia Communism: A History* (1963) dan karya Ruth T. McVey *The Rise of Indonesia Communism* (1968). Karya Brackman khususnya patut disesalkan. Sebuah buku serius setebal 350 halaman membicarakan perkembangan Gerakan Komunis Indonesia, tetapi mengabaikan kasus Silungkang. Dengan sendirinya berarti mengaburkan fakta keanekaragaman sejarah gerakan pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah waktu itu. Padahal sejarah gerakan komunis di Indonesia, seperti diakui sendiri oleh Brackman dalam kata pengantarnya, memiliki coraknya tersendiri. Lebih dari itu, ia merupakan gerakan komunis tertua dan terbesar di dunia, selain Uni Soviet. Bila ini benar, maka penjelasan seperti itu kiranya sangat paradoks dengan apa yang hendak dibuktikannya dalam bukunya itu.

Buku McVey, *The Rise of Indonesia Communism* (1968) mencerminkan keahliannya sebagai pakar sejarah komunis yang dikenal dalam dunia akademik Barat. Buku itu kaya dengan bahan-bahan sumber yang unik dan beragam. Analisisnya juga sangat rinci dan mendalam sehingga membantu menjelaskan lebih jauh tentang tempat komunis dalam

konteks sejarah modern Indonesia.

Dua buah artikel yang ditulis masing-masing oleh Benda dan Stromquist,[4] merupakan perdebatan menarik mengenai sifat dan kedudukan gerakan komunis Indonesia dalam pergerakan nasional Indonesia pada dasa warsa ketiga abad ke-20. Kedua tulisan ini amat berguna untuk mengidentifikasi kasus Pemberontakan Silungkang dalam konteks sejarah Indonesia pada umumnya dan sejarah pergerakan khususnya.

Secara keseluruhan, kedua tulisan ini, bersama-sama dengan sejumlah karya penulis terdahulu, sedikit banyak membantu studi ini dalam mengarahkan dan mempertajam perumusan persoalan yang ingin dipelajari dalam buku ini. Yaitu, (i) Prakondisi macam apa yang menciptakan suasana ke arah terjadinya pemberontakan itu? (ii) Apa persisnya yang menjadi sumber (ideologi dan material) konflik kekerasan itu, sehingga mematangkan situasi bagi terjadinya Pemberontakan Silungkang itu? Lalu, di manakah letak peristiwa itu di dalam konteks sejarah lokal Sumatera Barat khususnya dan dalam konteks sejarah Indonesia modern umumnya?

* * *

Studi ini secara sederhana bertujuan untuk mempelajari sejarah Pemberontakan Silungkang dalam konstelasi sejarah makro-nasional. Dengan judul: *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat,* studi ini bermaksud hendak mempelajari segi-segi persoalan yang berkenaan dengan pra kondisi yang melatarbelakangi gerakan pemberontakan dalam konteks lokal dan nasional sekaligus, di samping beberapa penampilan aksi-aksi yang dilakukan.

Sebagai peristiwa lokal,[5] Pemberontakan Silungkang secara langsung dan tak langsung mencerminkan jawaban masyarakat setempat terhadap arus perubahan yang datang

dari aras nasional ke dalam lingkungan lokal. Berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang dialami oleh Minangkabau, terutama perubahan drastis sejak perempat pertama abad ke-20, telah menimbulkan berbagai fenomena yang sampai pada tingkat tertentu telah menciptakan situasi konflik dan keresahan sosial.

* * *

Kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam studi ini berangkat dari pemahaman tentang pemberontakan sebagai salah satu bentuk "gerakan sosial".[6] Sebagai suatu manifestasi dari gerakan sosial, Pemberontakan Silungkang merupakan serangkaian kegiatan dan tindakan kekerasan yang terorganisir dengan melibatkan massa secara luas untuk mencapai tujuan tertentu. Harus diakui, batasan yang diberikan pada definisi konsep gerakan sosial di sini bersifat longgar dan agak umum. Suatu studi haruslah mampu membedakan bukan saja mengenai tingkat intensitas orang atau kelompok yang terlibat dalam pemberontakan, tetapi juga hal-hal yang menyangkut organisasi dan orientasi (tujuan) yang mendasarinya.

Tidak mungkin menilai atau menentukan tujuan suatu gerakan pemberontakan tanpa mengetahui hal-hal yang melatarbelakanginya. Dan hal yang terakhir ini pun sangat kompleks dan banyak macam ragamnya. Mungkin sekali pemberontakan itu timbul karena munculnya rasa ketidakpuasan akibat keadaan jepitan ekonomi yang menyengsarakan, atau barangkali karena kedudukan sosial yang dianggap tidak pantas atau, mungkin karena aspirasi yang dikejar belum atau tidak tercapai atau, perlakuan tidak adil karena kekuasaan politik yang tengah berjalan tidak lagi sesuai dengan tuntutan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Atau, boleh jadi karena frustasi-frustasi lain yang tengah dihadapi, tetapi biasa-

nya juga merupakan gabungan dari salah satu atau beberapa faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Di samping itu, jumlah orang-orang yang terlibat dan lama masa berlangsungnya pemberontakan itu harus pula dibedakan. Dalam setiap pemberontakan, unsur-unsur yang disebutkan di atas pada umumnya berbeda. Tetapi meskipun demikian, mestilah ada juga beberapa kesamaan-kesamaannya. Bagi keperluan studi ini, kerangka acuan di atas hanya berguna sebagai rujukan ke suatu kasus sejauh tidak mengabaikan nuansa-nuansa yang terkandung di dalamnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan relevansinya dengan pokok masalah studi ini tetap bisa dipertahankan.

***

Silungkang adalah sebuah nama tempat, yakni *nagari* di mana peristiwa pemberontakan itu meletus pada tahun 1927. Pada masa itu Silungkang merupakan salah satu nagari di lingkungan daerah *Onderafdeeling* (Kecamatan) Sawah Lunto, menurut pembagian administratif pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi peristiwa pemberontakan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Silungkang saja, melainkan juga meluas ke nagari-nagari lain di sekitarnya seperti di Sawah Lunto, Muara Kalaban, Padang Sibusuk dan lain-lain. Mengingat basis perlawanan utama kaum pemberontak terkonsentrasi di nagari Silungkang dan sekitarnya, maka dalam studi ini penggunaan kata Silungkang bersifat relatif. Sebetulnya gejala pemberontakan itu menjalar di seluruh kawasan Sumatera Barat dengan beberapa basis konsentrasi di beberapa tempat. Meskipun tingkat intensitas pemberontakan, dalam arti jumlah massa yang terlibat tampak lebih menonjol di Silungkang bila dibandingkan dengan di tempat lain, tidak berarti bahwa gejala itu hanya merupakan fenomena khas Silungkang dan sekitarnya

saja. Sesungguhnya gerakan telah diatur secara luas dan serentak di Hindia Belanda, khususnya dua tempat yang berjauhan; di Banten dan Sumatera Barat. Namun karena rencana pemberontakan di kedua tempat itu dengan cepat dapat diantisipasi oleh pihak pemerintah kolonial, maka aksi pemberontakan itu berhasil diblokir dan dipadamkan.

Di Sumatera Barat khususnya, basis pemberontakan di beberapa tempat, termasuk di Padang dan Padang Panjang, dapat dihentikan sebelum pemberontakan meletus, sehingga tidak sempat menjalar lebih luas. Sementara di beberapa tempat, seperti di Silungkang dan daerah sekitarnya, antara lain karena keterbatasan personil keamanan, aksi pemberontakan berada di luar kontrol pemerintah kolonial, sehingga untuk sementara tidak dapat diatasi.

Lebih jauh studi tentang gerakan sosial umumnya dilihat dalam kerangka analisis teori "tingkah-laku kolektif".[12] Tingkah-laku kolektif tidak selalu terjadi dalam bentuk tindakan kekerasan. Bisa juga terjadi dalam bentuk aksi diam atau "penghindaran" (*avoindance*). Konsep teoretis yang lebih relevan untuk membahas aksi-aksi kekerasan seperti yang tercermin dalam kasus pemberontakan telah dikemukakan oleh Ted Robert Gurr dalam bukunya *Why Men Rebel* (1970), khususnya berkenaan dengan apa yang disebutnya dengan konsep "tingkah-laku massa yang agresif".[13] Tingkah-laku massa agresif yang dipelajari Gurr khususnya berupa tindakan kekerasan politik (*political violence*) dari sudut psikologi sosial.

Sehubungan dengan itu Gurr membagi tindakan kekerasan politik dalam dua kategori besar sebagai berikut:

1. Kerusuhan (*turmoils*), yaitu suatu tindakan kekerasan politis yang bersifat spontan dan kurang terorganisir, sedang jumlah massa yang terlibat cukup banyak, sekalipun tidak begitu meluas. Contoh-contoh dari

kategori ini antara lain misalnya pemogokan, demonstrasi, huru-hara dan lain-lain sejenisnya.

2. Revolusi (*revoulutions*), yaitu suatu tindakan kekerasan berupa perjuangan yang sangat terorganisir secara mapan dan intensif. Kategori kedua ini selanjutnya dibedakannya pula dalam dua macam jenis sebagai berikut (a) Persekongkolan (*conspiracy*), yaitu merupakan gerakan persekongkolan atau persekutuan rahasia di mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terorganisir sangat rapi umpamanya, terorisme, pemberontakan kecil dan organisasi-organisasi "bawah tanah" lainnya. (b) *internal war* yaitu suatu tindakan kekerasan politis yang sangat terorganisir sekali, sedangkan jumlah massa yang terlibat cukup besar dan meluas sekali. Contoh-contoh bagi jenis yang terakhir ini antara lain adalah perang saudara, perang gerilya, kudeta dan sebagainya.

Adapun penyebab terjadinya suatu tindakan kekerasan politis yang paling elementer menurut Gurr, adalah timbulnya sikap ketidakpuasan (*discontents*) di kalangan masyarakat luas sebagai akibat adanya jurang antara *value expectations* dan *value capabilities* sehingga masyarakat sungguh-sungguh merasakan sesuatu yang hilang, yang dalam hal ini disebutnya dengan "deprivasi relatif" (*relative deprivation*).[7]

"Deprivasi relatif" itu sendiri akan menjadi tindakan kekerasan politis tergantung kepada *precipitating factors* (*intencity of commitment to values*), yaitu adanya dukungan luas dari kelompok masyarakat dalam melancarkan aksi-aksi kekerasan.

Konsep-konsep teoritis di atas menyarankan pendekat-

an yang lebih bersifat teoritis dari pada analitis yang mungkin dapat ditarik dari pengetahuan yang terbatas dalam rangka menelaah studi ini. Dalam hubungan itu penulis percaya, bahwa kasus "Pemberontakan Silungkang" dalam banyak hal termasuk ke dalam katagori konsep *internal war*.[8]

* * *

Meminjam konsep-konsep teoretis yang diajukan oleh sejumlah ahli di atas secara longgar dan eklektik, studi ini berupaya melacak sebab-sebab Pemberontakan Silungkang sebagai bagian dari akibat ketidakpuasan (*discontents*) yang ditimbulkan oleh adanya jurang antara *value expectations* dan *value capabilities*. Dalam konteks masyarakat lokal Sumatera Barat, jurang itu disebabkan oleh tiga faktor yang saling berkaitan satu sama lain dan berproses dalam jangka panjang, dalam arti tidak mendadak. Ketiga faktor itu, *pertama*, penetrasi sistem ekonomi uang; *kedua*, penetrasi sistem kolonial yang semakin intensif; dan akhirnya yang *ketiga*, kekuatan yang bersumber dari dalam masyarakatnya sendiri, yaitu reaksi dari unsur-unsur Adat Alam Minangkabau, bahwa ketika terjadi krisis-krisis yang sampai batas tertentu menimbulkan ketidak-harmonisan dan akhirnya tumbuh goncangan dalam masyarakat.

Ketiga faktor itu bertemu, dan adakalanya bertabrakan dalam suatu wadah apa yang di sini disebut sebagai "lingkungan sosio-kultural Minangkabau".[9] Sangatlah tidak mungkin untuk menentukan kekuatan manakah dari ketiga kekuatan ini yang paling dominan pengaruhnya terhadap lingkungan budaya masyarakat Minangkabau tersebut. Namun dapat diduga, bahwa penetrasi sistem kolonial itulah yang barangkali menjadi faktor utamanya. Efek yang ditimbulkan dari faktor yang terakhir ini memang bukan satu-satunya faktor dibalik

kemunculan gerakan pemberontakan itu. Namun sebagaimana yang akan dilihat nanti, benturannya yang keras dan tusukannya yang perih terhadap lingkungan sosio-kultural masyarakat Minangkabau, telah menjadikannya sebagai faktor yang paling menonjol dan merupakan pendorong yang sangat kuat, yang dimodifikasi oleh pemimpin gerakan pemberontakan dalam melancarkan aksi-aksinya.

Kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia sering menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam kerangka ekonomi dan politik dengan cara mengeksploitasi kekayaan sumber alam dan dalam rangka membangun administrasi kolonial. Tetapi pada saat yang sama penguasa kolonial berusaha menggalakkan dan memaksakan konservatisme kelas-kelas tradisional, agama dan struktur masyarakatnya. Hampir bisa dikatakan, sistem administrasi kolonial hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan ketertiban (*rust en orde*) di samping memungut berbagai macam pajak. Dan sebaliknya, sedikit saja, —kalau bukannya sama sekali tidak ada— perhatian terhadap kepentingan rakyat jajahannya.

Sebagai akibatnya, tidaklah begitu mengherankan bilamana isu pajak dan pemerasan, lebih melandasi sifat agresifitas dari gerakan dalam melancarkan aksi-aksinya terhadap pemerintah kolonial. Dan tampaknya hal ini memang bukan gejala khas di Minangkabau. Gejala ini juga mirip dengan apa yang terjadi dalam kebanyakan gerakan-gerakan protes dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial.[10]

Masalahnya sekarang, mengapa pemberontakan ini yang secara agresif justru hanya meledak di daerah ini, atau lebih tepatnya di Silungkang, kalau memang isu yang dilancarkan adalah terhadap sistem yang barangkali secara merata berlaku juga di lain tempat? Sudah barang tentu ada faktor unik setempat, di mana pemberontakan itu meledak. Ini tampaknya

sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan sebagai *precipitating factors*, yang menciptakan kondisi-kondisi yang cukup (*necessary condition*) bagi meletusnya pemberontakan itu.

Terhadap persoalan ini, ada sebuah pertanyaan hipotesis yang perlu diajukan; kondisi-kondisi lokal yang bagaimanakah yang menyebabkan menonjolnya tingkat intensitas orang-orang atau kelompok yang melibatkan mereka ke dalam situasi pemberontakan itu? Kemudian, dari penampilan aksi-aksi yang dilancarkan perlu pula dipertanyakan, persoalan-persoalan ideologi, kepemimpinan, pra sarana atau organisasi dalam pengertian seluas-luasnya.

Sejalan itu, metode sejarah kritis dipergunakan dalam penulisannya. Proses pengerjaan melibatkan langkah-langkah tertentu menurut norma-norma ilmu sejarah.[11] Data-data dikumpulkan dari bermacam jenis sumber, kemudian dianalisis menurut metode kritik ekstern dan intern. Temuan informasi faktual dari sumber tersebut selanjutnya diseleksi dan dirangkaikan ke dalam hubungan-hubungan fakta hingga membentuk pengertian-pengertian dalam unit-unit analisis tertentu. Dari situ selanjutnya rekonstruksi sejarah bisa dilakukan. Dalam banyak hal uraian yang bersifat deskriptif-naratif atau kronologis akan banyak ditemui, terutama yang menyangkut genesis peristiwa pemberontakan itu. Namun demikian uraian deskriptif akan dipadukan dengan uraian yang bersifat analitik dalam pembahasan. Terutama berkenaan dengan penampilan-penampilan aksi gerakan, sehingga memungkinkan untuk menemukan tendensi-tendensi atau pola-pola tertentu yang mungkin juga berlaku dalam kebanyakan gerakan sosial pada umumnya.

Adapun sumber-sumber yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian buku berasal dari beberapa macam

jenis sumber. Beberapa macam kategori sumber antara lain berupa hasil rekaman sehari-hari seperti surat kabar atau koran-koran. Sedang lainnya merupakan sesuatu yang mungkin sekali dirancang secara teliti, yang kadangkala juga melibatkan gagasan pemikiran penulisannya untuk maksud-maksud tertentu. Contoh-contoh dari jenis sumber yang terakhir ini sumber-sumber dari arsip pemerintah kolonial yang sudah diterbitkan.

Dengan demikian ada dua jenis sumber utama yang dipergunakan bagi studi ini, yakni sumber koran dan arsip pemerintah kolonial. Sumber-sumber koran misalnya, terutama koran-koran lokal yang berhaluan "Komunis" diterbitkan di daerah Sumatera Barat sendiri, sangatlah membantu dalam mempelajari perkembangan gerakan itu pada fase awalnya. Sebagai sumber informasi yang sangat berharga, surat kabar itu ternyata bukan hanya memuat data-data yang menunjuk faktanya, tetapi juga tentang opini, interpretasi atau berupa pikiran-pikiran subjektif-spekulatif.[12] Hal ini kadang-kadang sangat menonjol sekali, sehingga mudah mengetahui subjektifitas yang melekat di dalamnya karena sifat keterus-terangannya dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kepentingan kelompok masing-masing. Kecenderungan ini terlihat jelas bilamana, misalnya, mencoba membalik-balik lembaran surat kabar *Soeara Tambang*, sebuah koran kaum buruh tambang batu bara di Ombilin dan Sawah Lunto. Dan hal yang serupa juga berlaku dalam koran *Pemandangan Islam* dan *Djago Djago*, dua buah koran komunis terbitan lembaga (perguruan) sekolah Thawalib Padang Panjang yang berorientasi Islam, dan lain-lainnya.

Demikian pula sebaliknya, ada juga koran-koran yang menyuarakan sikap antipati dan oposisinya yang keras seperti yang dapat kita jumpai dalam koran *Soeara Muslimin* (Batu

Sangkar) dan *Bendera Islam* (Yogyakarta). Selain dari pada itu, ada lagi surat kabar seperti *Seng Po,* sebuah koran yang diterbitkan oleh kelompok saudagar-saudagar Cina di Fort de Kock (Bukit Tinggi) dan *De Locomotief* (Semarang), yang juga pernah mengetengahkan tentang kasus pemberontakan komunis Sumatera Barat, namun agak lebih bersifat netral karena tidak begitu diketahui dengan jelas sikap simpati dan antipatinya atau sikap pro dan kontranya.

Bilamana kebanyakan sumber-sumber koran yang digunakan untuk studi ini berupa koran terbitan lokal Sumatera Barat, maka seperti telah dicatat di atas, koran-koran terbitan daerah lain juga mendapat perhatian sewajarnya. Hal mana dimaksudkan untuk memberikan pandangan perbandingan yang lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk melihat permasalahannya tanpa menggunakan sumber sepihak belaka.

Adapun sumber-sumber arsip kolonial antara lain berupa laporan, yang kemudian sudah diterbitkan ke dalam edisi bahasa Inggris, *The Communist Uprising of 1926–1927 in Indonesia* (Ithaca: Cornell Univ., 1960). Dokumen yang telah berbentuk buku ini aslinya berasal dari tiga jenis dokumen berupa Laporan Pemerintah yang antara lain berisi: Laporan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Gerakan Komunis Indonesia dan Laporan Komisi Penyelidikan tentang Kasus Pemberontakan Komunis di Banten dan Silungkang (Sumatera Barat). Dokumen yang kedua dan terakhir di atas merupakan hasil penyelidikan dari suatu Komisi yang diketuai oleh B. Schrieke, guru besar sosiologi di Batavia berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah, tertanggal 13 Februari 1927.[13]

Komisi Penyelidikan itu kemudian menghasilkan sebuah laporan terperinci; salah satu bagian memuat tentang kasus pemberontakan komunis di Sumatera Barat yang aslinya

berjudul: *De Gang der Kommunistische Bewegeng ter Sumatera's Westkust, Deel I* (Politieke-gedeelte): *Raport Van Commisie van Onderzoek*, ingesteld bij het gouvernementsbesluit van 13 Februari 1927, No, 1 a (Weltevreden : Landsrukkerij, 1928).

Sumber-sumber dokumen lain umpamanya adalah, *Verslag Van Bestuur en Staat Van Nederlandsch-Indie, Suriname, en Curacao, 1924, 1927-28; Mail Rapport dan Memorie Van Overgave*, yang secara lengkap dapat dilihat pada daftar kepustakaan di bagian akhir.

Beberapa dari sumber yang disebutkan di atas, seperti Laporan Komisi dan dokumen *Memorie van Overgave* menyajikan juga uraian-uraian yang panjang lebar, disertai dengan penilaian-penilaian (interpretasi) yang cermat dan kritis. Namun karena pemberitaan yang dikeluarkan tidak jarang pula ditujukan untuk keperluan-keperluan tertentu, maka kenyataan ini bukannya tidak memiliki resiko bilamana tidak berhati-hati dalam mengidentifikasi sumber-sumber semacam itu. Suatu kritik ekstern terhadap "keaslian" sumber-sumber tersebut barangkali tidak terlalu dipersoalkan. Yang lebih penting dipertanyakan di sini ialah kritik intern untuk menguji kredibilitas dan "prasangka" yang secara intrinstik mungkin terdapat di dalamnya.[14]

Demikianlah hingga dengan melengkapi bahan kepustakaan dari sumber-sumber sekunder lainnya, —di samping menetapkan suatu sudut pandangan yang tegas—, persoalan sumber di atas sedikit banyak dapat diatasi. Konteks itu pula, sebabnya studi dibuat untuk memberikan analisis sosio-historis dengan pendekatan dari sudut sejarah lokal. Selain itu daftar kepustakaan dan beberapa lampiran akan disertakan di bagian akhir buku.

***

Catatan Akhir

[1] B. Schirieke, *Indonesian Sociological Studies*, Jilid I (The Hague, Bandung: W. Van Hoeve Ltd, 1955). Buku ini merupakan bagian dari laporan hasil penyelidikan Schrieke sebagai Ketua Komisi Pemerintah Pusat untuk Penyelidikan Pemberontakan Komunis di Sumatera Barat (1927).

[2] *Verslag van Bestuur en Staat Van Nederlandsch Indie, Suriname, en Curacao van 1927*, Hoofstuk B, pp. 5-8.

[3] Bila membaca deskripsi tentang peristiwa pemberontakan ini misalnya, nampak dengan jelas sekali bahwa dia tampak lebih menekankan kegiatan dan peranan Asisten Residen Karsen (Order-afdeling Sawah Lunto) dalam rangka menumpas gerakan pemberontakan, sementara aktivitas gerakan disinggung secara sepintas lalu sambil menerangkan kegiatan pihak pertama. Penulis terutama merasa keberatan dengan interpretasi (pandangan) sejarahnya seperti yang dikemukakannya dalam paragraf pada pp. 148-149.

[4] Harry J. Benda, "The Communist Rebellions of 1926-1927 in Indonesia" dalam *Pacific Historical Review* (May, 1955), pp. 139-152. Shelton Stromquist, "The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: A Reinterpertation", dalam *Journal of Southeast Asian History*, Vol. 8, No. 2 (1967), pp. 189-98.

[5] Pengertian lokal mengacu pada proses perkembangan kegiatan manusia pada masa lampau mendiami suatu tempat tertentu, dalam hal ini adalah Silungkang. Mengenai konsep-konsep sejarah lokal buku terbaik ialah Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Gadjah Mada Univ. Press, 1979) pp. 9-15; FA. Sutjipto, "Beberapa Tinjauan tentang Sejarah Lokal" dalam *Lembaran Sejarah* No. 6 (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, FSK Univ. Gadjah Mada, 1970), pp. 37-42; T. Ibrahim Alfian, "Tjatatan singkat tentang konsep Sejarah Lokal", Ibid, pp. 43-44.

[6] Istilah "pergerakan sosial" di sini diterapkan pada aktivitas kolektif yang bertujuan hendak mewujudkan atau sebaliknya menolak perubahan terhadap tatanan masyarakat. Definisi ini dipinjamkan dari Sartono Kartodirdjo, "Pergerakan dalam Sejarah Indonesia", dalam *Lembaran Sejarah 7* (Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah, FSK, Universitas Gadjah Mada, 1971), p. 38.

[7] Gurr mendefinisikan "deprivasi relatif" sebagai berikut: ".... relative deprivation is a perceived discrepancy between men's value expectations and their value capabilities ...."; sedangkan yang dimaksudkan dengan value expectations are g ods and conditions of life to which people believe, they are rightfully entitled ...."; Value capabilities are goods and conditions they are capable of attaining or maintaining, given the social means available to

them.... ", Guur, *Why Men Rebels* ...., pp. 12-13.

[8] Konsep internal war secara lebih luas telah dikembangkan oleh Harry Eckstein dalam tulisannya, "On The Etiology of Internal War", dalam George H. Nadel (ed.), *Studies in the Philosophy of History, Selected Essys from History and Teory*, (New York: Harper Torch Books, Harper & Row, Publisher, 1965), pp.117-147; lihat juga bukunya, *Internal War, Problem and Approach*, (London: The Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan Limited, 1964); Berkhofer, *The Behavioral Approach to...*, pp. 297-302.

[9] Di sini mencakup pengertian lingkungan alam seperti, tipe dan kondisi alam (topografis), letak, luas, iklim (geografis), jenis dan kesuburan tanah serta sumber alam. Menyangkut juga aspek-aspek ethnologis anthropologis seperti, sistem nilai, religi, ideologi, tradisi atau kebiasaan dan seterusnya.

[10] Lihat umpamanya, Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java* (Oxford: Oxford Univ. Press, 1973); lihat juga karangan penulis yang sama, "Agrarian Radicalism in Java: Its Setting and Development", dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, (Cornell University, 1972).

[11] Lihat umpamanya, Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terjemahannya) (Jakarta: Yayasan Penerbit Univ. Indonesia, 1973), terutama bab-bab V, IV dan VII. Lihat juga Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta : Yayasan Idayu, 1978).

[12] Mengenai metode penggunaan dari macam-macam jenis sumber ini lihat misalnya, Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumenter", dalam *Lembaran Sejarah* No. 9, (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan sejarah FSK Universitas Gadjah Mada, 1974), pp, 19–45. Lihat juga artikel dari penulis yang sama dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta; Penerbit Gramedia, 1971), pp. 61-92.

[13] Komisi itu anggotanya terdiri dari Residen Arends (Ketua), A.J. Hamester (Staf BB Untuk Urusan Luar Pulau), Prof. Dr. B.J.O. Schrieke (Mahaguru pada RHS Batavia), W. Groeneveldt (Ass. Residen), Mr. H. Fievez de Malines Van Ginkel, S.L.Van der Plas (Kontroleur di Payakumbuh) dan Darwis gelar Datuk Madjo Indo (Kepala Distrik Maninjau).

[14] Kecenderungan ini bukannya tidak berlaku pada Hasil Laporan Komisi di atas. Sebuah koran lokal menyebutkan "sikap *partijding onderzoek*" yang berlaku dalam Komisi tersebut, di mana ditunjukkan bahwa laporan itu ditulis tanpa kesepakatan dari semua anggota Komisi. Lagi pula berbeda dengan Komisi Penelitian di Banten, sebagian besar anggota komisi Sumatera Barat terdiri dari para pegawai di mana masing-masing anggotanya diwajibkan u tuk membuat laporan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pernah diambil

oleh atasan mereka. Ini, bagaimanapun juga, mengurangi objektifitas dari laporan itu. Beberapa perdebatan antara Asisten Residen Karsen (Onderafdeeling Sawah Lunto) dengan bekas Gubernur Arends juga bisa dipelajari sebagaimana pernah dimuat dalam surat kabar.

II

Perubahan Sosial Ekonomi di Sumatera Barat Awal Abad ke-20

Bagian ini akan menyoroti kondisi-kondisi umum yang mendahului timbulnya gerakan komunis Sumatera Barat dalam kerangka perubahan sosial ekonomi sejak awal abad ke-20. Sebelum menelusuri sumber kekuatan yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, terlebih dahulu akan disinggung struktur masyarakat Minangkabau. Hal ini membantu terutama untuk memahami sejauh mana struktur sosial tradisional mengalami perubahan akibat kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi, baik yang berasal dari dalam masyarakat Minangkabau sendiri maupun dari luar.

1. Struktur Masyarakat Minangkabau Tradisional

Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat kelompok-kelompok sosial berdasarkan ikatan genealogis dan teritorial. Kelompok-kelompok itu berimbang, mulai dari unit yang terkecil yaitu, *samande* (se-ibu)[1] *sajurai*, *saparuik* dan seterusnya, sampai kepada *suku*, dan akhirnya kesatuan terbesar yaitu *nagari*. Di Minangkabau "suku" merupakan unit utama dari struktur sosialnya.[2] Oleh karena orang-orang dari satu suku

biasanya juga mendiami lokasi yang sama, maka suku umumnya mencakup pengertian genelogis dan teritorial.

Akan tetapi *kampuang*, dan setingkat di atasnya, *nagari* tanpa dikaitkan ke salah satu suku tertentu sebenarnya hanyalah mengandung pengertian teritorial semata. Nagari dengan demikian, adalah merupakan suatu perserikatan (federasi) dari kelompok-kelompok kekerabatan atau suku, yang masing-masing memiliki seorang kepala, biasanya disebut *penghulu kepala*.[3]

Selama beberapa abad, sekurang-kurangnya sampai sebelum masuknya sistem kolonial Belanda, nagari di Minangkabau merupakan unit sosial politik tertinggi yang diperintah oleh suatu "Dewan Penghulu" (atau Dewan Kerapatan Nagari) yang terdiri dari wakil-wakil penghulu suku. Seseorang di antara mereka yang dianggap *primus inter-pares* diangkat sebagai kepala. Tidak ada kaitan struktural antara suatu nagari dengan nagari yang lain. Para penghulu yang berkuasa di setiap nagari tidaklah mewakili raja yang bersemayam di Pagaruyung,[4] melainkan mewakili rakyat di *nagari* itu sendiri. Kenyataan inilah kiranya yang telah menyebabkan banyak dari peneliti asing tentang kebudayaan Minangkabau berkesimpulan, bahwa Minangkabau dalam struktur sosial dan politiknya mirip dengan "negara kota" di masa Yunani Kuno. Artinya tiap nagari bertindak lebih kurang seperti republik-republik kecil yang satu sama lain terlepas dari kekuasaan pusat.

Suatu kelompok yang jauh lebih penting dan berkuasa di Minangkabau sebenarnya adalah golongan *penghulu*, yaitu kepala kelompok kekerabatan yang berkuasa atas tindak-tanduk kaum kerabatnya dan berada pada posisi yang penting dalam menguasai hak milik kaumnya. Sebab itu, menjadi penghulu dalam sebuah kaum (*clan*) yang kecil berarti memegang gelar dan pangkat yang sangat dihormati di tengah-

tengah masyarakat. Makanya, seseorang yang berambisi untuk menjadi penghulu tidaklah terlepas dari ambisi setiap suku sebagai keseluruhan untuk membangun prestisenya di dalam masyarakat.

Pada umumnya orang yang memegang jabatan penghulu dipilih dari sekelompok calon yang diseleksi berdasarkan salah satu dari dua pola kelarasan; "Bodi-Caniago" dan "Koto-Piliang". Pola Kelarasan Bodi-Caniago cenderung demokratis, dan pola Kelarasan Koto-Piliang lebih bersifat aristokratis.[5]

Sampai awal abad ke-19, di Minangkabau ada seorang raja yang dijuluki Raja Yang Di Pertuan Basa. Keturunannya masih tetap dipertahankan sebagai kelas bangsawan yang dihubungkan dengan raja-raja sebelumnya. Keluarga kerajaan itu terus membentuk semacam kasta yang terpisah ketat, dan tetap melaksanakan perkawinan dalam lingkungan keluarga kerajaan berdasarkan sistem patrilineal.

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, belum dapat dijelaskan secara terperinci sampai di mana terdapat perbedaan kelas dalam masyarakat Minangkabau dahulu kala, atau bagaimana perkembangan sistem status yang berlaku sampai masa kolonial. Kendatipun jelas, bahwa orang Minangkabau sebetulnya tak pernah mengembangkan suatu sistem status yang demikian rumit dengan kepekaan yang bersungguh-sungguh terhadap perbedaan kelas sosial, sebagaimana yang dapat ditemui dalam masyarakat Jawa dan Bali.[6]

Salah satu ciri masyarakat Minangkabau yang telah menarik perhatian banyak peneliti asing adalah sistem kekerabatan yang matrilineal, yaitu suatu sistem sosial di mana keturunan dan harta benda diperhitungkan melalui garis ibu dan bukan bapak. Sedang yang berkuasa atas seluruh kelompok keluarga adalah *mamak*, yakni saudara laki-laki dari ibu, dan bukan bapak. Keanggotaan dalam suatu rumah

tangga, hak menyandang gelar yang dimiliki suku dan pemilikan tanah, semuanya dipindahkan dari mamak ke *kemenakan* (keponakan).

Karena itu, pada tingkat kehidupan keluarga inilah sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal ini menjalankan fungsinya yang sesungguhnya. Di sini masalah pemilikan tanah bukan saja merupakan fungsi inti dalam sistem kekerabatan, tetapi sekaligus juga merupakan sumber konflik keluarga yang paling rawan dalam hubungan keluarga. Setiap suku biasanya memiliki dan membagi-bagikan lahan kepada anggota kaum atau keluarganya sebagai hak pakai yang permanen.

Keturunan setiap keluarga atau anak-anak dari keluarga itu adalah orang yang paling berhak atas tanah-tanah yang dimiliki oleh orang tua mereka. Namun bilamana keluarga itu punah dan tidak memiliki keturunan lagi, maka tanah itu mesti dikembalikan menjadi milik suku sebagai keseluruhan. Akan tetapi bilamana seseorang atau suatu keluarga mempunyai hak milik berkat jerih payah usahanya sendiri, umpamanya dengan membuka hutan dan menjadikannya sebagai tanah pertanian (ladang) atau berdagang atau dengan cara apa saja yang disahkan menurut aturan "adat", maka dengan begitu ia baru bisa memilikinya sebagai hak milik pribadi dan karenanya berhak pula untuk mewariskan atau menjual tanah itu kepada pihak lain atau siapa saja yang dikehendakinya.

Dengan begitu sesungguhnya ada dua jenis hak milik tanah keluarga Minangkabau. Pertama "harato pusako tinggi", yaitu harta pusaka yang dimiliki berdasarkan garis keturunan sebagai keseluruhan. Kedua, "harato pancaharian", yaitu yang dimiliki sendiri berdasarkan usaha pribadi, sehingga bebas memperlakukannya sebagai milik pribadi. Selain itu masih ada lagi apa yang disebut "hak ulayat", yaitu lahan yang dikuasai oleh desa atau nagari secara bersama. Ulayat nagari ini biasa-

nya terdiri dari tanah-tanah hutan yang terletak di sekeliling nagari dan pada umumnya belum pernah digarap. Karena tanah ulayat merupakan tanah komunal, maka ia hanya bisa digarap atau dimanfaatkan untuk kepentingan bersama di atas hubungan kekerabatan. Beberapa jenis hak lainnya, seperti hak memangku gelar penghulu, harta warisan semua itu bertumpu pada sistem matrilineal tadi.

Pihak Belanda sudah lama mensinyalir bahwa masalah pemilikan tanah merupakan persoalan yang amat rumit dan menimbulkan banyak konflik dalam masyarakat Minangkabau. Selain itu juga masalah hubungan adat dan Islam. Bagaimana sistem kepemilikan yang bersifat matrilineal itu dapat bekerja sama dengan kerangka hukum Islam yang patrilineal, ternyata telah banyak menimbulkan spekulasi yang kontradiktif.[7] Beberapa penulis asing menganggap bahwa ajaran Islam yang terikat dengan peradaban Arab yang patrilineal tidak sesuai dengan tradisi adat Minangkabau, yang matrilineal.

Paradoks antara kedua sistem ini menimbulkan teka-teki yang membingungkan karena di satu pihak masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang taat dalam kehidupan beragama, tetapi di lain pihak sistem adat yang mereka anut seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum warisan Islam. Orang Minangkabau yang dikenal cukup menonjol keislamannya justru memberi tempat pada lembaga-lembaga sosial yang bercorak non-Islam, suatu keluwesan yang memberi keunikan dalam tradisi masyarakatnya.[8]

Perpaduan antara adat dan Islam ini tercermin dari rumusan pepatah "adat" yang berbunyi: "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah"; "Syarak mangato, Adat memakai." Dalil ini juga tercermin dalam struktur masyarakat Minangkabau yang digambarkan sebagai "tungku tigo sajarang" atau "tali tigo sapilin" sebagai lambang keharmonis-

an antara adat Alam Minangkabau dan Islam. Unsur Islam juga tercermin dari lembaga kerajaan yang memasukkan kekuasaan Raja Ibadat, di samping Raja Alam dan Raja. Di tingkat nagari orang juga dapat menemukan struktur sejenis: manti (pemerintahan), malim (pemimpin agama) dan dubalang (keamanan).[9]

Memang benar, perang saudara —seperti yang terjadi dalam kasus Perang Paderi pada awal abad ke-19—, yang lama dan membawa malapetaka itu, pada dasarnya berkaitan erat dengan sebab-sebab keagamaan.[10] Namun masih terbuka perdebatan bahwa ia juga merupakan konflik sosial yang bersifat struktural seperti yang ditunjukkan oleh Schrieke. Menurut sarjana Belanda ini, secara sosiologis Perang Paderi haruslah dilihat sebagai revolusi intelektual dari golongan kaum "ulama" yang tidak mendapat tempat dalam adat.[11] Memang golongan agama secara struktural diakui dan mendapat tempat dalam lembaga-lembaga sosialnya, namun pada kenyataannya kurang fungsional akibat dari dominasi kaum adat.

2. Penetrasi Ekonomi Uang

Suatu gelombang perubahan besar berikutnya terjadi sejak permulaan abad ke-20. Perubahan-perubahan itu didorong oleh penetrasi sistem ekonomi uang, yang terjadi bersamaan dengan proses modernisasi yang dialami Minangkabau. Secara historis dan sosiologis kedua gejala itu —yakni perubahan ekonomi dan proses modernisasi yang muncul bersamaan dan berdampingan itu—, hanyalah faktor kebetulan. Modernisasi di Minangkabau, sebagaimana yang akan dikemukakan di bawah nanti, adalah suatu gejala yang sudah berakar sejak abad ke-19. Sedang perubahan-perubahan

ekonomi pasar yang makin meluas merupakan gejala sejak awal abad ke-20. Keduanya secara bersamaan menimbulkan pengaruh timbal-balik terhadap perubahan masyarakat. Uraian berikut akan mencoba menelaah lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh kedua faktor itu terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam tahun 1847, yakni kurang lebih sepuluh tahun sesudah penaklukan Belanda terhadap Minangkabau (1837), tanaman paksa kopi diperkenalkan di daerah ini.[12] Dalam rangka meningkatkan kinerja tanam paksa kopi, pemerintah kolonial kemudian mencoba mengambil langkah-langkah, antara lain dengan menutup jalur perdagangan tradisional ke pantai timur dan bersamaan dengan itu mengeluarkan larangan ekspor beras.[13]

Pada mulanya, banyak pedagang-pedagang Minangkabau yang melakukan transaksi perdagangan kopi melalui jalur pantai timur karena dianggap menguntungkan, ke timbang ke pantai barat yang dikuasai oleh penguasa kolonial. Bagi pemerintah kolonial hal ini jelas merugikan. Karena alasan itu, mereka menutup jalan ke pantai timur. Maksudnya tak lain untuk menguasai monopoli perdagangan kopi rakyat dengan mengarahkannya agar komoditi rakyat disalurkan lewat pantai barat. Muara-muara sungai dan selat-selat yang berdekatan di wilayah pantai timur diblokir.

Sebagai konsekuensinya, Aceh yang menganggap dirinya sebagai "Jang Dipertuan" atas daerah Pesisir Timur hingga Siak, merasa kepentingan ekonominya terancam. Dan tingkat tertentu tindakan Belanda ini merupakan *casus belli* dari Perang Aceh di penghujung abad ke-19.[14]

Selanjutnya tentang kebijakan pelarangan ekspor beras. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mengeluarkan larangan ekspor untuk menekan harga. Bilamana harga beras

dapat ditekan rendah, maka rakyat di daerah tanaman kopi utama, dengan sendirinya akan merasa betah dan tenteram untuk bekerja di kebun-kebun mereka.[15] Namun akibat yang tidak diduga oleh pemerintah ialah, banyaknya rakyat di daerah tanaman padi yang menelantarkan sawah mereka karena beralih dari bercocok tanam padi di sawah ke tanaman kopi. Sebaliknya di daerah tanaman kopi kehidupan penduduk menjadi semakin sulit. Terutama di daerah Talu dan Lubuk Sikaping, di mana banyak penduduk yang terpaksa meninggalkan daerah mereka.

Sampai sebelum tahun 1910 kebijaksanaan pemerintah kolonial benar-benar mengekang setiap perkembangan ekonomi penduduk. Terutama akibat sistem tanaman paksa kopi yang semakin diperketat dengan menutup jalur perdagangan ke pantai timur. Juga berkaitan larangan ekspor beras terhadap penduduk.

Perubahan terjadi di saat dihilangkannya hambatan-hambatan di atas. Sejak dihapuskan tanaman paksa kopi secara perlahan-lahan dalam tahun 1908, dan kemudian diikuti dengan pencabutan larangan ekspor pada tahun 1912, maka titik balik yang luar biasa telah terjadi dalam perkembangan perekonomian rakyat. Kegiatan-kegiatan dalam bidang ini telah dilukiskan dengan sangat jelas oleh Schrieke dalam uraiannya mengenai "revolusi pertanian."[16] Digambarkan betapa cepat dan meluasnya pertanian komersial yang diusahakan sendiri oleh penduduk setempat. Di Kerinci misalnya, ekspor kopi naik dari hanya 190 ton menjadi 300 ton dalam tahun 1926. Di Indrapura dengan selesainya pembangunan jalan Padang-Kerinci, daerah-daerah sekitar itu berkembang dengan pesatnya. Di mana-mana kata Schrieke, penduduk terlihat membabat dan membersihkan hutan-hutan untuk membuka lahan untuk kebun kopi dan karet. Pe-

mukiman-pemukiman baru bermunculan.

Demikian juga di daerah Tapan di utara. Perluasan area tanaman kopi rakyat sedang giat-giatnya dilakukan secara luar biasa. Di kawasan pesisir selatan seperti di Painan dan Balai Selasa, perahu-perahu yang dahulunya banyak berlayar menuju Padang, kini menjadi berkurang karena semakin lancarnya lalu lintas angkutan darat.[17] Begitu juga di daerah pedalaman seperti di Muara Labuh misalnya, rakyat sangat sibuk dengan kebun kopi mereka sehingga hampir tak ada waktu lagi yang terluang bagi menggarap sawah-sawah mereka.

Suatu pemandangan lain yang paling hidup barangkali bisa diamati di daerah Pariaman. Schrieke mencatat,

> '' .... Di sini, lembaga simpan-pinjam desa telah lama berjalan dengan sangat pesatnya; di sana tampak keinginan yang keras dan spontan untuk membangun bank-bank kecil di tiap nagari di daerah itu. Daerah dengan 200.000 jiwa itu ternyata telah sarat dengan "transaksi" dagang. Daerah itu khususnya terkenal dengan hasil kelapanya. Rakyat mulai memproses sendiri kelapa mereka menjadi kopra dalam jumlah besar dan kemudian juga memasarkannya sendiri....."[18]

Hal yang sama juga terjadi di daerah Pasaman, terutama di Bonjol, Talu dan Lubuk Sikaping. Rakyat kini berlomba-lomba memperluas ladang-ladang kopi dan karet. Setiap orang yang berkesanggupan bekerja datang ke ladang kopi sebagai kuli, biasanya dengan gampang memperoleh penghasilan yang cukup besar untuk jerih payah mereka yang tidak seberapa. Di Mapat Tunggul dan Lubuk Sikaping yang dahulunya merupakan daerah minus, kini keajaiban muncul segera tiba-tiba. Schrieke sekali lagi mencatat,

> ''.... Lagi-lagi penanaman kopi dan karet telah membawa perubahan dahsyat dalam kemakmuran penduduk. Pembangunan terus berlanjut pada waktu ini dalam tahap yang bahkan justeru

> lebih hebat dari pada di Bonjol dan Lubuk Sikaping sendiri. Rumah-rumah gaya Medan dan Singapura bermunculan bagai jamur di musim hujan. Banyak penduduk yang menabungkan uang mereka karena tidak diperlukan lagi bagi pengembangan kebun-kebun mereka. Dalam beberapa tahun saja Mapat Tunggul tiba-tiba telah menjadi daerah terkaya di wilayah itu. Di sini rakyat dahulunya banyak penduduk yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk pergi mencari nafkah dengan membantu penduduk setempat, misalnya di Rao, dengan bercocok tanam atau mengolah padi di sawah. Namun dengan perkembangan yang baru amat mencengangkan itu, justeru sebaliknyalah yang terjadi.... Kini justru penduduk Rao yang terpaksa harus datang ke Mapat Tunggul untuk membantu bekerja dalam menyadap karet..."[19]

Demikianlah kebangkitan "revolusi pertanian" seperti tidak pernah terbayangkan pada masa-masa sebelumnya. Tentu bukan tanpa preseden sama sekali. Dalam hubungan ini maka penting untuk dicatat bahwa dengan terbukanya Terusan Suez paling tidak ada dua hal yang terjadi dan berpengaruh terhadap perekonomian Minangkabau. *Pertama*, semakin terbukanya komunikasi dengan dunia luar. Hal mana kemudian berpengaruh bagi munculnya modernisasi di Minangkabau, terutama dengan banyaknya orang-orang Minangkabau yang pergi naik haji ke Tanah Suci Mekah.[20] *Kedua*, yang paling umum tentunya adalah permintaan yang semakin meningkat atas bahan-bahan komoditi Indonesia bagi pasaran dunia yang di Minangkabau mulai terasa pengaruhnya sejak pergantian abad ini.[21]

Perkembangan-perkembangan sebagaimana terlukiskan di atas menunjukan kenyataan bahwa ekonomi penduduk benar-benar telah memasuki suatu suasana yang baru, yaitu dengan terjadinya perubahan dasar-dasar pertanian: dari pertanian untuk kebutuhan secukupnya (subsistensi) menjadi

pertanian komersial, yang pada gilirannya menyebabkan beberapa faktor tertentu.

Pertama-tama dapat dilihat bagaimana perkembangan ekonomi penduduk ini telah menciptakan suatu sikap baru dalam perilaku ekonomi mereka. Di sini harus berhadapan dengan revolusi dalam semangat. Dalam kata-kata Sombart, "mentalitas ekonomi kini telah mencari jalannya ke permukaan."[22] Beberapa perubahan dan diskontinuitas kelembagaan yang khas yang merupakan bagian dari suatu proses penetrasi sistem uang, adalah terjadinya perubahan dalam hubungan-hubungan kerja dan perubahan pengertian jaminan hidup ekonomi, sehingga memungkinkan mulai rusaknya hubungan-hubungan kekeluargaan dan komunitas tradisional, dan beberapa efek lainnya.

Dapat kiranya dilihat lebih dekat bentuk perubahan dalam hubungan kerja atau mengenai pengertian jaminan hidup ekonomi. Perkembangan ekonomi terutama berarti pemisahan kegiatan-kegiatan ekonomi dari lingkungan keluarga tradisional. Begitulah dengan terjadinya perluasan ladang-ladang kopi dan karet rakyat misalnya, orang membutuhkan tenaga buruh yang datang dari lain tempat. Terdapatnya perkembangan dalam upah lepas dengan sendirinya mulai menampakan adanya perbedaan antara kerja sama "sosial" (gotong-royong) dan nilai "ekonomi" serta fungsi buruh dalam sistem ekonomi baru yang sedang muncul itu.

Bilamana penduduk pada mulanya hanya menghasilkan untuk kebutuhan secukupnya, kini mereka telah berusaha dalam pertanian untuk perdagangan, di mana masing-masing keluarga tidak lagi menghasilkan untuk diri mereka sendiri (*self sufficincy*), tetapi untuk keluarga-keluarga lain dalam arti untuk dipasarkan. Tentu saja untuk tujuan itu mereka perlu meningkatkan dan memperluas usaha mereka melalui sarana-

sarana ekonomi lainnya, seperti pembuatan jalan-jalan dan organisasi sosial ekonomis dan sebagainya. Kecenderungan ini tampak jelas dalam perilaku ekonomis penduduk ketika itu. Apabila pada masa sebelumnya mereka nampak merasa enggan dan menghindari gotong-royong untuk pembuatan jalan-jalan misalnya, karena mereka melihat hal itu tidak lebih dari pada politik eksploitasi kolonial, maka sekarang justeru sebaliknyalah yang terjadi. Mereka kini malah mulai menawarkan jasa-jasa mereka dengan suka rela, baik berupa uang ataupun tenaga kerja.[23] Schrieke bahkan juga menunjukkan bahwa mereka sampai-sampai meminta kepada pemerintah agar catatan telegrafis dari harga-harga pasaran di Batavia dan Singapura dapat dimasukkan ke dalam majalah "Tani", sebuah majalah yang diterbitkan di bidang usaha tani rakyat.[24] Sehingga mereka bisa mengikuti "fluktuasi" harga tanaman di pasaran. Datuk Radjo Nando, ketua dari Koperasi "Sarikat Keboen" Pandai Sikat di Pandai Sikek, Padang Panjang telah lama berusaha dalam bidang ekspor karet dan kopi rakyat ke Malaka.[25] Koperasi-koperasi sejenis juga berdiri di tempat-tempat lain seperti, di Luboek Minturun dan di daerah Pasaman.

Pada saat yang sama implikasi sosial dari perubahan ekonomis yang dilukiskan secara sederhana di atas sangatlah besar. Implikasi yang paling fundamental, —yang terutama dipaksakan oleh tuntutan-tuntutan mobilitas keluarga—, adalah terjadinya proses individuasi dan isolasi keluarga batih. Dalam hubungan ini adalah menarik untuk dicatat, bahwa perluasan tanaman pertanian rakyat di berbagai daerah seperti di Kerinci, Pesisir Selatan, Agam dan Lima Puluh Kota[26] serta Pasaman telah menunjukan efek lain yang tak pernah terbayangkan selama ini. Kecuali di lingkungan perkotaan, hampir setiap sekolah memperlihatkan angka absen murid

yang semakin tinggi, karena mereka dibutuhkan oleh orang tua mereka untuk membantu pekerjaan di ladang-ladang kopi dan karet mereka.[27] Lagi pula tempat kediaman mereka yang semakin jauh dari sekolah juga menimbulkan rasa malas dan enggan anak-anak untuk bersekolah. Tetapi di balik semua itu, sebenarnya sedang terjadi perubahan pandangan hidup. Anggapan yang berkembang pada waktu itu, bahwa menjadi seseorang petani jauh lebih menguntungkan ketimbang menjadi (calon) pegawai negeri yang sering menderita miskin, selain harus bertekun di luar tempat kelahiran mereka. Ini membalikkan tipe ideal masyarakat yang sebelumnya; mengejar sekolah untuk mencapai cita-cita menjadi pegawai.[28] Kini "uang sekolah" dianggap tidak lebih dari pada pengurangan modal mereka belaka. Tanpa bersekolah pun mereka merasa cukup mampu memperoleh uang banyak melalui hasil ladang kopi dan karet yang justeru malah jauh lebih menguntungkan dari pada membuang-buang waktu untuk bersekolah.[29]

Gejala-gejala yang dilukiskan di atas merupakan salah satu bentuk dari perubahan pengertian jaminan ekonomi yang mulai berubah, sehingga membawa beberapa akibat sampingan terhadap kehidupan sosial. Hal yang serupa juga terjadinya perubahan sikap terhadap lahan dan kepemilikan lahan. Terdapat petunjuk yang kuat, bahwa sistem pemilikan tanah pada akhirnya telah digerogoti dari dalam.[30] Keinginan untuk memperoleh hasil pertanian perdagangan dari setiap orang jelas memerlukan lahan yang lebih luas dari pada sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka tidak bisa disangkal bahwa perluasan ladang-ladang mereka itu, mau tidak mau terambilkan dari "harato pusako", meskipun itu tidak berlaku secara keseluruhan.

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa lahan yang

dimiliki suatu keluarga pada dasarnya berasal dari tanah "harato pusako" yang telah dibagi-bagikan menurut porsi yang telah ditentukan oleh adat atau penghulu mereka. Namun timbul gejala baru di atas perbedaan antara "harato pusako" dan "harato pencaharian" (yaitu harta bersama dan harta pencaharian pribadi) yang telah diperluas sedemikian rupa, sehingga terjadi proses pengecilan terhadap kepemilikan harta pusaka. Sebaliknya, terjadi perbesaran akan milik pribadi dengan menarik atau membagi-bagi harta bersama kepada anggota kaum atau keluarga.

Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa pola pemilikan tanah telah mulai bergeser pula. Dahulu jumlah pemilikan tanah secara pribadi hanya sedikit sekali sekedar cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sekarang yang terjadi justru sebaliknya, sebagai akibat nafsu perluasan tanaman perdagangan dari setiap penduduk. Persoalan semakin rumit ketika hak milik lahan tradisional harus berhadapan dengan sistem kredit dan bank-bank yang mulai masuk ke dalam masyarakat pedesaan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, akibat yang lebih parah lagi, ialah terjadinya penetrasi sistem kolonial Belanda. Berkenalan dengan sistem kredit dan bank-bank di hampir tiap nagari dalam bentuk "lumbung pitih" atau "lumbung nagari", maka banyak penduduk yang terperosok kepada hutang-hutang yang sampai pada tingkat mereka tidak mampu membayar.

Lembaga baru itu di satu pihak telah memberi kesempatan kepada penduduk untuk meminjam uang, tetapi di lain pihak kesempatan itu ternyata telah menimbulkan kebiasaan buruk untuk meminjam, yang tidak jarang memperbesar tumpukan hutang-hutang mereka. Sementara kebutuhan-kebutuhan atau kewajiban-kewajiban lain yang juga harus dipenuhi dengan uang telah menghadapkan penduduk

kepada pilihan yang saling bertentangan. Satu-satunya jalan agak aman, meskipun dengan pelanggaran ketentuan adat yang tidak lagi begitu asing ketika itu, ialah dengan cara menggadaikan tanah. Dan gadai sering menjurus kepada penjualan karena hutang-hutang yang harus dibayar semakin membengkak juga.

Dalam periode 1921-1924, para pedagang keliling juga merasakan akibat karena berkurangnya daya beli, terutama dari petani-petani, pedagang-pedagang eceran, para penunggu toko dan para pegawai, sehingga terjadinya kemerosotan dalam kemampuan untuk membayar hutang-hutang kepada pedagang-pedagang grosir dan bank-bank.[31] Lagi pula kredit yang telah diberikan mungkin dilakukan dengan cara serampangan terhadap kelompok orang-orang ini. Terutama di daerah pedalaman, pedagang-pedagang grosir telah banyak menderita kerugian, sehingga sejak saat itu mereka mulai lebih berhati-hati di saat memberikan kredit dalam jumlah besar.

Dalam banyak hal para penyalur (*dealer*) pribumi terpaksa menggadaikan milik mereka kepada pedagang-pedagang grosir karena "Bank Rakyat"[32] tidak lagi mau membantu mereka. Sementara itu anggota keluarga mereka cenderung tidak suka untuk menggadaikan lahan harta pusaka milik keluarga. Di sini keadaan mulai bertambah ruwet dan para petani juga merasakan kemerosotan itu.

Di daerah tanaman kelapa di Pariaman kejatuhan harga kopra setelah tahun 20-an sangat demikian menyolok, sehingga produksi kopra rakyat hampir tidak dapat dipasarkan.[33] Sedangkan Bank Rakyat terpaksa menolak memberikan kredit kepada industri-industri kecil serupa. Pada saat yang sama pedagang-pedagang grosir yang memiliki modal banyak menerima secara luas hasil-hasil pertanian perdagangan rakyat dengan membelinya dalam harga yang sangat murah. Lebih

buruk lagi keadaannya, ketika orang-orang terpaksa menggadaikan lahan-lahan keluarga mereka sebagai jaminan terhadap hutang-hutang mereka. Namun karena menggadai sering menjurus kepada penjualan, maka jika tak ada pembelinya maka harga tanah itu segera merosot drastis. Saat itu, datanglah "kapitalis" yang memiliki modal mengeruk keuntungan dalam kesempitan.

Tak syak lagi, keadaan semacam ini sangatlah mengena dan membangkitkan bagi propaganda komunis seperti yang akan dapat dilihat nanti. Lebih-lebih lagi karena "kaum kapitalis" ini selalu mendapat sokongan dari atas (pemerintah), terutama untuk menanamkan modal mereka di nagari-nagari. Maka seperti telah dapat dilihat, banyak rakyat jatuh miskin.

Di beberapa daerah sekitar Padang, misalnya, tetapi juga di pedalaman seperti di Alahan Panjang, banyak "kincir padi" (yaitu alat penggiling gabah tradisional yang diputar dengan tenaga air) dan pemilik-pemilik tanah luas mengalami kehancuran akibat penetrasi lebih lanjut dari sistem ekonomi uang itu. Anggota masyarakat "kampung" telah dijangkiti oleh nafsu konsumeristik. Sejak terbiasa dengan kemudahan mendapat uang, mereka terperangkap nafsu membeli barang-barang "mewah" seperti perabot atau perlengkapan rumah tangga; mesin jahit, lampu stromking, tempat tidur, sepeda, motor dan sebagainya,[34] sekalipun dengan cara mencicil. Ini semua menunjukkan betapa hebatnya serangan dari penetrasi lebih lanjut dari ekonomi uang.

3. Kebijakan Pemerintah Kolonial

Perubahan belum lengkap. Suatu percabangan lain dari perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa ini, bahwa penetrasi sistem kolonial Belanda yang semakin intensif telah

menyebabkan terancamnya struktur sosial tradisional. Setelah Minangkabau ditaklukkan oleh Belanda (1837), wilayah itu kemudian berada di bawah seorang residen yang mengepalai wilayah administrasi "Residentie van het Sumatra's Weskust" atau "Weskust van Sumatra". Sejak itu posisi para penghulu yang dahulunya berkuasa penuh atas nagari dengan sendirinya mulai merosot karena mereka kini telah dijadikan sebagai bawahan dari administrasi kolonial. Selanjutnya sejalan dengan berlakunya *Ordonantie Nagarie* (Stabl. 1914, No. 774) para penghulu kepala secara tegas dimasukkan ke dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial dengan jabatan sebagai "gemeenhoofden".[35] Ini berarti bahwa wibawa kepala-kepala masyarakat kini ditegakkan atas dasar peraturan hukum pemerintah yang baru, riil dan bukan atas dasar pengaturan tradisional yang lama. Namun pada saat yang sama kedudukan penghulu yang lama masih tetap dipertahankan.

Sebagai akibatnya, timbullah suatu sistem yang diterapkan secara setengah-setengah. Di satu pihak ada usaha untuk mempertahankan sistem pemerintahan tradisionil gaya lama (adat). Tetapi di lain pihak, dengan diberlakukannya sistem pemerintahan yang riil berdasarkan hukum dan peraturan pemerintah yang baru, para "penghulu kepala" dihadapkan kepada alternatif yang saling bertentangan. Simbol-simbol tradisional tetap dipertahankan dan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan tafsiran baru sesuai dengan kepentingan pemerintah. Wibawa para penghulu yang lama di tengah masyarakat menjadi semakin merosot. Alasannya sangat jelas. Sang penghulu kini bukan lagi menjadi juru bicara pengikutnya dalam kekerabatan, tetapi menjadi alat birokrasi kolonial.

Sebagian besar ketidakpuasan berasal dari situ. Sebab, setiap usaha pemerintah untuk mendesak kembali ke tata masyarakat yang lama sebenarnya hanyalah tiruan belaka. Lagi

pula, sikap tradisional yang masih berjalan pelan (evolusi) dalam masyarakat kini dirombak atau digusur oleh tatanan baru ketatanegaraan pemerintah. Dengan begitu tidaklah mengherankan bilamana terdapat sikap ketidakpuasan dari para penghulu dan anggota masyarakat secara keseluruhan karena "hukum adat" mereka telah menjadi rusak, meskipun itu tidak sepenuhnya bersumber pada perlakuan kolonial.

Namun akibatnya bersifat langsung karena serangannya yang frontal dan berterusterang. Demikianlah misalnya *hak ulayat* yang tadinya diakui secara adat kini telah diserang oleh undang-undang agraria dan peraturan mengenai kehutanan. Pada saat yang sama para penghulu dikeluarkan dari kedudukannya yang lama dan pemerintah kolonial telah memperlakukan mereka tidak lebih sebagai alat rezim penguasa belaka, yang tidak jarang memojokkan mereka kepada keadaan yang tidak menyenangkan.[36]

Hal yang justeru lebih kentara lagi dan berhubungan erat dengan tindakan di atas adalah politik eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonial. Kendatipun politik tanam paksa secara bertahap sudah dihapuskan oleh Gubernur Jenderal sejak tahun 1870, namun di Sumatera Barat sendiri tanam paksa kopi masih tetap berjalan sampai tahun 1915.[37] Meskipun kebijakan itu resmi telah dihapuskan sejak tahun 1908. Ironisnya, ketika tanam paksa kopi dihapuskan, "sistem pajak uang" datang menggantikannya pada tahun yang sama.[38] Kebijakan itu dalam ungkapan Minangkabau digambarkan dengan kata-kata "batuka cigak jo baruak".[39] Perubahan ini justru membuat keadaan lebih buruk terhadap kehidupan masyarakat.

Sementara berbagai macam kebutuhan hidup mau tak mau dipenuhi dengan uang. Kini dengan dikenakannya sistem pajak uang, orang terpaksa harus selalu siap dengan uang

kontan di kantong tanpa dapat mengelakkan diri untuk pembayaran berbagai macam pajak, dengan selang waktu yang tetap, termasuk "uang ganti kerja rodi".[40] Untuk melihat lebih jelas bagaimana rakyat harus dikenakan pajak bertubi-tubi, baiklah diberikan illustrasi tentang pemungutan pajak (*belasting*) ternak sembelihan berikut ini.[41]

Kendatipun pada kenyataannya setiap tahun penduduk sudah dikenakan wajib pajak dengan pelbagai macam jenisnya, kewajiban membayar pajak bagi ternak yang dimiliki penduduk tampaknya tidak cukup satu kali. Terlebih lagi apabila mereka hendak menjualnya ke pasar, juga apabila selanjutnya dijadikan sebagai ternak sembelihan, maka orang masih harus dikenakan beberapa kali macam pajak dan dengan prosedur yang demikian runyam dan berbelit-belit.

Pertama, sebelum berangkat ke pasar, si empunya terlebih dahulu sudah harus memperoleh "surat keterangan" (izin) dari Kepala Negeri dan Kepala Distrik setempat sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa dia sudah melunasi pajak ternaknya. Untuk itu ia harus mengeluarkan uang. Setelah itu, dia masih terkena wajib membayar pajak lagi sebelum masuk "pasar ternak", meskipun pembayaran itu tidak menjamin bahwa ternak itu mesti akan terjual. Dan jika dia berhasil menjual ternaknya, maka sebelum transaksi jual beli disahkan terlebih dahulu dengan mengisi formulir (surat keterangan) dari pejabat kota setempat yang berarti membayar lagi. Kemudian sebelum dibawa ke rumah potong ternak tersebut harus menjalani pemeriksaan oleh inspektur bagian kesehatan dan itu juga perlu dibayar lagi. Selanjutnya bila ternak selesai diperiksa, ia masih harus mengeluarkan pajak potong ternak dan sejak itu barulah ternak itu bisa dibawa ke rumah potong (karena peraturan pemerintah melarang pemotongan ternak di sembarang tempat). Tetapi sebelum

bisa masuk ke dalam rumah potong itu, orang masih harus membayar lagi. Akhirnya masih ada sekali lagi pembayaran pajak, yaitu menjelang daging ternak sembelihan itu dipasarkan.

Berapa kalikah seseorang harus membayar pajak buat "seekor" ternak mereka selama hidupnya, sebelum dan sesudah disembelih? Bagaimanakah pula akibat samping lainnya yang mungkin timbul dari perlakuan pajak yang demikian banyak dan rumit itu? Tidak begitu sukar menerangkan alasan, mengapa harga daging menjadi sangat mahal. Segala sesuatu semakin sulit dan semuanya sangat membebani rakyat banyak.[42] Bahkan orang kecil yang sekali-kali pergi ke pasar untuk menjual hasil tanaman mereka yang nilainya hanya sedikit saja tak lepas dari jeratan pajak. Menjelang masuk pasar mereka terlebih dulu harus bayar pajak masuk pasar. Sementara tujuan mereka ke pasar tidak lebih dari sekedar memperoleh sedikit uang yang tidak mereka punyai untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari.[43]

Beban pajak semakin menghimpit, ditambah dengan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan hukum oleh aparat pemerintah dalam soal pajak, menimbulkan rasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan rakyat terhadap tertib pemerintah.[44] Ada petunjuk yang kuat bahwa kesewenang-wenangan pejabat telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penyalahgunaan wewenang dari para pejabat pemerintah dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang kuat. Misalnya di setiap "onderafdeeling" (setingkat kecamatan), ada sejumlah pejabat, seperti demang, asisten demang, jaksa dan "adjunct jaksa"; kebanyakan melakukan korupsi.[45] Bahkan lebih parah lagi ketika ternyata ada beberapa pejabat yang diketahui bersekongkol secara diam-diam dengan kelompok perampok.

Kenyataan-kenyataan serupa itu seakan-akan di luar

kontrol pemerintah karena tak ada upaya serius untuk mengatasinya. Terlebih karena banyak pejabat yang terlibat dalam perbuatan serupa, atau paling tidak diuntungkan karena sempat menikmati hasilnya sepanjang tahun. Di tempat-tempat lain juga terjadi penyalahgunaan yang serupa. Tak syak lagi, beberapa orang pejabat dari rejim penguasa sedikit banyak membawa cap pribadi.[46] Lebih-lebih lagi munculnya anggapan bahwa sejumlah tindakan-tindakan teror yang menakut-nakuti rakyat banyak adalah cara lain mempertahankan wibawa pejabat di mata rakyat.

Sesungguhnya gejala ini menjadi mode dan ciri yang amat menonjol di kalangan para pejabat pada umumnya dewasa itu. Tindakan pemanggilan secara paksa atau perintah "datang ke kantor" oleh pejabat pribumi, terutama "Kepala-kepala negeri" adalah tindakan yang paling disenangi. Tetapi paling ditakuti oleh rakyat karena panggilan ke kantor berarti akan "dipasang", yaitu kata ganti untuk menyebutkan perlakuan kekerasan oleh pihak keamanan pemerintah. Hampir tak ada seorang pun dari rakyat yang berani berterusterang mengeluarkan pendapat mereka atau mengkritik pejabat. Dalam keadaan yang semakin tak menentu itu, seperti yang akan dilihat nanti, telah dimanfaatkan oleh propagandis gerakan pemberontak dengan sangat efektif, sehingga menjadi matang dan membangunkan kesadaran banyak orang.

4. Modernisasi Minangkabau

Akhirnya aspek ketiga dan berhubungan erat dengan kedua faktor di atas (penetrasi sistem ekonomi dan kebijakan kolonial), adalah proses modernisasi yang berlangsung sejak akhir abad ke-19.[47] Secara historis dan kultural, fenomena di atas berasal dari dua habitat yang berbeda: dari Timur Tengah dan dari Barat. Atau lebih tepat tumbuh dari pengaruh sistem

pendidikan kolonial itu sendiri. Keduanya berpapasan di kawasan budaya Minangkabau yang tengah memasuki cakrawala pemikiran baru bernama nasionalisme Indonesia.

Sejak pertengahan abad ke-19, hubungan Minangkabau dengan pusat-pusat dunia Islam semakin bertambah lancar, terutama sejak dibukanya Terusan Suez di akhir tahun 1860-an, hingga proses modernisasi pun bertambah deras pula. Mulanya hanya untuk niat menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana beberapa lama untuk mendalami Islam. Sejumlah orang muda Minangkabau yang berlajar di Timur Tengah kemudian tumbuh sebagai kaum intelektual yang kritis mempersoalkan isu-isu fiqh dan adat di kampung halaman mereka. Salah seorang paling terkemuka diantaranya ialah Syekh Ahmad Khatib bermukim di Mekah sejak 1876 (meninggal 1916) dan mencapai kedudukan terhormat sebagai Imam *Masjidil Haram* di Mekah. Mendapat pengaruh ide-ide pembaharuan dari Mohammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani, ia juga menjadi guru panutan bagi orang-orang "Jawi" atau mahasiswa Melayu yang belajar di Mekah.[48]

Begitulah, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran pembaharuan dari Pan Islamisme di Timur Tengah, kaum terpelajar Minangkabau yang kembali dari Timur Tengah sejak awal abad ke-20, mulai melancarkan ide-ide pembaharuan di Minangkabau. Mereka tak hanya menggugat kondisi-kondisi sosial dan keagamaan yang dianggap sudah melenceng dari kepatutan 'syara dan adat, —ketidakmurnian ajaran Islam dan kemencengan struktur masyarakat Minangkabau—, tetapi harus pula berhadapan dengan aturan-aturan kolonial yang semakin menjerat.

Keinginan untuk keluar dari situasi nyata yang dianggap tidak sesuai dengan gagasan-gagasan ideal (adat) menghadapkan orang Minangkabau kepada alternatif yang kadang-kadang

saling bertentangan. Bukankah segala yang dianggap ideal dan baik seperti kemajuan, keadilan dan kesamaan dan sebagainya sudah tercakup dalam ajaran dua tokoh pencipta agung Adat Alam Minangkabau, Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan? Tetapi kenapa keadaan sosial masih demikian terbelakang dan menyedihkan. Satu jawabannya karena tuntutan adat tak dipenuhi dan adat yang terpakai tidak murni lagi. Maka demi kemajuan, tuntutan adat yang ideal haruslah dijalankan demi menunjang adat dan "semarak Gunung Merapi", sebagai simbol kebesaran alam Minangkabau.[49]

Dengan demikian, gerakan itu ternyata tidak dapat berhenti pada dirinya sendiri. Gerakan itu harus pula berhadapan dengan kelompok ulama Kaum Tua di satu pihak, dan kaum adat yang telah 'dikebiri' oleh kekuatan kolonial di lain pihak. Mengukuhkan diri di bawah panji-panji ulama Kaum Muda, atau kaum pembaharu, gerakan itu dipimpin oleh sejumlah ulama muda jebolan Timur Tengah. Pusat gerakan itu berada di sebuah surau, yang dikenal dengan Surau "Jembatan Besi", Padang Panjang, kota pendidikan paling terkemuka di Sumatera Barat sejak awal abad ke-20.

Begitulah sejak dasa warsa pertama dan kedua abad ke-20, genderang pembaharuan ditabuh ketika wacana intelektual mengenai masalah-masalah sosial keagamaan mulai digelar. Berpuluh-puluh buku polemik, baik dalam bahasa Arab, maupun "Melayu" diterbitkan. Berbagai majalah dan surat kabar yang mewakili aliran-aliran tertentu bermunculan. Rangkaian perdebatan-perdebatan umum di kalangan para ulama, kaum terpelajar dan ahli-ahli adat diadakan pula. Lebih penting lagi ialah gerakan Kaum Muda di bidang pendidikan. Paling penting dalam hal ini ialah didirikannya madrasah "Sumatra Thawalib" pada tahun 1918 di Surau Jembatan Besi, markas

Kaum Muda. Sekolah itu dalam waktu singkat sangat populer di kalangan anak-anak muda Minangkabau. Bukan saja karena citra gurunya sebagai kaum 'modernis' yang sebagian adalah jebolan Timur Tengah, tetapi juga daya tarik pendidikannya yang unik karena mampu mengadopsi sistem dan materi pendidikan Barat (Belanda) menjadi khas sekolah madrasah termodern pada masanya. Dalam beberapa tahun saja, madrasah serupa segera menyebar ke seluruh Sumatera Barat, sehingga murid-muridnya mencapai 17.000 orang.[50] Beberapa tahun kemudian, masih dalam semangat gerakan Kaum Muda, madrasah khusus untuk anak-anak perempuan juga didirikan di kota yang sama, Padang Panjang oleh Encik Rahma El Yunusiyah, dan sekolah serupa juga segera pula menyebar ke hampir seluruh daerah.

Kecemasan penguasa kolonial akan 'bahaya' penyebaran luar biasa dari madrasah Kaum Muda terutama terkait erat dengan sentimen nasionalisme dan radikalisme Islam yang sewaktu-waktu dapat menjadi "boomerang" terhadap pemerintah. Ini pada gilirannya melahirkan ide peraturan pemerintah yang disebut *Goeroe Ordonantie* (Ordonansi Guru). Peraturan kolonial itu antara lain berisi kewajiban setiap guru-guru sekolah partikulir, termasuk guru-guru sekolah agama, memperoleh surat izin bertugas. Selain itu tiap guru diwajibkan untuk membuat laporan tentang tujuan memberikan pelajaran agama disertai dengan pertanyaan tentang bahan-bahan yang dipergunakan dalam mata pelajaran. Tak syak lagi, bahwa peraturan itu secara langsung atau tidak langsung merupakan upaya sistematik penguasa untuk melumpuhkan atau membatasi gerakan pembaharuan agama, sehingga membawa buntut terjadinya aksi protes besar-besaran dari para guru madrasah di bawah tokohnya Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1925.[51]

Kecurigaan dan rasa permusuhan terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang merugikan kelompok kritis ini, menjadi premium bagi munculnya radikalisme gerakan. Polarisasi dalam politik, sosial, keagamaan dan ekonomi pada periode ini ikut berkontribusi terhadap makin menajamnya konflik-konflik sosial dalam masyarakat.

Akhirnya, jika boleh memberikan catatan penutup bagian ini, satu hal yang pantas ditegaskan di sini bahwa sejak dekade pertama dan kedua abad ke-20, Sumatera Barat memasuki fase peralihan yang semakin deras dan rawan dengan benturan-benturan sosial-ekonomi, agama dan politik. Berbagai perubahan ekonomis dan sosial yang dilukiskan sebelumnya dengan jelas menunjukkan beberapa perubahan dan diskontinuitas kelembagaan, serta kecenderungan baru. Paling utama dalam hal ini ialah penetrasi ekonomi uang dan ekonomi pasar. Konsekuensi lebih lanjut dari gejala ini tidak hanya terbatas pada perubahan sikap mental terhadap lingkungan sosialnya, akan tetapi juga menciptakan berbagai fenomena yang pada akhirnya menimbulkan kegelisahan sosial. Suasana demikian dipertajam dengan tusukan sistem kolonial Belanda dan menjadi matang dengan terjadinya konflik lama dalam masyarakat Minangkabau, yang kemudian menyatakan diri dalam bentuk modernisasi.

Pengamatan Bouman tentang ini menunjukkan bahwa yang lama dan yang baru hidup berdampingan secara disharmonis. Ketika pembaharuan yang berasal pada konflik lama antara kaum agama dan kaum adat yang kemudian memicu konflik baru.

> ".....de *mythe politique* van de Westkust is, sedert honderd jaar al, de strijd tussen de adatpartij en de gonsdienstpartij, een strijd, die wel nieuwe aspecten kan vertoonen, ... was de *schablone* vroeger adatgodsdienst, zonder dat men de sociale

krachten analyseerde, die het conflict bewerkten, in later tijd is daarbij het "schalgwort" *Kaum Muda* gekomen als machtwoord, dat was bij zonder fel geweest en ontbrandle hier en daar opniew.... [52]

Akan tetapi pertentangan antara Kaum Muda dan Kaum Tua yang pada tingkat tertentu disokong kaum adat, bukanlah satu-satunya pertentangan. Kedua kelompok itu juga sama-sama dipojokkan oleh kekuatan kolonial sebagai kekuatan dominan. Posisi pengulu juga telah lama dikebiri sejak ia menjadi "onderdeel" dari birokrasi kolonial dengan berbagai peraturan pemerintah. Antara lain diikatnya status mereka dengan SK "penghulu bersurat' dan pengurangan sumber pemasukan dari "kas nagari". Namun ketidakpuasan di kalangan kaum modernis, jauh lebih tajam ketimbang penghulu terhadap pemerintah. Keadaan ini justru muncul di saat semangat pergerakan nasional yang sedang mengalami pasang naik. Dalam suasana demikian, gerakan komunis, tampaknya, paling cekatan dalam merumuskan situasi dan lalu secara tidak sabaran mencoba memainkan peranan sentral dalam memberi daya dorongan baru untuk keluar dari situasi yang tak dikehendaki, sebagaimana yang akan dapat dilihat dalam bagian berikut.

***

Catatan Akhir

[1] Konsep "eternal triangel" dalam antropologi, tidak dikenal dalam masyarakat Minangkabau mengingat sistem kekerabatan yang unik karena "adat" Alam Minangkabau hanya mengakui kesatuan keluarga yang terdiri dari ibu dan anak, tanpa memasukkan bapak di dalamnya. Sementara yang dianggap sebagai kepala keluarga adalah saudara laki-laki dari pihak ibu (disebut "mamak"). Lihak M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Alam Minangkabau* (Jakarta: CV, Penerbit Pasaman, 1957), p. 179.

[2] Kekeliruan dalam memahami konsep ini bukannya tidak membawa pengaruh terhadap pengertian Minangkabau dan Sumatera Barat; suku di Minangkabau sebagaimana dimengerti, merupakan unit utama dari struktur sosialnya. Karenanya seseorang yang tidak mempunyai "suku" dengan sendirinya tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau. Sebutan Suku Minangkabau sesungguhnya menunjuk pada pengertian "wilayah kebudayaan" (cultural area), yang oleh Nelson didefinisikan sebagai suatu wilayah yang pola-pola dan elemen kebudayaan tertentu yang dimilikinya sedemikian menonjolkannya sehingga membedakannya dari wilayah lain. Lihat Lowry Nelson, *Rural Sosiology* (1948), p. 8; Lihat juga T. Ibrahi, Alfian, "Tjatatan Singkat Tentang Konsep Sedjarah Lokal", *Lembaran Sedjarah* No. 6 (1970), p. 43. Sedangkan istilah Sumatera Barat sebetulnya menunjuk pada wilayah administratif warisan politik kolonial Belanda (yaitu Residentie van Sumatra's Westkust). Maka berdasarkan pengertian ini wilayah Minangkabau sebenarnya jauh melampaui batas-batas Sumatera Barat dewasa ini. Di dalam kajian ini kedua istilah itu akan dijumpai secara berganti-ganti sesuai dengan konteksnya.

[3] Suatu "nagari" memiliki ciri-ciri yang ditandai dengan adanya: mesjid, balai (pasar), labuah (jalan raya kampung), gelanggang (tempat bermain), dan "tepian" tempat mandi. Lihat Taufik Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra, 1927-1933* (Cornell University Press, 1971), p. 3.; P.E. De Josselin De Jong, *Minangkabau and Nagari Sembilan Socio Political Structure in Indonesia* (Djakarta: Bharata, 1959).

[4] Posisi kekuasaan federal dilukiskan oleh Taufik Abdullah sebagai suatu "lembaga sakral" yang berfungsi untuk memelihara "ekuilibrium" di antara nagari-nagari yang bermusuhan. Hal mana sejak disintegrasi kekuasaan raja yang Di Pertuan Pagaruyung sepeninggal Adityawarman (1340-75), lambat laun semakin hilang kekuasaan raja atas wilayah Minangkabau, hingga keluarga

kerajaan dimusnahkan oleh Gerakan Padeti pada Tahun 1809.

[5] Cara pembagian kedua pola demikian sesungguhnya menggambarkan dua pola sistem sosial yang berlaku di Minangkabau sebagaimana ternukil dalam sumber tradisional — Tambo dan Kaba. Di dalam sumber disebutkan bahwa keduanya berasal dari dua tokoh agung pencipta Adat Alam Minangkabau yaitu: Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketemanggungan. Lihat De Jong *Minangkabau*, pp.70-74; Taufik Abdullah, *School and Politics...*, p. 6; Bahar Dt. Nagari Basa, *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau* (Pajakumbuh: CV. Eleonora,1966). Perbedaan itu juga tercermin pada susunan tempat duduk di dalam balai adat (balairung). Pada Balai Adat Koto-Piliang mempunyai anjung yang ditinggikan, hal mana menggambarkan hirarkhi dari kedudukan para kepala Adat. Sedang pada Balai Adat Kelarasan Bodi Caniago, terlihat lantai balai adatnya tidak bertingkat, tapi sama rata yang melambangkan bahwa semua para kepala adat mereka sama kedudukannya dalam adat datuk-datuk.

[6] Lihat misalnya, Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", *Lembaran Sedjarah* No. 4 (1969).

[7] Lihat umpamanya, BJO Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi* (Djakarta: Bhratara, 1973): Taufik Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", Indonesia* (Ithaca, Cornell University, Oct. 1969), pp. 1-25.; H. Bouwman, *Eenige Beschouwigen over de Ontwekkeling van het Indonesisch Nasionalisme op Sumatra's Weskust* (Groningen: Bij JB. Wolters Uitgevers Maatschappij nv., 1949), pp. 23 ff.

[8] C. Spat, *Adat en Syariat in Alam Minangkabau* (Amsterdam: Zj. Vragen van den Dag, tt microfish), p. 2; lihat juga Umar Junus, "Some Remarks on Minangkabau Social Structure", dalam *BKI* (Deel 120 No. 3, 1964), pp. 293-326; *Memorie van Overgave van Gouverneur van Sumatra's Weskust, W.A.C. Whitlau* (April, 1926).

[9] Lihat De Josselink de Jong, *Minangkabau and Nagari Sembilan.....*, p. 52.

[10] H.A. Steyin Parve, "Kaum Padri di Padang Darat Pulau Sumatera" Terjemahan dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), pp. 105-128. Schrieke, *Pergolakan Agama...*; Moh. Radjab, *Perang Padri 1803-1838* (Djakarta: Perpustakaan KPP & K, 1954).

[11] Schrieke, *Pergolakan Agama ....* , pp. 12-13.

[12] Lihat misalnya, CB "Het Koffij stelsel van Sumatra's Westkust", dalam *Sumatra Courant*, No. 34 (Padang 1862).

[13] B. Schrieke, *Indonesian Socialogical Studies*...., pp. 95-110; J. Kreemer, "Het Sumatra's Weskust Rapport ....", *Kolonial Tijdschrift*, No. 7 (1928), pp. 172-73. Lihat juga W. Wynaendts van Resandt, "Het Verkeervraagstuk in Midden Sumatra" *KS Deel 2* (1928), pp. 74.

[14] MD. Masoer, et.al., *Sedjarah Minangkabau* (Djakarta: Bhratara, 1970), p. 160.

[15] Schrike, *Indonesian Socilogical Studies*.... , p. 96.

[16] Schrieke, ibid., p. 180-110

[17] Schrieke, ibid.

[18] Schrieke, ibid., p.102

[19] Schrieke, ibid, p. 103

[20] Di antara tahun 1852 dan 1858, ada 2000 orang Indonesia (mayoritas orang Minangkabau) yang berkunjung ke Mekah pada setiap tahunnya. Kemudian di sekitar pergantian abad ini, jumlah itu meningkat menjadi rata-rata pertahun 7300 orang. Sedangkan untuk musim haji tahun 1926-27 jumlah mereka yang naik haji untuk daerah Kerinci saja ada kira-kira 700 orang (1% dari jumlah penduduknya). Kemudahan-kemudahan bagi kesempatan naik haji itu sangat erat hubungannya dengan sikap politik kolonial terhadap agama Islam. Suatu ikhtisar yang baik tentang ini telah dikupas oleh Harry J. Benda dalam bukunya *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), terutama tiga bab pertama.

[21] W. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change* (The Hague. W. Van Hoeve Publisher LTD., 1969), p. 65; Ruth Mc Vey (ed), *Southeast Asian Transition. Approaches through Social History* (New Haven and London: Yale Univ. Press. 1978), p. 9; Lihat juga B.H.M. Vlekke. *Nusantara: A History of Indonesia* (The Hague: W. Van Hoeve, 1959) pp. 308-319).

[22] Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*..., p. 99.

[23] Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Raport..."*, p. 274.

[24] Schrieke , *Indonesia Sociological Studies*..., p. 105.

[25] "Cooperatie op Sumatra's Weskust" dalam *IG 2* (1928).

[26] Kegitan-kegiatan ekonomi di daerah ini tidaklah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hasil-hasilnya yang terkenal, gambir dan getah telah lama disalurkan ke Singapura melalui jalur Timur (Sungai Siak). Kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah ini bisa dilihat umpamanya, PW. Karthals, *Aantekeningen over de Vijfting Kottas In Padang Panjangsche Bovenlanden Op Sumatra* (tanpa tahun dan kota penerbit).

[27] J. Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Rapport...*, p 271.

[28] Tentang ini lihat Elizabeth E. Graves, *"The Ever-Victorious Buffalow:*

How the Minangkabau of Indonesia Solved Their "Colonial Question"? (Dissertation University of Wisconsin, 1971), khususnya bab 8.

[29] J. Kreemer *"Het Sumatra's Weskust Rapport..."*, p. 272.

[30] Tsuyoski Kato, "Change in Continuity in the Minangkabau Matrilineal System", *Indonesia No. 25* (Ithaca NY. Cornell University, April 1978) pp. 1-6 ; JS. Kahn ,"Tradition Matriliny and Change among The Minangkabau of Indonesia" *BKI 132* (1976), pp. 64-96; Itititiah Gunawan Mitchell, "The Socio Cultural Environment and Mental Disturbance: Three Minangkabau Case Histories", *Indonesia 7* (April 1969), pp. 123-138.

[31] Schrieke , *Indonesian Sociological Studies*.... p. 111

[32] Sama dengan Lumbung Nagari terutama tersebar di daerah Pariaman dan Fort de Kock, tapi dikelola oleh pemerintah.

[33] Schrieke, ibid

[34] Untuk daerah Kerinci saja, pada tahun 1920-an mereka sudah memiliki mobil (motor car) sebanyak seratus buah. Dalam bulan September 1926 jumlahnya mencapai 1100 buah. Lihat catatan kaki No. 14 Schrieke, *Indonesian Sosiological Studies* ..., p. 269.

[35] B. Schrieke, "Het Problem der Bestuursorgani Satie ter Sumatra's Weskust....", dalam *KS 1* (1927), pp. 57-107; Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Rapport* ....", p. 278-97 ; C. Boter Hoven de Haan, dalam "Enkele Aanntekeningen op het Rapport Van Sumatra's Weskust ....", dalam *KT.* (1928). pp. 297-303.

[36] Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Raport..."*, p. 279-80.

[37] M.D. Mansoer, et.al., *Sedjarah Minangkabau*..., p. 159.

[38] Sistem pajak ini nampaknya merupakan hal yang sangat sensitif sekali terhadap kehidupan masyarakat sehingga sering mengundang rasa ketidakpuasan. Kita dapat menunjukkan bagaimana buruk dan banyaknya pelaksanaan macam-macam jenis pajak yang dibebankan kepada rakyat: personeel belasting, inkomsten belasting, herendiensten belastingen, landrente, wins belasting, meubels belasting, adat huizen belasting, dan lain-lain. Lihat, Surat Kabar *Djago* No. 2, 20 Oktober 1923; G.A.N. Scheltema de Heere, "De Belastinginvoering op Sumatra's Westkust ....", dalam IG (Agustus, 1922), pp. 122-157.

[39] Harfian "bertukar cigak dengan beruk", artinya "sama saja binatangnya" (Jawa: "sami mawon").

[40] Periksa kembali catatan kaki no. 38 di atas.

[41] Schrieke, *Indonesian Sociological Studies* ...., p. 112-13; Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Rapport....*", p.125.

[42] Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Rapport...."*, pp. 275-76.

[43] Ibid.

[44] Ada kecenderungan bahwa setiap keluhan yang muncul di kalangan masyarakat adalah akibat kelakuan para pejabat yang semena-mena itu, tak pernah diperhatikan oleh penegak hukum pemerintah. Di bawah judul: "Psychologosche Bestuursvoering", Schrieke dan Komisinya telah dengan sangat jelas sekali mengungkapkan persoalan tentang ini. Lihat Ikhtisar ringkas dalam Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Rapport.."*, p. 282.

[45] Kreemer, *"Het Sumatra's Weskust Raport..."*, p. 281.

[46] Maksudnya ialah ciri khas dari kegalakan sang pejabat, atau kesan-kesan masyarakat atas tindakannya sebagai pejabat setelah meninggalkan jabatannya. Kosa kata "dipasang" menunjuk pada tindakan kekerasan dari pejabat pribumi yang sedemikian terkenal dan diungkapkan oleh koran-koran komunis pada masa itu.

[47] Tentang ini lihat Taufik Abdullah, "Modernization in The Minangkabau World: West Sumatra in The Early Decades of the Twentieth Century", dalam Claire Holt et. al. (eds.), *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca NY., London: Cornell University Press, 1972), pp. 179-254.

[48] Mengenai jumlah siswa-siswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah (terutama di Kairo) sebagian di antaranya berasal dari Minangkabau dan kehadiran mereka ini di daerahnya kemudian sangat berpengaruh terhadap proses modernisasi itu. Lihat tulisan William R. Roff, "Indonesia and Malay Students in Cairo in tahun 1920's" dalam *Indonesia No. 9* (April 1970), pp. 73-87.

[49] Lihat, Taufik Abdullah, *School and Politics ...*", pp.11, 23ff dan seterusnya; Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat ...*, pp. 26 ff.

[50] H. Bouwman, *Eenige Beschowingen over de Ontwikkeling van het Indonesische Nationalisme op Sumatra's Westkus* (Groningen, Batavia: J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij nv., 1949), pp. 68-9.

[51] Tulisan terbaik tentang sekolah dan gerakan Kaum Muda, termasuk dalam kaitannya dengan "Guru Ordonansi" terdapat dalam Taufik Abdullah, *School and Politics. The Kaum Muda Movement in West Sumatra, 1927-1933* (Ithaca: Cornell University, 1971), pp. 111ff.

[52] Bouman, *Enige Beschouwingen ...*, p.23.

III

Gerakan Komunis di Sumatera Barat

1. Jaringan Organisasi

Tentang kapan masuknya paham komunis ke daerah Sumatera Barat tidak dapat diketahui dengan pasti. Beberapa sumber yang tersedia hanya menyebutkan, bahwa paham itu telah dikenal Sumatera Barat saat Partai Komunis Indonesia (PKI) mendirikan cabangnya di Padang sekitar bulan Maret 1923.[1] Usaha itu rupanya telah dilakukan secara diam-diam oleh seorang pemuda bernama Magas. Dia pernah menetap di Jawa dan setelah beberapa lama berkenalan dengan orang-orang partai komunis di sana, ia kemudian berupaya untuk mengembangkan partai itu di daerahnya di Padang.

Demikianlah tidak beberapa lama sesudah partai itu berdiri, orang-orang komunis di daerah ini mulai bergerak. Kegiatan mereka mulai tampak ketika melancarkan aksi protes terhadap kedatangan Abdul Muis, salah seorang tokoh partai Sarikat Islam (SI) Pusat, yang berkunjung ke daerah ini untuk berkampanye bagi partainya di daerah asalnya, Sumatera Barat. Persaingan atau mungkin lebih tepat pertentangan

antara kedua partai itu kembali menghangat setelah selama beberapa tahun terjadi perseteruan yang bersumber pada perbedaan prinsip ideologis dan organisasi dalam kepartaian mereka. Tadinya hanya ada satu partai saja, yaitu SI. Organisasi Islam pertama dan terbesar itu diam-diam rupanya telah ditelusupi oleh orang-orang komunis, setidaknya sejak tahun 1916, sehingga SI pecah dua menjadi SI Putih dan SI Merah. SI Putih menjadi ahli waris SI yang semula didirikan di Surakarta tahun 1912. Sedang SI Merah sudah diboncengi oleh ideologi Marxisme dan lebih radikal dalam pandangan dan tindakan mereka.[2]

Pertentangan itu kemudian memuncak menjadi konflik terbuka ketika SI Putih yang mewakili kepemimpinan SI Pusat, di bawah tiga orang tokohnya yang paling terkemuka: Abdul Muis, Hadji Agus Salim dan Tjokroaminoto, menerapkan "disiplin partai" alias melarang keanggotaan rangkap dalam tubuh partai SI.[3] Tindakan itu beralamat kepada upaya mendepak orang-orang komunis keluar dari tubuh partai SI.

Maka tidaklah begitu mengherankan jika golongan komunis merasa "kebakaran jenggot" karena upaya mereka untuk membangun "front" dari dalam jadi berantakan. SI sangat banyak anggotanya dan sudah tersebar di hampir seluruh Nusantara dan ini dapat merupakan jembatan yang sangat strategis bagi orang komunis untuk meluaskan pahamnya sebelum berkembang menjadi partai yang mandiri, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI). Merasa kecewa dan tidak puas dengan tindakan pengurus SI Pusat ini, maka orang-orang komunis mereaksinya dengan keras. Senjata yang paling sering digunakan ialah menyerang pribadi pemimpin SI, terutama dengan mengungkit-ngungkit tuduhan tentang ketidakberesan dalam keuangan partai alias "korupsi" dalam tubuh SI. Saat itu kalau terdengar orang menggelapkan atau

mengkorupsi uang pemerintah atau organisasi perkumpulan, maka tindakan itu dinamai "mencokro". Artinya seperti Tjokroaminoto, yang dituduh oleh orang komunis menggelapkan uang rakyat dan sebagai "perkakas imperialis" alias pemerintah.[4] Istilah ini dan beberapa serangan fitnah juga digunakan oleh orang-orang komunis di Sumatera Barat untuk menyerang Abdul Muis.[5]

Begitulah sejak kedatangan Abdul Muis ke Sumatera Barat, pertentangan terbuka itu meluas dan berpindah dari Jawa ke Sumatera. Begitu SI, begitu pula PKI Sumatera Barat. Kedua partai itu dibawa oleh putra daerah yang merantau ke Jawa dan keduanya sama-sama ingin meluaskan pengaruhnya ke luar Jawa. Maka yang terjadi ialah persaingan dan pertentangan.

Dapatlah dikemukakan, bahwa fase pertama dari gerakan komunis Sumatera Barat mengikut garis partai mereka di Jawa. Setelah gagal merebut kepemimpinan SI Semarang tahun 1920, kemudian terlempar dari partai SI, eksekutif partai komunis coba bertindak sesuai dengan kebijakan yang digariskan Komintern (komunis internasional). Mula-mula membangun basis gerakan dalam SI Merah (Afdeeling B), kemudian membentuk sebuah organisasi gerakan yang independen lewat Sarekat Rakyat (SR). Cabang-cabangnya didirikan di Jawa dan Sumatera. Dalam kongres PKI di Batavia tanggal 7 s.d. 10 Juli 1924, di mana hadir tak kurang dari 32 cabang, di antaranya termasuk utusan dari Padang, diputuskan untuk membangun jaringan kepartaian berdasarkan kebijakan Komintern yang berpusat ke Uni Soviet. Di situ PKI dianggap sebagai "provinsi" bayangan Soviet dan bangunan "pulau-soviet", "desa-soviet" dan segala sesuatu yang berbau "soviet", termasuk prinsip partai dan metode propagandanya.[6]

Dulu via SI, dan kini via SR diharapkan pemimpin partai di pusat dan daerah dapat memiliki kontak-kontak dengan penduduk di lapisan bawah di perkotaan, seperti buruh dan nelayan, termasuk petani di pedesaan. Namun dalam perjalanannya, organisasi *"Onderbouw"* PKI itu lama kelamaan menjelma menjadi gerakan *petit bougeois*, bersimpati dengan pegawai dan elit lokal. Kecenderungan ini dengan sendirinya meninggalkan ciri *proletarian*, organisasi buruh atau sarikat sekerja. Kecenderungan ini diangap telah menyimpang dari apa yang diamanatkan oleh kongres PKI di Batavia bulan Juli sebelumnya. Jika ini berlanjut terus, maka sulit untuk mengharapkan Sarekat Rakyat sebagai *Onderbouw* (substruktur) dari PKI.

Selama tahun 1923-1924, gerakan komunis masih belum menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Schrieke melukiskannya dengan istilah *"symptom of maleise"*, suatu keadaan yang masih morat-marit dan belum lagi mapan.[7] Sebagian anggotanya kemudian bekerja sama pegawai-pegawai pemerintah, (terutama dari personel Jawatan Kereta Api) yang terkena pecat akibat politik penghematan pemerintah, tetapi sebagian juga dari pedagang-pedagang kecil yang menderita rugi akibat keadaan maleise.

Sebagai suatu organisasi yang sangat mementingkan prinsip-prinsip ideologis, gerakan komunis ketika itu belum memiliki daya tarik bagi masyarakat setempat. Selain karena jaringan organisasinya yang bersifat internasional, juga karena sikap "anti agama" yang ditunjukkan oleh orang komunis, sehingga menyebabkannya sukar untuk mengembangkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat luas.[8] Lagi pula, sejak kedatangan Abdul Muis ke daerah ini, gejolak politik menjadi semakin panas. Dalam beberapa kali kesempatan dan rapat-rapat umum yang sering diadakannya di Padang dan

Padang Panjang, Abdul Muis secara terbuka mengecam pemerintah. Ini terutama berkenaan dengan peraturan kenaikan pajak dan undang-undang mengenai kehutanan, yang dianggap menggerogoti hak milik "tanah ulayat" masyarakat. Kegiatan Abdul Muis ini telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sehingga dengan demikian memancing suasana panas.[9] Akibatnya pemerintah terpaksa menahan Abdul Muis dan membuangnya ke Jawa.[10]

Bagi orang komunis di Sumatera Barat penangkapan Abdul Muis merupakan sebuah keberuntungan, sebab penghalang utama dalam propaganda partai telah disingkirkan tanpa perlu mengeluarkan energi. Lagi pula rasa permusuhan terhadap tokoh partai Islam itu sudah lama dipendam dan niat orang PKI untuk mendepaknya tak pernah kesampaian. Dalam koran komunis di Padang, *Soeara Ra'jat* 1 Mei 1923 tampak sekali perasaan antipati terhadap Abdul Muis: "Padang: segera setelah kedatangan Abdul Muis, musuh komunis di kota ini, cabang PKI yang masih kecil tapi berpengaruh, didirikan.[11]

Pada mulanya kegiatan orang komunis di daerah ini hanyalah untuk menandingi kegiatan SI. Tak ada yang spektakuler selain untuk menguntiti gerak-gerik dan kegiatan Abdul Muis dan di mana perlu mengeluarkan pernyataan tandingan terhadap ucapan dan tindakan Abdul Muis selama di Sumatera Barat. Bagi mereka, organisasi SI dilihat sebagai mengidap penyakit. Hanya sosialisme *a la* komunis yang bisa menyembuhkannya, suatu isyarat bagi dimulainya propaganda ke tengah-tengah masyarakat. Meskipun pada masa ini gerakan komunis di daerah ini kecil saja, kecurigaan dan pengawasan pihak keamanan terhadap kelompok mereka tetap ketat. Lebih-lebih karena serangkaian kasus keributan dan pemogokan yang terjadi di Jawa, didalangi dan melibatkan orang-

orang komunis secara terang-terangan.[12]

Berhadapan dengan situasi yang tak menguntungkan ini, kaum komunis di Sumatera Barat lebih suka menggunakan resep Marxisme tentang "kesengsaraan yang meningkat" ("increasing misery") sebagaimana yang dirumuskan Lenin dalam tahun 1920.[13] Mereka, para pengikut gerakan, demikian Lenin, segera akan diajarkan untuk menempatkan "kapitalis", (yang diidentifikasikan dengan pemerintah kolonial) sebagai faktor penyebab dari segala bentuk kesengsaraan yang menimpa nasib buruk rakyat. Selain dari pada itu, meskipun pandangan bahwa agama dan nasionalisme dianggap sebagai alat kapitalisme masih tetap dianut, percobaan-percobaan untuk menyintesakan antara komunisme dan agama Islam mulai berjalan secara perlahan-lahan.

Resep itu mungkin bisa menolong kalau bukan satu-satunya jalan yang terbaik bagi pemimpin gerakan komunis Sumatera Barat saat itu. Pemimpin komunis di daerah ini sejak semula tampak sudah memasang strategi demikian. Karena kekuasaan pemerintah di daerah ini berpusat di Padang, maka untuk sementara dirasa perlu untuk menghindari pertentangan langsung dengan pemerintah. Sebagai alternatifnya mereka mulai membangun gerakan di lapis bawah dengan menggunakan sarana kepemimpinan lokal di Padang Panjang. Di sana sudah berdiri cabang Sarekat Rakyat yang dipimpin oleh kombinasi kekuatan kelompok agama (ulama), kaum adat dan pegawai atau cendikia. Di kota sejuk di kaki Gunung Merapi dan Singgalang ini, ajaran komunisme dikembangkan lebih bercorak ke-Islaman. Arsitek utamanya ialah Hadji Ahmad Chatib gelar Datuk Batuah, dibantu oleh Djamaluddin Tamin dan Natar Zainuddin.

Hadji Datuk Batuah adalah salah seorang murid terkemuka dari Hadji Rasul, tokoh modernis Islam Minangkabau,

yang kemudian dikenal sebagai guru yang cerdas dan disukai murid-murid di sekolahnya, Thawalib Padang Panjang. Dia dilahirkan pada tahun 1895 di Nagari Koto Laweh, Batipuh dekat Padang Panjang. Sesudah menamatkan sekolah menengah pemerintah di kota itu, dia melanjutkan studinya ke Mekah dalam tahun 1909-1915. Setelah kembali dari Mekah ia mengajar di sekolah agama Thawalib Padang Panjang. Pada tahun 1922 ia terpilih menjadi Ketua Penasehat *Sumatera Thawalib*, sebuah organisasi pelajar sekolah itu. Pada awal tahun 1923 Datuk Batuah melawat ke Jawa dan juga ke Sigli. Di Jawa ia bertemu dengan Haji Misbach, tokoh "Islam-komunis" yang menarik perhatiannya karena mengadopsi komunis ke dalam Islam. Di Aceh dia berjumpa dengan Natar Zainuddin, kondektur kereta api keturunan India-Minangkabau yang telah menerima ajaran komunis dari Jawa.[14] Sedangkan Dajamaluddin Tamin adalah tokoh terkemuka SI Padang Panjang, yang kemudian condong ke SI Merah dan ia seorang wartawan dan juga guru bantu Datuk Batuah di Thawalib.

Apakah Hadji Datuk Batuah telah menerima paham komunis itu dari temannya, Natar Zainuddin atau langsung dari Jawa, umpamanya dari Hadji Misbach tokoh Sarekat Rakyat di Surakarta itu, masih terdapat kesimpangsiuran pendapat. Namun adalah jelas, bahwa dia bukan menerima paham komunisme dari orang-orang komunis "sekuler" yang berada di bawah PKI cabang Padang.[15] Kenyataan bahwa pembentukan pengurus PKI lokal seksi Padang Panjang untuk sebagainya adalah atas dorongan orang-orang komunis dari Padang memang benar. Namun sebagaimana yang akan kita lihat berikut ini penonjolan unsur agama Islam di dalam gerakan komunis di daerah itu telah menjadikannya sebagai gerakan yang khas Padang Panjang dan mengalami perkembangan

dominan dalam ideologi komunisme Sumatera Barat.

Tahun 1924, setelah kembali dari lawatannya ke Jawa dan Aceh, Datuk Batuah dan dua kawannya Natar Zainuddin dan Djamaluddin Tamin mulai mengembangkan paham baru. Namanya "ilmu kuminih". Paham baru itu mula-mula diperkenalkannya kepada murid-muridnya di Sumatera Thawalib dan kemudian dikembangkan lewat kursus-kursus di luar sekolah. Tidak tanggung-tanggung, gerakan komunis Padang Panjang mendirikan sebuah lembaga kursus yang diberi nama "International Debating Club'.' Di samping itu ada pula "Buffet Merah", sebuah kafetaria pelajar yang seringkali digunakan sebagai tempat diskusi dan berdebat tentang paham baru itu.

Apa itu *ilmu kuminih*? Bagaimana Hadji Datuk Batuah menerangkan ajaran baru itu? Tidak sulit-sulit dan tak perlu teori-teori tingkat tinggi seperti yang diajarkan oleh Karl Marx. Sederhananya ajaran komunis itu "benci kepada pemerintah Belanda yang kafir". Dengan menggunakan dalil-dalil Al Quran dan Hadits, umat Islam diwajibkan melawan penindasan kaum kafir, karena penjajahan kaum kapitalis-imperialis bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang belumlah benar-benar Islam kalau tak peduli dan membiarkan penjajahan bercokol di negerinya. Ayat-ayat yang termaktub dalam surat *al-Anfal* dan surat *At-Taubah* yang berisi perjuangan sering dipakai untuk menjelaskan perjuangan umat yang disejajarkan dengan perjuangan dalam gerakan komunis.

Ajaran komunisme yang dikembangkan di sana merupakan adonan antara teologi Islam dan radikalisme Marxisme. Maka hasilnya ialah "Islam revolusioner". Tokoh-tokoh komunis di Padang Panjang tak terlalu menghiraukan apakah mereka angota PKI atau Sarekat Rakyat. Yang penting ajaran komunis adalah obat terhadap gerakan Islam yang sedang sakit. Mereka tahu bahwa jiwa orang Minangkabau

pada dasarnya adalah jiwa Islam. Kaum Paderi, dan Kaum Muda atau kaum Islam modernis, termasuk di antara mereka adalah Datuk Batuah sendiri, seperti juga para ulama Islam di Minangkabau telah menyemaikan bibit Islam ke dalam sanubari masyarakat. Termasuk ke dalam adatnya yang diakui bersendikan Islam. Pepatah Minang mengatakan "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Para pemimpin terdahulu telah sudah memperlihatkan militansi mereka dalam membela agama dan ingin berjuang.

Namun masalahnya apakah tidak ada gerakan politik yang berdasarkan agama waktu itu? Ada. Yaitu Sarikat Islam (SI). Tetapi nama SI telah jatuh. Beberapa pemimpinnya diisukan telah menggunakan kekayaan partai untuk kepentingan sendiri. "Sama saja di Jawa dan di Sumatera. Banyak yang telah kaya dari harta benda kepunyaan orang banyak."[16]

Tidak heran jika komunis diterima sebagai gerakan alternatif. Tetapi komunis yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Datuk Batuah menyebutnya dengan istilah "Islam revolusioner" yang diberi nama komunis. Berbagai argumentasi dari Al Qur'an dan Hadis Rasul dikemukakan sedemikian rupa untuk menerangkan ajaran baru itu. Teori Marxisme tentang materialisme historis dan perjuangan kelas (*class struggle*) belum dibahas secara mendalam, tetapi cukup dengan menghadapkannya dengan gagasan tentang kesadaran kelas, yaitu kelas bumiputra yang tertindas kesewenang-wenangan dan ketidakadilan akibat kebijakan penguasa kafir. Dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada, seperti keburukan pemerintah yang mengambil kekayaan alam negeri ini, dan perlakuan ketidakadilan dari pejabat kolonial terhadap pribumi (*inlander*), ajaran itu sedemikian masuk akal bagi muridnya yang masih muda belia itu. Dan ini merupakan tema-tema utama yang selalu sangat menarik perhatian murid-muridnya dalam

lembaga kursus itu dan secara tidak langsung menyediakan amunisi bagi mengarahkan gerakan itu menjadi aksi-aksi yang lebih radikal dan revolusioner.[17]

Ajaran komunisme yang mereka pahami itu disejajarkan dengan spirit perjuangan Islam. Konsep "perjuangan kelas" yang menjadi dasar dalam melihat ketimpangan dalam masyarakat ajaran komunisme, misalnya, lebih menekankan makna ajaran *fiqh* dari sudut sosial dan politis daripada ideologi murni komunis itu sendiri. Maka untuk lebih memantapkan ajaran ini, mereka pun menerbitkan dua buah surat kabar, seperti "Pemandangan Islam" dan "Djago-Djago" yang masing-masing redakturnya dipegang oleh Hadji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin. Kedua koran komunis itu merupakan sumber dan sekaligus wacana intelektual yang menyeimbangkan antara ajaran Islam dan kritik terhadap realitas sosial dalam masyarakat.

Dapat pula dikemukakan alasan lain dalam hubungan persoalan di atas ialah kepemimpinan Hadji Datuk Batuah yang dalam mengembangkan pengaruh ajaran baru itu berpijak pada posisi yang sedemikian kokoh, kendatipun bukannya tanpa kritik yang pahit dan tidak henti-hentinya.[18] Kecuali sebagai guru yang cerdas dan dihormati di kalangan perguruan Thawalib, predikat "haji" dan "datuk" yang disandangnya itu menjadi modal yang penting untuk menimbulkan kepercayaan pengikutnya terhadap dirinya. Lebih penting lagi ialah kepintarannya dalam berceramah menjadikan dirinya tokoh ideal di kalangan murid-murid Thawalib.[15]

Bilamana sikap anti-agama dari gerakan itu mulanya merupakan hambatan yang paling serius dalam mengembangkan pengaruhnya di kalangan masyarakat luas, maka di tangan Hadji Datuk Batuah unsur-unsur Islam bukan saja menjadi dasar legimitasi dari perjuangan gerakan mereka, tetapi bahkan

memberikan identitas kepada gerakan itu, yang membuatnya berbeda dari corak khas komunis Sumatera Barat.

Demikianlah dalam jangka waktu yang relatif singkat, gerakan partai komunis tak hanya terbatas di Padang, tetapi juga sudah menyebar ke Padang Panjang dan nagari-nagari di sekitarnya.[19] Tentu saja tak terkecuali di nagari Hadji Datuk Batuah di Kota Lawas. Orang pertama yang dapat ditariknya menjadi komunis adalah Kepala Negeri Kota Lawas itu sendiri, lalu kemudian meluas kepada murid-murid dan masyarakat setempat. Segera tidak beberapa lama sesudah itu mereka kemudian mencoba mengorganisir kekuatan untuk menggerakkan pemberontakan terhadap pejabat-pejabat pemerintah kolonial setempat, khususnya pejabat kulit putih. Asisten Residen Padang Panjang adalah merupakan korban pertama dan seterusnya diikuti dengan aksi-aksi serupa.[20] Tetapi akhirnya, lantaran khawatir terhadap gejala-gejala serupa itu, maka pemerintah kemudian menangkap Hadji Datuk Batuah dan Natar Zainuddin pada tanggal 11 November 1923, dan lebih dari setahun sesudah itu tepatnya tanggal 12 Januari 1925, keduanya dibuang ke Kalabahi dan Kafamananoe, Timor.[21]

Sampai pertengahan tahun 1924, dan sebenarnya sampai tahun-tahun berikutnya, gerakan komunis di Sumatera Barat, khususnya yang berada di bawah kepemimpinan Padang Panjang, lebih suka bernaung di bawah Sarekat Rakyat ketimbang PKI. Barangkali karena alergi dengan istilah "partai" yang sering menjadi masalah karena selalu dikuntiti PID Belanda, atau juga karena PKI terkesan sekuler seperti yang tampak menonjol di Padang. Meskipun Sarekat Rakyat telah dihapuskan berdasarkan kebijakan CC PKI, di Sumatera Barat *Onderbouw* PKI itu tetap hidup dan malah lebih populer ketimbang PKI. Sampai pertengahan 1924 anggotanya baru

mencapai 158 orang, kemudian bulan Desember 1924 meningkat sampai 660 orang dan Februari 1925 melonjak menjadi 840 orang.[22] Jumlah itu tidak termasuk untuk seksi Padang Panjang sendiri sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1: Persebaran anggota SR di Sumatera Barat.

No.	Seksi (Lokasi)	Jumlah
1	Koto Laweh	101 termasuk 36 wanita
2	Solok	79
3	Payakumbuh	21
4	Sungai Sariek, Pariaman	110
5	Lubuk Basung	114
6	Silungkang	25
7	Fort van der Capellen [Batusangkar]	24
8	Fort de Kock [Bukittinggi]	54
9	Muara Labuh	24
10	Sawah Lunto	49
11	Kacang	25
12	Tikalah	28
13	dll.	6

2. Ideologi

Tindakan penangkapan-penangkapan atas sejumlah pimpinan gerakan sejak awal 1925,[23] di satu pihak berakibat terjadinya kekosongan dalam kepemimpinan gerakan dan di lain pihak berakibat mengendornya kegiatan gerakan komunis Sumatera Barat untuk sementara waktu. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, yakni setelah konferensi Padang Panjang Mei 1925, kekosongan kepemimpinan segera dapat diisi kembali, sejalan dengan terjadinya reorganisasi. Salah satu hasil konferensi Padang

Panjang ialah memutuskan bahwa semua cabang lokal yang tersebar di beberapa kota di Sumatera Barat yang selama ini cenderung bergerak independen atas nama SR, kini berada di bawah kendali Padang sebagai pusat. Terpilih sebagai ketuanya ialah Zainun, bekas kondektur kereta api di Aceh, sedang sekretaris dan bendahara masing-masingnya dipegang oleh A. Wahab (kemudian juga tertangkap) dan Haji Muhammad Nur Ibrahim, mantan tokoh SI Lubuk Buaya, Padang). Anggotanya ialah Nurdin dan Tibin.[24]

Akan tetapi struktur ini juga tidak berlangsung lama. Bulan September 1925, sejalan dengan instruksi CC PKI, Padang yang tadinya berkedudukan sebagai pusat bagi cabang-cabang di seluruh daerah Sumatera Barat dijadikan sebagai cabang (seksi) dan cabang yang lama dijadikan sub-cabang (sub-seksi). Dalam perkembangan yang lebih kemudian, nama Haji Muhammad Nur Ibrahim dan Sutan Said Ali, seorang aristokrat Minangkabau dan pernah menjadi pengikut Abdul Muis, tampil sebagai pemimpin PKI paling terkemuka Sumatera Barat, yang berkedudukan di Padang.[25]

Barangkali karena khawatir akan kecenderungan gerakan yang semakin ditarik ke orbit pusat (Jakarta) yang sekuler, maka atas insiaitif Padang Panjang, diusulkan agar pimpinan eksekutif partai di Sumatera Barat dipindahkan kembali ke Padang Panjang. Di sini wajah baru, Arif Fadillah, tampil menggantikan Sutan Said Ali. Arif Fadillah adalah seorang tokoh yang paling berwibawa dan pengikut berat Tan Malaka. Sejak itu mulai lagi terjadi perubahan penting dalam pola kepemimpinan dan orientasi ideologi gerakan.[26]

Perubahan itu pertama-tama dapat dilihat dalam kepemimpinan partai, yakni dari yang bercorak keagamaan kepada kepemimpinan sekuler. Selain itu, basis ideologi gerakan juga bergeser dari yang semula sangat kental spirit agama-

nya dan menggunakan lembaga sekolah agama seperti di perguruan Thawalib sebagai basisnya, kepada peneguhan hubungan dengan sumber ideologi di pusat sebagai bagian dari kebijakan organisasi yang berorientasi kepada Uni Soviet dan mendapat bantuan keuangan daripadanya.[27]

Perubahan-perubahan ini, sesungguhnya juga mencerminkan peran yang akan dimainkan kaum komunis dalam menggalang massa pengikutnya di kalangan yang lebih luas. Namun begitu kecenderungan ini pada dasarnya hanyalah merupakan perluasan cakrawala lingkungan gerakan belaka. Sebab sebagaimana yang akan dilihat pada fase perkembangan selanjutnya, kubu Padang Panjang akan memainkan peran lebih besar daripada pengurus di Padang. dan dengan demikian unsur-unsur keagamaan yang cenderung dilecehkan oleh kelompok sekuler, tetap dipertahankan.

Kecenderungan ini dengan jelas ditunjukkan dalam sebuah selebaran yang diedarkan oleh gerakan komunis Sumatera Barat, yang dikeluarkan oleh pengurus Padang Panjang ke berbagai sub-cabang, dan bahkan juga ke luar daerah, seperti ke Tapanuli, Jambi dan Aceh seperti yang dapat diikuti lewat beberapa kutipan berikut ini:

> "....Let no one speak ill of the communism for whosever does that, is a *kafir*, an unbliever. There are, after all, four ways in wich a mean may invaliditate his being Moslem: (a) by doing a thing of which he has not knowledge, (b) by not doing a thing of which he has knowledge, (c) by lacking knowladge, being unwilling to learn from those who know, (d) By speaking ill of those who do right.
>
> The Communists, really do disire what is right, namely that religion, *adat*, and prosperity should all be improved.
> 1. Has not Allah said, "Don` obey the commands of the kafir? and what do we do?

2. Our *adat*, which used to govern us, yea in what not, have been ruined by the goverment and capitalists.
3. Now we work only for the benefit of the capitalists. not for the benefit of ourselves in our families.

Who ever joins those who do right, does right him self. Whoever joins the rank of those who do wrong or give it their approval does wrong him self.

The communists wish to do right but are prevented so doing by capitalists. Whoever does not join the communists and whoever speaks ill of them are themselves capitalists.
Whoever, when the time shall have come for the right against the Duch, is not communists, has ranged himself on the side of the *kafir*. Otherwise he would have become a communists. Think it over.[28]

Sejak tahun 1924, gerakan komunis daerah ini sering meningkatkan kegiatan gerakan lewat rapat-rapat umum. Dalam berbagai pertemuan umum yang sering diadakan, prinsip-prinsip komunisme sedikit lebih diperjelas. Selain dari itu juga mengadakan pungutan-pungutan sumbangan dari anggota gerakan yang diterima secara teratur, terutama untuk keperluan propaganda dan kegiatan rapat-rapat yang sering diadakan.

Salah satu tujuan pokok dari kegiatan itu adalah untuk mengobarkan suatu semangat yang tegas terhadap segala ketidakpuasan dan keresahan di kalangan masyarakat, lalu kemudian menghadapkannya dengan praktek-praktek pemerintahan kolonialism yang mereka pandang sebagai sumber dari semua kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Maka itu harus dicari dan diungkit serta dipertajam dengan cara bagaimanapun juga demi mencapai tujuan mereka. Jika ternyata cara-cara demikian belum efektif, intimidasi dan anarkhis, juga harus dimanfaatkan, bahkan perlu melakukan

tindakan pembakaran dan pembunuhan.[29]

Untuk tujuan itu, maka organisasi dan ideologi harus dipermantap. Dalam salah satu pertemuan yang diadakan di Padang Panjang sekitar pertengahan September 1924, struktur organisasi ditinjau kembali. Anggota-anggota PKI yang sekaligus bergabung dalam SR, yang selama ini masih terpencar-pencar di seluruh daerah Sumatera Barat dihitung kembali dan mereka diundang rapat.[30] Pada kesempatan itu juga dibicarakan statuta dan anggaran dasar organisasi. Salah satu hasil keputusan yang dicapai pada waktu itu ialah, bahwa tujuan dari SR haruslah sejajar dan mengacu pada prinsip-prinsip yang digariskan PKI di mana mereka akan berusaha untuk mempersatukan para pekerja dan buruh tani di Sumatera Barat tanpa memandang kebangsaan dan agama mereka.[31]

Demikianlah sementara reorganisasi SR di Sumatera Barat tengah berjalan, di tingkat pusat di Jawa mulai timbul keragu-raguan terhadap fungsi dan efektifitas organisasi itu sebagai suatu organisasi pendamping PKI. Pada kongres PKI pada tanggal 12 Desember 1924 di Kota Gede, Yogyakarta, SR dibubarkan, sebagaimana yang telah diusulkan juga oleh Darsono pada Kongres PKI bulan Juni sebelumnya. Pada kesempatan itu juga dibicarakan garis revolusi secara langsung di setiap negara jajahan.[32] Sejalan dengan garis politik dari Komintern, dipandang perlu adanya suatu reorientasi baru dalam taktik dan strategi partai.

Tuntutan ini dengan sendirinya mendorong perubahan, antara lain dalam taktik dari "front" bersatu dari dalam (*united from within*) kepada "front bersatu dari atas" (*united from-above*) atau sistem komando dari atas. Hal mana antara lain disebabkan oleh karena kekecewaan-kekecewaan yang dialami gerakan komunis pada tahun 1919-1923, sehingga telah meng-

ingatkan para pemimpinnya bahwa prospek masa depan dari gerakan itu tidak akan pernah berhasil bilamana terus bertahan pada prinsip yang lama.[33] Itulah sebabnya maka mereka merasa perlu merubah taktiknya itu dengan lebih menyesuaikan dengan kebijakan pusat, sambil mengalihkan perhatian kepada kegiatan gerakan komunis di negara-negara jajahan di dunia Timur, khususnya Indonesia.

Jadi, sebagaimana yang dikemukakan Stalin, cara terbaik dalam rangka menyukseskan revolusi adalah dengan cara kesediaan bekerja sama atau bersekutu dengan gerakan pembebasan nasional (kaum nasionalis). Taktik ini tampaknya dapat diterima sepenuhnya oleh pemimpin-pemimpin gerakan komunis di Indonesia, karena hal itu memang sejalan dengan tuntutan mereka selama ini. Maka untuk tujuan itu mereka akan mencoba berusaha untuk merangkul semua pengikut gerakan revolusioner, baik nasionalis, maupun Islam dan sebagainya. Sejak saat itu terjadinya perubahan dalam orientasi politik PKI sebagaimana yang dikehendaki oleh Komintern di atas.

Dari segi lain, Kongres Yogya juga telah membuka pandangan-pandangan partai terhadap kedudukan SR. Mereka antara lain melihat, bahwa SR di mana-mana telah mencetuskan rasa ketidakpuasan. Hubungan SR dengan PKI memang bukannya tidak ada. Secara teoritis ia menjadi basis dan substruktur yang berdampingan, namun pada kenyataannya mereka menjadi dua organisasi yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai sayap kanan yang pada mulanya dimaksudkan sebagai barisan depan PKI, SR tidak lain dibentuk untuk tujuan menciptakan keserasian "interest" (kepentingan) dalam kelas pekerja, akan tetapi pada kenyataannya mereka terdiri dari kelas dan "interest" yang berbeda-beda.[34] Lagi pula, alat propaganda anti imperialisme dari ke-

pentingan kelompok lain serta munculnya prasangka kelas terhadap golongan menengah yang lebih rendah (*patit-bourgouse*) juga dimasukkan sebagai basis kekuatan gerakan. Ini jelas bertentangan, atau sekurang-kurangnya di luar ketentuan Komintern. Sebagai akibat semua itu, SR dengan demikian kurang memiliki kekuatan dari dalam.

Pertimbangan-pertimbangan di atas itulah yang menyebabkan partai menghendaki agar SR dibubarkan saja dan sejak itu anggotanya diminta bergabung atau melebur ke dalam keanggotaan PKI. Dengan demikian memungkinkan pula bagi gerakan untuk segera mendidik rakyat menjadi komunis, terutama melalui peningkatan prasarana perlengkapan propaganda, seperti kegiatan kursus-kursus, penerbitan surat kabar, buku-buku dan brosur-brosur. Untuk semua ini Kongres menyetujui sepenuhnya.

Di Sumatera Barat khususnya, hasil resolusi Kongres Yogya itu,[35] terutama yang berkenaan dengan pembubaran SR tidak terlalu diindahkan. Namun setelah ditangkapnya Datuk Batuah dan Natar Zainuddin beberapa pergeseran mulai terjadi. Sudah dikatakan di atas, bahwa sejak awal 1925 semua SR lokal telah berada di bawah pengawasan kantor cabang PKI Sumatera Barat di Padang.[36] Namun itu mengalami perubahan lagi. Kantor Pusat di Padang berubah menjadi seksi (cabang) yang membawahi beberapa subseksi-subseksi, yang sebelumnya merupakan seksi-seksi (cabang) yang tersebar di sembilan kota Sumatera Barat. [37]

Memasuki periode 1925 ini, kegiatan gerakan komunis Sumatera Barat sesungguhnya lebih banyak diarahkan kepada peningkatan kursus-kursus kader dan pemahaman ideologi komunisme, tetapi di samping itu juga menerbitkan berbagai macam surat kabar, brosur-brosur, pamflet-pamflet dan lain-lainnya. Kegiatan publikasi semacam ini bukanlah barang baru

bagi Sumatera Barat dan kaum komunis amat terbantu dengan tradisi publikasi ini yang memang sudah berjalan sejak lama, terutama dari kalangan kelompok gerakan ulama, baik yang konservatif maupun modernis. Kehadiran berbagai jenis surat kabar yang berhaluan komunis, sampai tingkat tertentu merupakan prestasi dan sekaligus menambah semaraknya wacana intelektual Sumatera Barat. Setidak-tidaknya dari segi jumlah (kuantitas) kemampuan mereka menerbitkan media-cetak jauh melampaui penerbitan surat kabar mana pun yang pernah dimiliki oleh golongan-golongan lain, terkecuali pers yang diterbitkan oleh gerakan Modernis Islam di sana.[38]

Tabel 2: Surat Kabar/ Tabloid Komunis Sumatera Barat 1923-1925

No.	Nama Surat Kabar	Redaktur Utama	Tempat Terbit
1.	*Pemandangan Islam*	Hadji Datuk Batuah	Padang Panjang
2.	*Djago-djago,*	Natar Zainuddin	Padang Panjang
3.	*Doenia Achirat,*	Zainal Maliki	Fort de Kock
4.	*Petir*	Baharuddin Shaleh	Padang
5.	*Sasaran Ra'jat*	SR (?)	Solok
6.	*Signal*	Hadji Arif	Sawah Lunto
7.	*Soeara Tambang*	Nawawi Arif & Idroes	Sawah Lunto
8.	*Panas*	Sulaiman Labai	Silungkang
9.	*Persamaan*	Sutan Ali & Abd.Karim	Sibolga
10.	*Torpedo*		Padang

Memang, semua koran di atas tidak hidup lama. Sebagian malah hanya beberapa kali terbit saja sebelum dibreidel oleh pihak keamanan pemerintah.[39] Di samping itu masih ada lagi media berupa pamflet-pamflet dan kurang pentingnya ialah pertemuan-pertemuan, kursus-kursus dan rapat rapat

umum atau rahasia.[40] Para pemimpin partai dan juga sebagian peserta kursus juga dilengkapi dengan literatur gerakan. Sejumlah buku-buku tentang ajaran komunis beredar di tangan mereka. Sebagian diterbitkan di Sumatera Barat. Beberapa literatur berikut ini sudah menjadi "menu" pemimpin dan anggota partai komunis di Suamtera Barat.

- *Pedoman PKI* (Semarang, 1923)
- *Partai Reglement dari PKI* (1924)
- Axan Zain, *Komunisme, Dua Jilid*, (Semarang, Juni-Juli 1925)
- Sukindar, *Theses bagi Keadaan Social dan Ekonomi serta Tjara bagi mengadakan Organisatie dan Taktiek di Indonesia* (1924)
- *Manifest Komunis oleh Karl Marx dan Friederich Engels* (Terjemahan Axan Zain, Soeara Ra'jat, 1923).
- Tan Malacca, *Naar de Republiek Indonesia* (Canton, 1925).
- Mahmud, *Tjontoh jang Baik* (1925), sebuah famplet 6 yang sangat terkenal dan ditulis oleh Mahmud, penulis Sumatera Barat.
- Sjamsuddin, *Keadaan Doenia dan Datangnja Sociale Revolutie* (Padang Panjang, 1925).

Salah satu syair yang sangat populer dan ditulis Datuk Batuah ialah "Pandanglah Bui Surga di Dunia", suatu ungkapan-ungkapan perjuangan yang dipandang radikal dan dibaca oleh kebanyakan murid-murid Thawalib.

Baik media cetak, maupun buku-buku dan rapat-rapat anggota partai mencerminkan alam fikiran dan intelektualitas pemimpin pergerakan waktu itu. Para pemimpin partai atau kaum pergerakan waktu adalah orang yang membaca. Mereka belajar tidak kepalang tanggung. Teori-teori Marxisme disantap habis. Koleksi buku mereka amat banyak. Tokoh SR

di Silungkang seperti Sulaiman Labai dan Datuk Sinaro Chatib, seorang penghulu yang menjadi sekretaris Sarekat Rakyat Silungkang waktu itu mencapai lebih 1000 buah dan sebagian karya terjemahan dari bahasa Eropa dan Cina. Banyak pemuda yang memanfaatkan taman bacaan tokoh Sarekat Rakyat itu.

Publikasi koran dan rapat-rapat partai, yang menjadi bagian dari "mode" kaum pergerakan waktu itu digunakan dengan efektif untuk mendiskusikan masalah organisasi dan gagasan-gagasan tentang perjuangan dengan menggunakan teori-teori Marxisme. Konsep "perjuangan kelas", misalnya diterangkan dengan cara yang praktis dan mudah dalam rangka mengkritik pemerintah. Bagaimana pemimpin komunis di daerah ini menerangkan perkembangan masyarakat dari kaca mata komunisme?

Sederhananya ialah melihat perkembangan masyarakat secara historis dalam tiga tahap perkembangan dan itu lazim dikupas dalam rapat-rapat dan forum debat di *International Debating Club* (IDC), yang diasuh Datuk Batuah dan kawan-kawan. Ketiga tahap itu ialah (i) fase komunisme primitif, (ii) fase kapitalisme dan imprealisme dan akhirnya (iii) fase yang terakhir komunisme modern menuju masyarakat tanpa kelas.

Pada tahap komunisme primitif dilukiskan keadaan masyarakat yang masih hidup "murni" tanpa gangguan dari pihak manapun juga, tanpa pembatasan hak milik. Waktu orang hidup seperti di surga, tinggal mengambil atau menggunakan apa saja yang dibutuhkannya. Dengan lain perkataan, perikehidupan dan penghidupan manusia dalam masyarakat komunisme primitif, menurut pandangan mereka, adalah dalam kemerdekaan yang sempurna.

Di mata orang komunis, penguasa kulit putihlah yang menyebabkan semua itu menjadi rusak. Inilah tahap kedua,

ketika kapitalisme dan imperialisme berkuasa. Periode ini dilukiskan sebagai keadaan menjadi terganggu dan kacau akibat ulah pemerintahan penjajah. Pemerintah kolonial diidentikan dengan "Dajjal", "Belanda Setan", simbol dari segala sumber bencana dan kekacauan. Bagi mereka penjajah Belanda adalah setan yang mengancam sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Maka untuk menciptakan sesuatu masyarakat yang tenang dan tidak dieksploitasi oleh kaum kapitalis (alias pemerintah), mereka mengidam-idamkan kembalinya masyarakat komunis primitif, tapi dengan perlengkapan yang lebih modern. Untuk itu orang harus berjuang demi tercapainya cita-cita itu.[41]

Semua itu hanya mungkin diraih dengan perjuangan yang keras dan persatuan yang kokoh. Pergerakan yang sedang disusun oleh kaum komunis waktu itu merupakan salah satu manifestasi dari perjuangan untuk mencapai cita-cita itu. Cita-cita perjuangan harus ditempuh dengan kematangan otak dan fisik. Untuk memberi spirit kepada anggota, gambar-gambar tokoh komunis di Jawa dan Karl Marx ikut digantungkan di dinding kantor IDC. Lebih penting lagi, kehadiran surat kabar-surat kabar, pamflet dan buku-buku juga ikut memupuk inteletualitas anggota gerakan. Sungguhpun publikasi-publikasi itu (terutama surat kabar) pada umumnya tidak dapat berjalan lama, umumnya akibat sensor yang keras oleh pemerintah melalui undang-undang persnya, tetapi juga karena tindakan penangkapan yang sistematis terhadap redakturnya, namun daya dobraknya bagi pencerahan pemikiran pengikut partai amat luar biasa, melebihi dari pada cara-cara propaganda atau bentuk-bentuk lisan, seperti pertemuan-pertemuan dan ceramah-ceramah dan sebagainya.

Menjelang akhir tahun 1925 gerakan itu seakan-akan hilang dari kegiatannya, kalau bukannya terhenti sama sekali.

Hal mana selain disebabkan oleh tindakan-tindakan keras dan penangkapan yang dilakukan pemerintah, hambatan-hambatan dari ulama dan kaum adat juga merupakan tantangan yang sangat mempengaruhi kemajuan gerakan. Tidak semua ulama Kaum Muda (modernis) menyetuji komunis di Thawalib. Haji Rasul (ayah Hamka) dan rekannya, Haji Djamil Djambek dan Abdullah Ahmad dan Zainuddin Labai, untuk menyebutkan beberapa ulama paling terkemuka waktu itu, menentang kehadiran komunis di negeri mereka. Mereka juga melawannya dengan buku dan penerangan-penerangan kepada murid-murid Thawalib yang sudah terpecah dua: pro komunis dan anti komunis. Tidak tersedia data seberapa banyak murid-murid Thawalib yang telah jadi komunis, namun menurut Hamka, salah seorang murid di sana, bahwa hampir semua murid demam komunis. Meskipun tak terlibat menjadi anggota komunis, mereka juga ikut berdebat dan memperbincangkannya, termasuk Hamka sendiri. Ia masih ingat, bagaimana ayahnya mengingatkan dirinya: "Waang [kamu] jangan masuk komunis pula." Ayahnya menyesali gerakan Datuk Batuah. Setelah tokoh itu ditangkap ia berucap" "Sayang, dia alim besar, [tapi] terbenam saja ilmunya".[42]

Lain Haji Rasul, lain lagi pengalaman Inyiek Djambek (Syekh Djamil Djambek). Sehabis memberikan pengajian agama di Pariaman, ia tiba-tiba ditanya oleh seorang jamaah tentang makna sebuah ayat Al-Quran yang sering dikutip-kutip oleh kaum komunis untuk menyerang penguasa kafir, Belanda. Dia malah harus sembahyang dulu sebelum memberikan jawabannya.[43] Tak dijelaskan apa jawaban tokoh ulama tua itu, namun sejak awal 1924 *Persatuan GuruAgama Islam* (PGAI) di Padang, yakni suatu organisasi guru-guru agama kaum modernis telah mengeluarkan pernyataan terbuka menentang komunisme dan menegaskan bahwa doktrin komunisme tidak

mungkin disejalankan dengan agama Islam. Komunis, menurut mereka, tidak mengakui hak milik pribadi, dan juga mengabaikan lembaga rumah tangga. Tak ada gunanya memberikan dukungan terhadap gerakan anti-agama itu.[44] Dan di Padang Panjang Haji Rasul dengan halus menolak aliran baru itu dengan mengatakan "cukup dengan Islam saja, tidak perlu memakai faham lain".[45]

Selain berhadapan dengan tokoh-tokoh ulama terkemuka, yang menolak paham baru itu, orang-orang komunis juga harus menyelesaikan urusan dengan kaum adat. Dalam hal khususnya bertalian dengan soal pemilikan tanah. Secara tradisional tanah di Minangkabau dikuasai oleh golongan penghulu dan mereka adalah tuan-tuan tanah dalam arti orang yang paling berhak menentukan pembagian hak milik dalam lingkungan kerabatnya. Sudah barang tentu sasaran dari perjuangan gerakan komunis untuk membagi-bagikan tanah kaumnya kepada rakyat tanpa memandang hubungan kekerabatan (pertalian darah) menjadi rintangan. Sebaliknya kaum penghulu juga merasa posisi mereka terancam manakala sebagai orang yang memegang teguh hukum adat alias berwenang dalam menentukan pembagian tanah dalam kaum kerabatnya.

Sesungguhnya gerakan komunis mulai mencapai titik kemajuan dan sekaligus tantangan yang lebih serius ketika memasuki periode tahun 1926. Kekurangan-kekurangan dalam pemimpin gerakan akibat penangkapan-penangkapan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya telah diperkuat kembali dengan cara reorganisasi dan dengan datangnya sejumlah orang-orang baru dari Sumatera Timur, Aceh dan Jambi.[46] Namun perbaikan itu nampaknya belum menampakkan hasil yang memuaskan. Baru kemudian setelah kembalinya Sutan Said Ali dari menghadiri rapat rahasia di Prambanan,

Solo pada akhir bulan Januari 1926 diusahakan lagi untuk mengadakan rapat rahasia di kalangan pemimpin-pemimpin gerakan di Padang Panjang.[47] Hasilnya antara lain ialah memutuskan untuk meningkatkan propaganda secara besar-besaran. Untuk itu perlu disusun kekuatan untuk meningkatkan propaganda di berbagai tempat sehingga memungkinkan bagi perluasan dukungan di kalangan masyarakat.

Sejak itu mereka mulai aktif mengirim orang-orangnya ke berbagai daerah. Di Solok dan kemudian juga di Silungkang di mana kegiatan propaganda sebenarnya telah berjalan sejak bulan Juli 1924, kini digiatkan lagi. Di sini pada mulanya usaha itu telah dilakukan propagandis Idrus dengan mencoba mempengaruhi pegawai-pegawai (BOW, Departemen Pekerjaan Umum) dan sebelum itu telah pula dicoba menyelusupkan orang-orang komunis ke dalam suatu organisasi lokal "Medan Musjawaratan". Demikian juga Kacang, Solok dan Sawah Lunto, di mana cara-cara serupa dilakukan terhadap pegawai-pegawai Jawatan Kereta api dan para pekerja atau buruh tambang batu bara di kota itu.[48] Usaha yang serupa juga digerakkan di Pariaman melalui organisasi lokal "Persjarikatan dan Persatoean". Demikian juga di Sungai Sarik, Pariaman, di mana terkenal propagandis Sidi Djemadi, seorang guru agama aliran tareqat *Shattariyah* dan di Ulakan dikenal Labai Kadir, juga aliran tareqat *Shattariyah*.[49] Di Labuk Basung, Batipuh, Rao-Rao, Dangung-dangung, Tiakar dan Suliki dan lainnya. Di Teluk Bayur, Padang mereka masuk ke dalam organisasi buruh pelabuhan SPPL dan "Sarikat Tani" di Gunung, Panyalaian, Pitalah dan Batipuh, Padang Panjang.[50] Aktivis komunis Sumatera Barat juga ikut aktif menggerakkan propaganda di luar daerah seperti di Jambi,[51] Bengkulu,[52] Tapanuli,[53] Pulau Tello, Sumatera Timur,[54] dan Indragiri.[55]

Sementara kegiatan propaganda di Sumatera Barat dan

daerah di sekitarnya telah berjalan pesat, terjadi lagi, perkembangan baru dalam kepemimpinan CC PKI di pusat. Kali ini lebih serius karena yang terjadi ialah perpecahan di kalangan pimpinan. Sebuah rapat rahasia rupanya diam-diam diadakan di Prambanan, dekat Yogyakarta tanggal 25 Desember 1925. Salah satu resolusi Prambanan yang terpenting ialah menetapkan rencana "revolusi", istilah formal orang komunis untuk melakukan aksi makar atau rencana pemberontakan umum pada 1 Mei 1926. Pemberontakan itu direncanakan akan dimulai di Sumatera, kemudian akan diikuti oleh Jawa. Jika rencana pertama gagal, rencana berikutnya sudah harus terjadi selambat-lambatnya bulan Juli 1926.[56]

Keputusan dari resolusi Prambanan itu ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan pemimpin-pemimpi PKI. Terutama Tan Malaka, tokoh paling terkemuka yang menolak rencana itu. Dia berpendapat bahwa soal mencetuskan revolusi bukan bergantung kepada ada atau tidaknya keuangan sebagaimana yang menjadi titik tolak dari rencana resolusi itu, melainkan bergantung kepada perhitungan kekuatan pengikut revolusi. Yang terlebih dahulu harus diperhatikan, menurut Tan Malaka, ialah usaha memperlihatkan secara konkret suatu semangat revolusi yang bersungguh-sungguh dari massa rakyat.

Menurut Tan Malaka aksi-aksi yang selama ini dilakukan orang komunis seperti pemogokan-pemogokan dan demonstrasi yang diadakan berturut-turut serta cara lain-lain yang serupa itu belum merupakan jaminan. Itu baru merupakan *warming up*. Oleh sebab itu, ia selanjutnya berpendapat bahwa kekuatan yang ada sekarang masih terlalu jauh dari sempurna. Untuk menggerakkan revolusi umum haruslah dihentikan; waktunya belum "matang". Untuk sementara waktu pemimpin-pemimpin gerakan diminta untuk

memperkuat organisasi dan tetap melakukan aksi-aksi "pemanasan" pada tempatnya masing-masing. Dalam hubungannya ini, para pemimpin di setiap daerah hendaklah diberi kebebasan yang luas untuk membuat peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.[57]

Pendirian ini telah dibentangkan secara langsung dan panjang lebar oleh Tan Malaka kepada Alimin dan kawan-kawannya, ketika mereka bertemu di Manila guna menyampaikan hasil keputusan rapat Prambanan itu kepada tokoh kharismatis itu. Kendatipun saat itu Alimin tidak menunjukkan sikap penolakannya terhadap pandangan Tan Malaka, di dalam hatinya dia tetap akan jalan terus. Sebagaimana ternyata kemudian, perpecahan di kalangan pemimpin-pemimpin komunis tak bisa dielakan lagi. Karena alasan ini pula, maka resolusi Prambanan itu kemudian tidak dapat dijalankan menurut semestinya.

Di Sumatera Barat khususnya polarisasi kepemimpinan itu juga menimbulkan perpecahan antara kubu Padang yang lebih condong dengan kebijakan CC PKI dan kubu Padang Panjang yang lebih dekat dengan Tan Malaka. Arif Fadillah (pengganti Sutan Said Ali yang tertangkap di Medan pada tanggal 22 Mei 1926), seperti halnya Tan Malaka, menolak rencana pemberontakan itu, tetapi alasan yang dikemukakan lebih menyangkut disiplin partai. Baginya keputusan pemberontakan itu adalah kemauan segelintir pemimpin radikal dan itu berada di luar wewenang pengurus komite sentral PKI.[58]

3. Prasarana dan Metode

Penampilan kegiatan gerakan komunis Sumatera Barat terutama selama tahun 1927 dapat dilihat dari tiga fokus kegiatan berikut ini. *Pertama*, kegiatan meningkatkan propa-

ganda. *Kedua*, mengumpulkan senjata dan akhirnya yang *ketiga* melakukan aksi-aksi illegal. Kegiatan yang pertama lebih merupakan proses kesinambungan dari kegiatan gerakan sejak fase-fase pertama. Untuk lebih menjelaskan, baiklah di bawah ini dirinci secara satu persatu.

3.1. *Propaganda*

Sudah disinggung di muka, bahwa cara-cara propaganda merupakan alat yang paling utama bagi gerakan dalam upaya menggalang kekuatan, khususnya untuk menarik pengikut ke dalam organisasi guna memperbesar jumlah anggota dan dengan sendirinya guna menyiapkan suatu "revolusi" alias pemberontakan. Kita juga telah mencatat berbagai macam jenis media seperti surat kabar yang diterbitkan oleh kaum komunis seperti juga kegiatan pertemuan-pertemuan umum dan rapat rahasia serta kursus-kursus.

Kesemuanya itu bertujuan bukan saja untuk meningkatkan gerakan secara kuantitas atau memperbesar jumlah anggota-anggotanya, tetapi juga secara kualitas, yaitu mempermatangkan gerakan sehingga memungkinkannya untuk mengambil langkah-langkah nyata menuju aksi pemberontakan umum. Kita juga telah mencatat, bagaimana gerakan komunis di bawah label Sarekat Rakyat (SR) dipersatukan sebagai organisasi gerakan yang aktif dalam propaganda dengan mobilitas geografis yang sangat cepat sekali.

Salah satu cara propaganda yang dilakukan orang komunis di daerah ini adalah dengan mencoba mengungkit dan melansir rasa ketidakpuasan umum di kalangan masyarakat. Kemudian menghubungkannya dengan praktek-praktek pemerintah kolonial yang dianggap sebagai kaum kapitalis dan imperialis yang menggerogoti kekayaan negeri. Agitasi kaum propagandis komunis sedikit banyak berhasil menimbul-

kan keresahan dalam masyarakat. Suasana demikian selanjutnya dimanfaatkan secara sistematis untuk memasukkan paham komunis sebagai pembela kepentingan rakyat banyak.

Bukan secara kebetulan, sebagaimana ditunjukkan dalam bab terdahulu, bagaimana perubahan-perubahan sosial-ekonomis akibat penetrasi sistem ekonomi uang yang berlangsung bersamaan dengan penetrasi sistem pemerintah kolonial. Kedua fenomena itu juga telah menunjukan bagaimana berdampak langsung terhadap masyarakat. Terutama rusaknya hubungan-hubungan kekerabatan dan hubungan-hubungan komunitas seperti wibawa para penghulu yang semakin menurun bukan saja datang dari pihak pemerintah kolonial; keharusan untuk mengadakan hak milik keluarga untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan akibat berbagai sebab, posisi kaum intelektual muda yang makin terjepit karena ijazah yang mereka miliki tidak sepadan dengan kedudukan yang mereka terima. Juga terjadinya pemecatan-pemecatan yang dilakukan pemerintah terhadap pegawainya karena dituduh komunis dan lain-lain sebagainya.

Menjadi jelas mengapa kita bisa mengharapkan, bahwa terjadinya kekerasan sosial bukan hal yang mustahil. Para pemimpin komunis dengan cerdas berhasil mengolah gejala di atas sebagai bahan propaganda yang sangat mengena. Maka untuk semua ketidakpuasan itu orang-orang komunis mencoba mengungkit dan mempertajam sehingga menjadi matang dan disadari. Lalu menawarkan kata-kata slogan yang menggairahkan seperti terlihat dari istilah-istilah menggugah berikut ini: "kemerdekaan", "kapitalis", "melayu kopi daun" dan seterusnya.

Istilah "kemerdekaan", dalam kata-kata seorang pemimpin gerakan dikatakan;

... kemerdekaan jang kita maksoed ialah kemerdekaan dari

> genggaman kaoem kemodalan.....; mendapat kemerdekaan jang seperti itoe. Soedah tentoe bermaksoed soepanja kaoem kapitalis djangan menindas lagi....." mendapatkan kemerdekaan tak lain djalan selainnja mempergoenakan ichtisar sendiri walaoe tjara apa poen joea ....".[59]

Kemerdekaan secara langsung dan tak langsung ditujukan untuk melawan tekanan-tekanan dari *Kapitalisme*, untuk mana pemerintah kolonial Belanda harus tanggungjawab. Bagaimana penalarannya hingga mereka sampai mengidentifikasikan pemerintah sebagai kapitalisme? Ini telah diterangkan secara masuk akal melalui tiga fase perkembangan masyarakat sebagaimana yang dikursuskan kepada pengikut-pengikut gerakan. Sebagaimana telah disinggung juga di muka, periode komunisme primitif merupakan keadaan yang ideal, di mana kehidupan yang serba indah. Suatu masa lampau yang tanpa cacat, ketika persoalan-persoalan yang dirisaukan sekarang ini dahulunya tidak dikenal. Dalam perkembangannya kemudian, semua itu menjadi musnah dan berantakan karena telah dirusak oleh kedatangan penguasa kulit putih yang memerintah negeri mereka.

Maka untuk menyebut perbuatan "kapitalistis" penguasa Belanda itu, propagandis komunis memiliki ungkapan lokal yang sangat menggugah: "Kapi-se-tali", berasal dua buah kosa kata "kapi" (kafir) dan "setali" (setalen) yaitu nilai mata uang 25 sen. Kata itu lalu dipergunakan sebagai simbol dari eksploitasi pemerintah "kafir" yang kolonial lewat pemungutan pajak belasting dari rakyat banyak. Lebih jauh "Kapitalisme" juga diidentifikasi dengan "Dajjal ", yaitu tokoh eskatalogis yang senang berbuat binasa dan kejam dalam suatu kisah dalam kepercayaan orang Islam. "Dajjal" tidak mungkin dilawan kalau tidak bersatu menyusun kekuatan. Maka dalam hubungan ini orang-orang komunis merasa diri

mereka sebagai juru selamat (mesias) yang diidentikkan dengan *Imam Mahdi,* yang datang sebagai "juru selamat", menertibkan keadaan yang rusak oleh Dajjal atau pemerintah kapitalis kafir.

Kedua ungkapan di atas, "Dajjal" dan "Imam Mahdi", dengan jelas mencerminkan unsur keagamaan dalam propaganda gerakan. Betatapun utopisnya dan bahkan secara logika bertolak belakang, istilah itu amat menarik. Secara implisit, ideologi komunis di sini terletak antara "archaisme" (masa lalu) dan "futurisme" (masa depan). Kedua "isme" itu bertentangan dengan perkembangan kebudayaan yang wajar. "Archaisme" berusaha mempertahankan berlangsungnya zaman "baheula", yang baik (komunis primitif) sementara diingkarinya dinamika dan dipujanya keadaan statis nenek moyang. Memberhentikan perjalanan sejarah tentulah mustahil. Hanya dengan meningkatkan ketegangan keadaan fiktif (kesadaran palsu) dan realita, sehingga disiapkannya letusan revolusi yang semakin lantang diteriakkan oleh propagandis komunis. Sementara "futurisme" seakan-akan mengingkari "kekinian", kenyataan hari ini, yang menentukan dan diciptakannya khayalan semacam *pipe-dream.*[60]

Selain dari pada itu, untuk mengungkapkan "ketamakan" dan "keserakahan" dari pemerintah ada lagi dua pepatah Melayu Minangkabau yang sangat dikenal. *Pertama, Melayu kopi daun,*[61] yaitu simbol dari kerakusan pemerintah dalam tanam paksa kopi di masa lalu. Selama abad ke-19, yakni setelah kaum Paderi ditundukkan Belanda, Belanda menerapkan sistem tanam paksa kopi. Hasil tanaman kopi rakyat habis dikuras oleh penguasa sehingga rakyat terpaksa harus minum daun kopi, yang ditumbuk lumat sampai halus, jadi bukan buahnya. Dalam istilah lokal dikenal juga dengan istilah "minum kawa", yaitu minum pagi sebelum ke sawah. *Kedua*

ungkapan *bak Baulando maminta tanah, lalu pinjaik lalu kulindan,* (ibarat Belanda minta tanah, kalau jarum penjahit lewat, dengan sendirinya benang lewat pula). Maksudnya ialah bila mana diberi tanah (kesempatan), sedikit saja, katakanlah satu inci, maka mereka, Belanda, sudah pasti akan mengambil lebih dari jumlah yang diminta semula; dari sejengkal ke sehasta; dari sehasta ke sedepa dan seterusnya. Simbol kecerdikan dan kerakusan Belanda itu diibaratkan dengan "jarum penjahit" yang pada bagian belakang (pangkalnya) dikaitkan benang. Jadi, sekali mata penjahit menusuk jahitannya maka benang pun dengan sendirinya ikut lewat membonceng masuk lewat lobang yang sama.

Semua slogan-slogan di atas secara khusus ditujukan kepada praktek-praktek pemerintah kolonial yang paling dibenci masyarakat, seperti sistem tanam paksa kopi, kerja paksa, sistem pajak dan pengambilalihan hak milik tanah rakyat menjadi milik pemerintah kolonial, sebagaimana yang diapungkan ke permukaan oleh Abdul Muis dalam kampanye SI sebelumnya. Dalam semua ini kaum komunis mengeruk keuntungan dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang SI dalam kampanye partai mereka tahun 1923. Dengan sedikit mencelupkannya amunisi kebencian terhadap kebijakan penguasa sebagai perampas seluruh kekayaan Minangkabau seperti tanah, kayu, hutan, juga tambang-tambang batu bara dan seterusnya "....er word bij onze, over onze, maar zonder ons beslist, ten bate van anderen ...." (semuanya ada pada kita dan tentang milik kita, tetapi tanpa kita yang memutuskannya demi keuntungan orang lain).[62]

Kaum komunis sedang mengharapkan rakyat menyadari akan hal itu, sehingga mereka juga merasakan, bahwa tak akan ada kesejahteraan yang dapat diharapkan dari pemerintah. Maka suatu tindakan tegas harus diambil bersama "semuanya

harus dikitakan" (*"all, must be made mine"*).[63] Dengan begitu sesuatu harus dilakukan dan orang harus menyadari tak ada lagi pertentangan kepentingan karena *uwe belangen zijn de onze* (kepentingan kalian adalah kepentingan kita juga).[64]

Dalam suatu kesempatan, bertanyalah seorang pemimpin gerakan kepada pengikutnya: "Siapakah yang menempatkan diri kalian pada nasib yang sengsara begini?" Jawabnya "tidak siapa-siapa, kecuali 'pemerintah kapitalis", yaitu *Ulando* (Belanda), musuh yang segera harus diperangi. Penguasa kolonial yang kafir itu tak mungkin dilawan kecuali dengan kekuatan metafora *sapu lidi*,[65] yaitu sebatang lidi yang tadinya tak berdaya karena berdiri sendiri kalau dipersatukan dalam suatu ikatan yang kokoh akan mampu menyapu bersih semua "kotoran". Istilah "kotoran" bagi mereka adalah unsur-unsur pejabat pribumi dan antek-anteknya, yang menjadi kaki-tangan pemerintah kolonial.

Tidak begitu meragukan, bahwa metafora di atas telah menggugah kesadaran penduduk terhadap krisis yang dikonstruksikan oleh kaum komunis terhadap kenyataan di sekitar mereka. Sekarang mereka bisa menyerukan agar rakyat bangkit menyusun barisan untuk menghantam musuh mereka, kapitalisme Belanda.

Kegiatan propaganda lewat kursus-kursus dan pertemuan tidak hanya tidak hanya mengkaji ideologi komunisme, dengan istilah-istilah asing yang seringkali diulang-ulang dan dicatat, tetapi juga dengan lagu-lagu Marxistik. Hamka masih ingat bagaimana orang-orang muda hafal dengan lagu-lagu Marxistik yang digubah oleh seksi PKI Solo dan Bandung yang diedarkan ke seluruh daerah. Dia belum mengerti betul politik dan ikut bergaul dengan kawan-kawan di Thawalib serta turut menyanyikan lagu "Internasional", "1 Mei", "Kerja Enam Jam Sehari" (*The Six-Hour Work-Day*), "Saya Mariana Proletar".[66]

Kegiatan propaganda melalui berbagai macam penerbitan atau publikasi, terutama surat kabar yang mewakili kelompoknya masing-masing tidak kalah semaraknya. Bila kita membaca surat kabar *Soeara Tambang*, misalnya, di situ tidak hanya diberitakan kejadian-kejadian luar negeri, tetapi juga menyajikan kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat menentang perlakuan dari "Sinjo-Sinjo" (Toean majikan) yang dianggap semena-mena dan kasar terhadap buruh-buruh tambang. Aspirasi-aspirasi semacam itu, tetapi dalam jangkauan yang lebih luas, juga bisa dilihat dalam suatu, "gurindam sjair" yang sangat terkenal ketika itu sebagaimana yang pernah berkali-kali dimuat dalam surat kabar "Pemandangan Islam" dan "Djago Djago."[67]

Simaklah sebuah gurindam syair yang ditulis oleh M.A.C.S. Perpatih berikut ini:

Hai bangsakoe anak Hindia .....
Di mana-mana di sekelilingnja
Tjaboetlah diri dari sengsara
Berdiri sendiri sebagaimana dahoeloenja
Kita dahoeloenja tegak sendiri
Tidak diperintah oleh orang sana sini
Baroelah kini orang perentahi
Hawa berpoetar berlaloe hari
Sekarang marilah kita bersama
Menjaboet diri dari kaoem sana
Soepaja boleh kita merdeka
Kitalah senang di roemah tangga.[68]

3.2. *Kegiatan Mengumpulkan Senjata.*

Fokus kedua dari kegiatan gerakan komunis Sumatera Barat sejak pertengahan 1926 adalah upaya mengumpulkan senjata. Usaha ini pada mulanya dilakukan dengan mengadakan

pemungutan uang sumbangan anggota secara suka rela. Namun berdasarkan surat edaran CC PKI No. 25 tanggal 13 Juni 1926, pengurus PKI cabang Sumatera Barat diinstruksikan untuk mengedarkan formulir sumbangan distribusi kepada seluruh subseksi di setiap daerah.[69] Di samping itu pemungutan uang sumbangan dari anggota gerakan terus berjalan teratur.

Selain dari pada itu juga diharapkan bantuan keuangan dari Moskow, karena menurut rencana, "revolusi" baru akan dimulai setelah dana yang terakhir ini diterima.[70] Semua keuangan ini nantinya akan dipergunakan, terutama untuk membeli perlengkapan senjata, di samping untuk keperluan keperluan lainnya seperti untuk kegiatan rapat dan propaganda. Para pengurus kemudian juga terpaksa menambah jenis pungutan untuk membantu korban "gempa" Padang Panjang bulan Agustus 1926, dan pembangunan atau perbaikan mesjid yang rusak.[71]

Sementara "wang derma" terus dikumpulkan, Hadji Muhammad Nur Ibrahim berangkat ke Singapura untuk tujuan pembelian senjata. Di sana dia sekaligus dapat berhubungan dengan Alimin dan Muso yang ketika itu juga berada di situ untuk urusan yang sama. Dari Tan Malaka diperoleh pula berita bahwa di sini (Singapura) tersedia sekitar 200 pucuk pistol yang antara lain direncanakan akan dibagi-bagikan untuk seksi-seksi. Masing-masingnya untuk Medan 200 pucuk, Aceh 300 pucuk, sedangkan sisa selebihnya akan diserahkan buat cabang Surabaya. Selain dari pada itu di Manila juga menurut informasi yang diberikan Tan Malaka ada lagi kira-kira 2000 pucuk pistol yang semuanya akan diserahkan kepada cabang Sumatera Barat. Juga via Mr. Van Eck, direktur "Firman Boon", dan dari seorang manejer toko penjual senjata gelap di Medan dan keduanya berkebangsaan Belanda

bersedia pula sebagai "broker" untuk mendatangkan senjata-senjata api melalui perdagangan gelap.[72]

Dalam jaringan dagang senjata gelap di Sumatera Barat adalah Datuk Mangchudum Sati, bekas ketua SR, yang paling dikenal sebagai tokoh paling aktif dalam usaha pengumpulan senjata-senjata bagi gerakan komunis.[73] Ia pun juga mengadakan pendekatan kepada asisten administrator tambang batu bara di Sawah Lunto berkebangsaan Jerman untuk mendapatkan latihan menggunakan senjata-senjata api itu. Lebih dari itu, yang bersangkutan malah juga bersedia untuk mendatangkan senjata laras panjang semisal "karaben" dan "revolver."

Senjata-senjata serupa ini juga dapat mereka beli dari pedagang-pedagang yang mensuplai senjata bagi penyadap getah yang sering pulang pergi ke Boven Jambi (Jambi Hulu) dan Kuantan. Permintaan senjata dari mereka ini cukup besar juga karena mereka biasanya membawa senjata buat melindungi diri mereka dari kemungkinan serangan mendadak oleh para pembajak atau binatang-binatang buas. Senjata-senjata berupa bom dan senjata tangan (pemukul) lainnya, seperti klewang, "ruduih" (rudus=senjata pedang khas Minangkabau) dapat dibuat sendiri di Padang, Sungai Puar, Malalo, dan Lintau.[74]

Menjelang akhir tahun 1926 sudah terkumpul kurang lebih 2000 pucuk senjata api, seperti karaben, pistol, senapan balansa ("kacepek"), granat tangan dan bom.[75] Sedangkan senjata pemukul seperti klewang, "ruduih" dan besi runcing dan lain-lain sebagainya sudah pula tersedia dalam jumlah besar. Tetapi untuk sebagian kecil sejata-senjata itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan-keperluan aksi-aksi illegal, terutama sejak bulan-bulan pertama tahun itu (1926).

3.3. *Aksi-Aksi Ilegal*

Aspek ketiga dari kinerja gerakan komunis ialah berkenaan dengan "teori offensif" dari sayap kiri, yang dicetuskan lewat kongres komunis internasional ketiga tahun 1923. Tindakan ini diperlukan sebagai taktik untuk mengukur reaksi kekuatan lawan dan untuk melatih "fighting spirit" dan sebagai konsekuensi dari perjuangan politik untuk menumbangkan kekuasaan musuh. Sehubungan dengan itu, para pemimpin komunis di Sumatera Barat menempuh dua langkah penting. Pertama dengan menjual "kartu merah" sebagai identitas anggota kaum merah (komunis), dan yang kedua mendirikan organisasi "bawah tanah" seperti "Sarekat Djin" atau "Sarekat Hantu".

Dengan "kartu merah" setidak-tidaknya orang komunis berniat mencari dukungan material (biaya), kalau bukan untuk mencari dukungan moral dan material dari setiap lapisan masyarakat. Selain itu juga untuk mengidentifikasi mana yang musuh dan bukan musuh. Kegiatan dalam hal ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1925. Di Padang Panjang khususnya Arif Fadillah dan Mahmud telah mencoba mempengaruhi masyarakat setempat dengan mendirikan organisasi "Syarekat Tani" yang didirikan sebagai basis gerakan komunis. Bagi anggota yang tergabung dalam gerakan organisasi itu dibagikan kartu merah. Mereka diminta membayar sejumlah uang kepada pengurusnya. Kegiatan serupa juga dilakukan kepada para pegawai SPPL (Sarekat Pegawai Pelaboehan dan Laoetan) di *Emmahaven* (Teluk Bayur) dan Pariaman, dan selain itu juga kepada organisasi lokal "Persarikatan dan Persatoean" di kota yang sama.[76]

Tak bisa dipungkiri pula, bahwa penyebaran "kartu merah" di mana-mana seringkali mendapat sambutan yang tidak memuaskan. Terutama pada masa-masa sulit. Di daerah-

daerah di mana basis komunis kuat, usaha itu dapat diatasi dengan berbagai cara. Di Silungkang misalnya, di mana kebutuhan beras didatangkan dari luar, penduduk tak dapat membeli beras tanpa terlebih dahulu menunjukkan "kartu merah". Oleh karena pasar-pasar telah dikuasai oleh orang-orang komunis, penduduk mau tak mau terpaksa memiliki kartu merah dan sekaligus sebagai identitas anggota gerakan. Bagi mereka yang tidak memiliki kartu merah senantiasa mendapatkan ancaman-ancaman halus dari orang-orang komunis agar mereka membelinya. Inilah model intimidasi atau teror gaya komunis. Tidak ada jaminan hidup dan perlindungan bagi orang-orang yang tidak memiliki identitas "kartu merah" dan bila revolusi sudah meletus nanti, demikian ancaman yang sering dilontarkan orang-orang komunis itu, orang tak perlu lagi membawa "kartu merah".[77]

Sesungguhnya banyak orang yang merasa terpaksa membeli kartu merah itu. Lebih-lebih karena harganya terus menaik dari waktu-kewaktu; hari ini dijual f. 0,50 per lembar, besok hari dapat dipastikan harganya naik menjadi f.1 dan seterusnya.[78] Usaha semacam itu juga sering dilakukan di tempat lain, terutama di daerah-daerah di mana sudah kuat pengurusnya. Mereka juga memaksa pemilik *lapau* (warung) supaya tidak melakukan jual beli dengan orang-orang yang tidak mempunyai kartu merah. Di Tapanuli, di mana tanaman kopi berhasil baik, dan sebagian besar para pekerja kebun kopi di sana berasal dari Minangkabau, para pemilik kebun dan pedagang kopi juga dipaksa dengan cara-cara serupa. Dari pada diboikot oleh orang-orang komunis, mereka merasa lebih aman dan baik-baik saja jika memiliki kartu merah. Di Solok orang-orang komunis memboikot upacara kenduri dan dalam acara-acara keramaian lainnya, manakala orang banyak yang berada di sana belum memiliki kartu merah, dan ini juga

berlaku di tempat-tempat lain.

> "...Pada waktoe jang belakangan ini roepa-roepanya orang soedah banyak jang mendapat penjakit "*roode Kaartjes*" [karcis merah], siapa jang tidak pakai itoe kartoe moesti terantjam...."[79]

Usaha-usaha semacam ini tidak jarang pula diikuti dengan ancaman teror yang menakutkan dan bahkan juga dengan cara pembakaran rumah dan bahkan adanya percoba-an-percobaan pembunuhan yang dihubungkan dengan suatu kelompok rahasia yang terorganisasikan secara rapi. Tidak pernah ada orang mengetahui identitas kelompok itu, sementara pembunuhan-pembunuhan dan perampokan terus berlangsung di berbagai tempat. Terutama terhadap pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai pemerintah, seperti polisi dan polisi mata-mata (PID) serta kaki-kaki tangannya seperti kepala negeri seringkali menjadi sasaran utama dari kelompok rahasia itu.

Pihak keamanan selalu menduga-duga aksi-aksi semacam itu sebagai tidak lebih dari tindakan kriminal sekelompok pengacau yang melulu dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi semata, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa kelompok itu ada hubungannya dengan gerakan komunis. Apa yang disebut dengan "Sarekat Djin" atau "Sarekat Itam" itu sesungguhnya merupakan ujung tombak dan bagian dari serangkaian program dari PKI untuk menggerakkan aksi-aksi ilegal berupa teror dan intimidasi.

Organisasi itu sebenarnya sudah didirikan di Padang pada bulan April 1926 dan mempunyai "pemimpin-pemimpin Bestuur" sendiri di dalam apa yang disebut *Komite Perlawanan* (CP). Secara organisatoris mereka berhubungan dengan partai cabang. Gagasan untuk mendirikan organisasi "bayangan" ini sesungguhnya muncul pertama kali dari hasil rapat Pram-

banan, di mana disepakati untuk membentuk apa yang mereka namakan "Double Organization" (DO) atau kadang-kadang disebut "Dictatorial Organization".[80]

Pada tanggal 8 Mei 1926, yaitu tidak sampai satu bulan sesudah "Sarekat Djin" didirikan di Padang, surat kabar "Radio" terbitan Padang menurunkan berita tentang berdirinya organisasi yang baru ini di Koto Tangah dan Pauh (Padang luar kota atau "Padang Ommelanden"). Dikatakan bahwa organisasi itu telah dibentuk sejak bulan puasa tahun itu, sedang anggotanya yang semula berjumlah 40 orang itu dipimpin oleh seorang bernama Si Patai. Tidak lama kemudian, kelompok itu telah melakukan serangkaian aksi-aksi dengan membunuh beberapa orang pejabat setempat. Sementara itu cabang-cabang yang lain telah menyebar ke seluruhan daerah Sumatera Barat. Pada bulan April dilaporkan pula percobaan-percobaan pembunuhan yang terjadi di Lubuk Basung, Maninjau dan pada bulan Mei peristiwa serupa juga terjadi lagi di Bukit Batabuh, Biaro Gadang dan Gadut, Agama.[81] Selanjutnya pada tanggal 9 September apa yang disebut dengan" Kamang Affair" yaitu terjadinya serangkaian gerakan aksi-aksi yang berakhir dengan pembunuhan atas Datuk Tanang Sati, kepala Negeri Kamang. Hal yang terakhir ini disebabkan antara lain oleh karena gerakan itu telah mengetahui bahwa kepala negeri tersebut telah mencoba mengumpulkan dan mencatat nama-nama dan tempat tinggal dari orang-orang yang dicurigai sebagai komunis.[82] Suatu "Sarekat Djin" yang lain telah didirikan pula di Koto Anau di mana percobaan pembunuhan pertama telah dimulai beberapa hari setelah berdirinya organisasi itu pada tanggal 31 Oktober 1926. Dalam bulan Agustus dan November dibentuk pula "Sarekat Itam" di perumahan (Kamang) dan di Gunung, Padang Panjang.

Dari waktu ke waktu teror komunis yang menakutkan itu menjalar di mana-mana, sedang pemerintah sepertinya tidak berdaya mengatasinya, sehingga keadaan menjadi serba tidak menentu. Dan efek moral yang ditimbulkan dari peristiwa ini sangatlah besar. Penduduk ketika itu benar-benar mengalami frustasi. Sementara aksi-aksi illegal ini terus berlangsung, tidak ada tindakan konkret yang diambil pemerintah untuk mengatasinya. Pihak keamanan selalu menganggap sebagai kerusuhan-kerusuhan biasa dan menanganinya menurut prosedur standar tugas mereka. Jika ada laporan mereka turun ke lapangan dan memeriksa korban sambil mencari tahu pelakunya. Lalu kembali ke kota.

Oleh karena tidak ada penyelesaian tuntas, orang selalu dibayangi rasa cemas dan ketakutan oleh kemungkinan datangnya ancaman setiap saat. Lebih ironis lagi, orang-orang atau keluarga yang dituduh komunis secara praktis keluarga mereka juga dinyatakan tidak dilindungi oleh hukum. Di tempat-tempat lain, isteri-isteri dari orang komunis dikumpulkan dan berbagai penyiksaan dilakukan agar mereka mau menunjukkan tempat persembunyian suami mereka. Selain dari pada itu juga diambil tindakan, bahwa bagi setiap keluarga yang dituduh "komunis" dikenakan pungutan pajak yang lebih tinggi.[83] Akibatnya masyarakat terancam dari kedua belah pihak: dari tindakan "gelap" dan dari perlakuan pihak keamanan pemerintah. Dengan demikian, target komunis untuk sementara tercapai, yakni menciptakan keresahan sosial. Semua ini mempertajam tusukan bagi timbulnya rasa dendam dan dalam banyak hal merupakan faktor yang turut mempermatang kondisi bagi timbulnya api pemberontakan nantinya.

4. Massa Pendukung

Mayoritas dari 660 anggota gerakan komunis yang mula-mula, terdiri dari pegawai pemerintah yang terkena pecat. Sebagian lagi adalah pedagang-pedagang kecil yang menderita rugi akibat maleise. Tetapi juga ditemukan, bahkan peletak dasar bagi perkembangan gerakan untuk masa-masa selanjutnya, yaitu para pengikut dari kalangan terpelajar, terutama para guru dan bekas murid-murid sekolah agama seperti Thawalib dan pelbagai organisasi perkumpulan pada masa itu.

Kendatipun pada fase pertama gerakan itu belum lagi mampu menerobos ke seluruh bagian lapisan masyarakat, dalam arti bahwa variasi anggota gerakan masih berkisar dalam kelas sosial yang rata-rata sama, namun tak dapat diingkari kenyataan bahwa anggota gerakan itu dalam waktu yang relatif singkat telah tersebar dengan sangat cepat sekali keseluruh daerah Sumatera Barat.

Para pemimpin gerakan pada dasarnya berasal dari golongan intelektual menengah, tetapi juga berasal dari kelompok elit tradisional yang kecewa akibat dari perubahan-perubahan sosial ekonomi yang demikian cepat sebagaimana telah ditunjukkan pada bab terdahulu. Mereka itu antara lain, adalah golongan bangsawan yang mengalami kemerosotan posisi sosial dan ekonominya, para penghulu yang kehilangan kewibawaannya, dan orang-orang yang gagal mencapai ambisi mereka untuk menjadi penghulu. Tetapi juga pegawai-pegawai pemerintah yang kecewa karena kedudukan yang mereka terima dianggap tidak sepadan dengan pendidikan (ijazah) yang mereka peroleh. Sebagian lagi dari guru-guru agama dan guru-guru sekolah pemerintah yang sering dihadapkan dengan kesulitan akibat kebijaksanaan pemerintah. Ada juga mereka yang tidak diterima atau dipecat dari pegawai perintah serta

anak-anak putus sekolah.[84]

Sedemikian jauh studi ini belum dapat menemukan daftar nama-nama dari orang-orang komunis atau pengikut gerakan, baik berupa nama-nama yang diinternir oleh pemerintah maupun dalam bentuk laporan hasil "proses verbal" di pengadilan ataupun dalam bentuk lain. Oleh karena itu masih sukar untuk memberikan perincian prosentase dari pengikut gerakan, umpamanya mengenai latar belakang pendidikan, jabatan dan identitas-identitas lainnya.[85] Tetapi dari daftar orang-orang atau anggota-anggota gerakan yang dapat dikutipkan dari suatu sumber mengatakan, bahwa umur dari pengikut gerakan yang ditemukan pada umumnya berkisar antara 20 sampai 31 tahun.[86]

Dalam tahun 1926 kaum intelektual tidak lagi banyak memegang peranan yang berarti dalam gerakan itu, terutama akibat terjadi penangkapan-penangkapan yang sistematik dari pihak penguasa. Dari sekian banyak anggota gerakan, hanya sedikit saja dari mereka itu yang tamat sekolah menengah MULO dan beberapa orang guru-guru yang menderita miskin serta orang-orang yang putus sekolah turut ambil bagian dalam gerakan itu. Namun demikian, para pengikut gerakan, baik secara kuantitas maupun kualitas terus meningkat dengan cepatnya. Dan bahkan sejak ditingkatkannya propaganda gerakan secara besar-besaran, kegiatan komunis daerah ini ternyata telah menerobos jauh keluar wilayah Minangkabau, seperti Bengkulu, Palembang, Sumatera Timur, Jambi dan lain-lain.

Bilamana pada fase awal gerakan itu hanya mampu mendapatkan tempat pada lapisan sosial yang rata-rata sama, seperti para pegawai (personil jawatan kereta api dan dari lapisan pedagang kecil dan petani miskin di daerah Agam serta Pariaman), di daerah-daerah yang terbelakang secara ekono-

mis terutama seperti di Silungkang dan bagian pantai timur Danau Singkarak, pada periode kemudian (1926) anggota gerakan sudah mencapai hampir seluruh lapisan masyarakat dan meluas ke seluruh daerah di sekitarnya.

Akhirnya dapat pula dikemukakan bahwa kaum propagandis lokal yang paling banyak dijumpai antara lain ialah dari tukang-tukang ukur, tukang jahit, pedagang-pedagang grosir, pedagang-pedagang keliling tetapi juga dari penunggu *lepau* (warung), pokrol bambu dan orang-orang yang dekat dengan kehidupan desanya.[87]

Bagaimanapun juga, variasi latar belakang yang berbeda-beda itu juga mempengaruhi persepsi, sikap dan bentuk keterlibatan mereka dalam gerakan itu. Hal mana antara lain disebabkan oleh perbedaan-perbedaan latar belakang keluarga, umur, kemampuan, kesempatan, dan sebagainya. Kenyataan-kenyataan ini menentukan tingkat intensitas dan agresivitas dari orang-orang dalam gerakan ini. Selanjutnya ini juga mewarnai polarisasi atau perpecahan dalam kepemimpinan gerakan antara yang mendukung rencana pemberontakan dan yang menolaknya. Ini khususnya terlihat dari perpecahan antara kubu Padang yang lebih radikal dan sekuler dan kubu Padang Panjang yang lebih moderat dan agamis.

Sebagai akibatnya ialah rencana pemberontakan itu terkatung-katung. Kecuali karena perpecahan, sebagian juga disebabkan karena rencana pemberontakan itu sudah tercium lebih dahulu oleh mata-mata pemerintah. Maka untuk menjaga keretakan agar tidak lebih jauh, para pemimpin gerakan dengan bijaksana mencari dalih berkedok pertimbangan, bahwa tanggal 1 Mei harus dipandang sebagai hari besar revolusi kaum buruh sedunia yang pertama kalinya diperingati di negara ini. Sebab itu, mereka tidak mengingini adanya korban berjatuhan pada hari besar tersebut.[88]

Lebih jauh tampak bahwa gerakan komunis di tiga pusat utama di Sumatera Barat ini sangat berlainan satu sama lain. Di Padang Panjang, yang menjadi tulang punggung gerakan adalah para ulama dan murid-murid perguruan Islam, dan yang menjadi tokoh panutan mereka adalah Tan Malaka. Gerakan komunis di Padang memang mendapat dukungan para ulama dan perguruan-perguruan Islam, tetapi lebih mengandalkan diri pada komunitas pedagang — kendati di sini yang paling besar pengaruhnya adalah para saudagar besar. Selain itu, gerakan komunis di Padang lebih dekat hubungannya dengan para pemimpin PKI di Jawa ketimbang dengan para pemimpin di pusat-pusat gerakan komunis di daerah pedalaman Sumatera Barat. Di Silungkang khususnya, sebagaimana yang akan dilihat dalam bab tersendiri di belakang nanti, tokoh yang memelopori dan memimpin gerakan adalah para saudagar dan pengusaha kecil, tetapi mereka menjalin hubungan yang kuat dengan buruh-buruh tambang di Sawah Lunto, dan tetap berpedoman kepada kepemimpinan di Padang Panjang.

Catatan Akhir

[1] *Verslag van Bestuur en Staat van Nederlandsch-Indie, Suriname en Curaçao, 1924, Hoofdstuk C* (Gedrukt ter Algemene Land'sdrkkerij, 1924), p. 8. [selanjutnya disingkat dengan Koloniaal Verslag]. J. Th. Petrus Blumberger, *De Communsitische Beweging in Nederlandsch-Indie* (Haarlem: HD Tjeenk Willink & Zoon, 1941), p. 40. Harry J. Benda dan Ruth T. McVey (eds), *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents* (Ithaca: Cornell University Press, 1960), p. 116. [selanjutnya disingkat Key Documents].

[2] Untuk mendalami perkaitan awal antara PKI dan SI haruslah ditelusuri dari Sejarah SI itu sendiri yang kemudian perpecahannya menjadi organisasi yang berdiri sendiri. Lihat Umpamanya, Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism...*, terutama Bab III pp. 34 dst; Erick Hansen, "Marxism and imperialism: The Indonesian Policy of Dutch Social Democratic Worker Party (1984 -1914)," dalam *Indonesia, No. 16* (Oct. 1973), pp. 81-104.

[3] Keputusan ini ditetapkan pada kongres SI tanggal 6-10 Oktober 1921 di Yogyakarta, kemudian diperkuat lagi pada kongres bulan Februari 1923.

[4] HAMKA, *Kenang2-an Hidup* (Djakarta: Bulan Bintang, Tjetakan ke-3, 973), p.93.

[5] *Key Documnets*, p. 99.

[6] D.M.G. Koch. Om de Vrijheid. *De Nationalistische Beweging in Indonesié.* (Djakarta: Jajasan Pembangunan MCML 1950), p. 88.

[7] B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies* (The hague, Bandung: Sumur Bandung, 1960), p. 86.

[8] Perlu diketahui, sejak fase awal berdirinya, PKI telah mendapat pengaruh yang kuat dari Komintern (Komunis International), yang didirikan oleh Lenin dan Trotsky pada tahun 1919. Setidaknya sejak kongres istimewa pada tanggal 24 Desember 1920 PKI telah mengambil keputusan untuk berafilisasi dengan Komintern. Dengan begitu, PKI dengan sendirinya harus menyesuaikan sikap dengan kebijaksanaan yang digariskan Komintern. Tentang perkaitan PKI dengan Komintern lihat umpamanya, Richard C. Gripp, *The Political System of Communis* (New York, Toronto: California State Univ., Dod Meil & Co, (1973), pp. 4 dan 157; McVey, *The Rise of Indonesian Communism...*, pp. 71-72; Blumberger, *De Communistische Beweging....*, pp. 16-19.

[9] Lihat "De Inlandsche Beweging: Politieke Situatie, Onrust ter Sumatra's Westkust, dalam *Het Kolonial Weekblad, 51* (22 Desember 1932) Sejak diangkat menjadi wakil Ketua SI Pusat, dan juga sebagai anggota Volksraad, Abdul Muis sering mengunjungi Sumatera Barat dan dalam berbagai kesempatan ia telah mengecam pemerintah dengan lancang. Salah satu rapat terbesar yang diadakannya ialah di Padang pada tanggal 1 April 1923, yang dihadiri tidak kurang dari 38 orang penghulu pucuk dan kira-kira 1000 peserta dari masyarakat umum. Puncak kegiatan Abdul Muis di Sumatera Barat berakhir setelah rapat besar yang diadakan di Padang Panjang pada tanggal 4 November 1923 kemudian ia ditangkap pemerintah dan dibuang keluar daerah. Lihat *Kolonial Verslag 1924.....*, p. 8.

[10] Khusus tentang aktivitas Abdul Muis selama berkunjung ke Padang pada periode ini telah dibahas dengan baik oleh Taufik Abdullah, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in west Sumatra 1927-1933* (Ithaca: Cornell Univ. 1971), pp. 32-34; Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* (London, New York : Oxford Univ. Press, 1973), pp. 48-49, 119-192.

[11] Benda dan MacVey (eds.), *Key Documents...*, p. 100.

[12] Dalam kata-kata seorang tokoh komunis (Semaoen): "Saudara-saudara,

tidak mogok kita poenya nasib, ja tjelaka, mogok, ja tjelaka djoega, dari itoe baiklah kita mogok sadja, kalau-kalau kita akan dapat perbaikan nasib..." Contoh dari kasus pemogokan ini juga bisa dilihat dalam *Bendera Islam, No. 3* (Jogjakarta, 13 April 1923).

[13] Schrieke, *Indonesian Sosiological Studies*...., p. 86.

[14] Mengenai riwayat hidup dan karier Hadji Datuk Batuah lihat umpamanya, *Kolonial Verslag 1924*...., p. 5.; Taufik Abdullah, *School and Politics*..., p. 37, sedangkan mengenai riwayat hidup Natar Zainuddin dapat dikemukakan sebagai berikut. Dia lahir di Padang dan setelah tamat sekolah swasta di sana pada tahun 1903 ia kemudian pergi ke Aceh di mana ia bekerja sebagai kondektur kereta api. Pada tahun 1920 Natar Zainuddin menghadiri kongres "Vereeniging van spoor en Tramwegspersoneel" (VSTP) di Semarang. Selama kongres itu dia sempat bertemu dengan beberapa orang tokoh komunis seperti Bersgma dan Baars. Sebagai ketua sayap kiri, dia kemudian bekerja sama dengan PKI dan pada tahun yang sama menjadi anggota VSTP pusat mewakili anggota dari luar Jawa karena itu dia pernah beberapa kali hadir dalam kongres-kongres serupa yang diadakan di Jawa. Sejak itu dia mulai aktif menjadi propagandis PKI dan terakhir bekerja sama dengan Hadji Datuk Batuah di Padang Panjang setelah diusir dari Aceh.

[15] Bandingkan, Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement*....., pp. 47-48; HAMKA, *Ayahku: Riwayat hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perdjuangan kaum Agama di Sumatera Barat* (Djakarta: Penerbit Djajamurni, MCMLXVII), p. 131; Taufik Abdullah, *School and Politic*...., p. 37; *Blumberger De Communistische Beweging*...., pp. 40-41; McVey, *The Rise of Indonesia Communism*..., 174-175; *Kolonial Verslag 1924*..., p. 5; Surat Kabar *"Djago-Djago"*, (8 Oktober 1923).

[16] HAMKA, *Ayahku* ...., p. 131.

[17] Dalam kata-kata seorang bekas murid dan guru pada sekolah Thawalib, Hadji Zainal Abidin Ahmad: "...Perhatian terhadap politik di kalangan guru-guru dan murid-murid sekolah itu bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi sudah lama sebelum itu telah juga berjalan. Dapat ditunjukan dengan berbagai karangan-karangan dari guru-guru dan murid-murid Thawalib yang bercorak politik telah diterbitkan dalam banyak surat kabar atau penerbitan berkala lainnya, yang sudah banyak tersebar di Sumatera Barat..." Pernyataan ini adalah hasil wawancara dari Deliar Noer dengan yang bersangkutan, lihat Delier Noer, *The Modernist Muslim Movement*...., p.48.

[18] Di saat Hadji Datuk Batuah datang membawa masuk paham komunis itu ke dalam lingkungan sekolah Thawalib, kebetulan sekali terjadi kasus perpecahan di kalangan kepengurusan sekolah itu. Asal mulanya adalah

lantaran ketekoran keuangan dalam mencetak buku Pertimbangan Adat Alam Minangkabau, kemudian berakhir dengan munculnya rasa ketidakpuasan dan kebencian murid-murid dan juga beberapa orang guru-guru kepada pengurus itu, karena tidak bisa memberikan penjelasan yang bertanggung jawab kepada mereka. Masih ada lagi beberapa gejala lain yang menimbulkan ketidak puasan di kalangan murid-murid sekolah Thwalib. Lebih-lebih tidak lama sesudah itu dia terpilih sebagai Ketua Penasehat Organisasi Pelajar Sumatera Thwalib. Lihat Hamka, *Ayahku:*....., pp. 129-130.

[19] Dari laporan tokoh-tokoh PKI yang ditangkap terlihat posisi mereka dalam partai, khususnya di Padang adalah sebagai berikut: Magas (ketua) PKI dan SR Padang), A. Wahab (Sekretaris PKI Cabang Padang), Kaharoeddin (Komisaris PKI afdeeling Padang), MKA Gafoer (Sekertaris SR ?), Datuk Indo Kajo dan Datuk Machoedoen Sati (PKI Koto Laweh), Doeran, Ibrahim, Radjo Nan Kajo dan Bagindo Tan Sinar,. Djalaloeddin sekertaris SI "kaartjes merah" di Padang). *Doenia Achirat*, (5 Desember 1925).

[20] Lihat, Ruth T. Mc. Vey, *The Rise of Indonesia Communism*..., p. 175.

[21] Surat Kabar *Doenia Akhirat*, (Djum'at 13 Maret 1925).

[22] Dikutip dari *Key Documents*...., pp. 104-106. Tambahan itu datang dari jumlah anggota dari Padang (190), Padang Panjang (38), Solok (25), Silungkang (19) dan lain-lain anggota baru dari Dangung-Dangung, Suliki di Limapuluh Koto.

[23] Beberapa tokoh pemimpin-pemimpin PKI yang ditangkap menyusul setelah penangkapan Datuk Batuah antara lain ialah Magas (Ketua PKI dan SR Padang) , A. Wahab (Sekretaris PKI Padang), Kaharoeddin (Komisaris PKI afdeeling Padang), MKA Gafoer (Sekertaris SR), Datuk Indo Kayo dan Datuk Machoedoen Sati (PKI Koto Laweh), Doeran, Ibrahim, Radjo Nan Kajo dan Bagindo Tan Sinar, juga dari Koto Laweh. Djalaloeddin sekretaris SI "kartjes merah" (Padang) dan lain-lainnya. *Doenia Achirat*, (5 Desember 1925).

[24] *Key Documents*...., p. 106-7.

[25] *Ibid.*...., p. 107.

[26] Lihat Ruth T. Mc Vey, *The Rise of Indonesian Communism*..., p. 183.

[27] Sebagai contoh misalnya, beberapa orang tokoh komunis Padang seperti H. Muhammad Nur Ibrahim, A. Wahab dan Sutan Said Ali pernah menerima bantuan dana dari Rusia via CC PKI, sebanyak f. 300 (gulden) dan Basaruddin sebanyak f. 200 sebagai bantuan tiap tahun bagi organisasi. Arsip CC PKI No. 5 15 Februari 1925, sebagaimana dikutip dari *Key Documents*...., p. 106.

[28] Dikutip dari Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*....., p.155.

[29] Ibid. p. 98 Perintah Sutan Said Ali kepada Rum, propaganda di Delapan Koto, berbunyi sebagai berikut: Jika bicara dengan petani kamu harus bicara tentang tekanan pajak dan tenaga rodi pemerintah, bila kamu bicara dengan buruh bicaralah tentang upah dan pekerjaan mereka dan dengan para pedagang harus bicara tentang kemerosotan laba dan pajak-pajak. Ringkasnya, semua keresahan di kalangan penduduk harus dibangkitkan dan kalau perlu diambil tindakan-tindakan tegas tertentu....". Dikutip dari *Key Documents*..., p. 149.

[30] Sejak tanggal 1 Juni-31 Desember 1925 anggotanya yang bekerja sama dengan SR baru mencapai 660 orang antara lain dengan perincian sebagai berikut: Koto Lawas 101 (termasuk 36 anggota wanita), Solok 79, Payakumbuh 21 (dengan propagandis Baharuddin), Sungai Sarik, Pariaman 110, Lubuk Basung 114, Silungkang 25, Fort Vander Capellen 24, Ford de Kock 54, Muara Labuh 24, Sawah Lunto 49, Katjang, Solok 25, yang tidak terdaftar 6 orang sehingga jumlah yang sebenarnya terdaftar 880 orang.

[31] Susunan pengurusnya sampai periode bulan Februari 1925 adalah sebagai berikut : Hadji Muhammad Nur Ibrahim (ketua), Basjaruddin (sekretaris), A. Murad (Bendahara), sedang anggotanya ialah Baharuddin Saleh, Datuk Madjo Lelo (dari Sungai Sariak Pariaman), Tenek , Rustam, Remadja (Fort de Kock) dan Idroes (Solok).

[32] Gagasan ini dikemukakannya pada Kongres Komintern Ke V pada tahun 1924, kemudian diperkuat dengan konfrensi Kanton pada bulan Juni 1924 dimana wakil Indonesia dihadiri oleh Alimin dan Boedisoetjitro. Lihat, *Koloniaal Verslag 1927*..., p. 9.

[33] Gagasan ini dikemukakannya pada Kongres Komintern Ke V pada tahun 1924, kemudian diperkuat dengan Konferensi Kanton pada bulan Juni 1924 dimana wakil Indonesia dihadiri oleh Alimin dan Boedisoetjitro. Lihat, *Koloniaal Verslag 1927*..., p. 9.

[34] Syarat-syarat bagi seorang anggota SR untuk menjadi PKI setidak-tidaknya dalam teori adalah 1. tidak buta huruf dalam arti bisa tulis baca. 2. memiliki pengetahuan yang cukup tentang doktrin komunis. 3. berpengalaman atau pernah ikut dalam suatu organisasi. 4. mencintai kebenaran dan jujur. 5. disiplin 6. bersedia melaksanakan propaganda komunis. Lihat *De Locomotief* (30 Desembeeer 1924) ; Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*..., p. 91.

[35] Hadji Muhammad Nur Ibrahim pada Kongres Yogya itu hadir sebagai wakil utusan PKI Sumatera Barat, sedang Sutan Said Ali yang juga hadir pada kesempatan itu mewakili anggota CC PKI untuk daerah Sumatera Barat.

[36] Apa yang disebut dengan staf PKI seksi Padang adalah terdiri dari para anggota pengurusnya sebagai berikut: Zainun, bekas kondektur kereta api di Aceh (ketua), A. Wahab (sekretaris Bendahara), Hadji Muhammad Nur Ibrahim (anggota), Nurdin (juga bekas kondektur kereta api di Aceh, (anggota), Tibin (anggota). Sedangkan susunan staff PKI seksi Padang Panjang adalah Mangchudoen Sati (Koto Laweh), Ahmad Chatib (Koto Lawas), M.A.S. Perpatih (Koto Laweh), Abdul Aziz (Padang Panjang), Mahmud Sicincin (Padang).

[37] Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism*.... p.183; *Key Documents*...., p.107.

[38] Tentang gejala menjamurnya media cetak di Sumatera Barat telah dikupas dengan baik oleh B. Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat sebuah Sumbangan Bibliografi* (Djakarta: Bharatara, 1973).

[39] Sebagian besar surat kabar ini masih dapat ditemukan di Perpustakaan Museum Nasional Pusat, "Museum Gadjah" di Merdeka Barat, Jakarta.

[40] Serangkaian rapat-rapat yang diadakan itu, juga memberi kesempatan untuk pertemuan dengan kaum ibu seperti yang digerakkan di Paninjauan, Padang Panjang, sejak hari Rabu tanggal 11 November 1925. Kegiatan-kegiatan serupa dilaporkan dalam sumber *Key Document*..., pp. 107-108.

[41] Iktisar mengenai ini dibicarakan secara panjang lebar dalam, *Key Document*..., p. 108-112; Schrieke, "Het Sumatra's Weskust Rapport", dalam *Kolonial Tijdschrijft*, No. 7. (1928), p. 276.

[42] Hamka, *Ayahku* ..., p. 133.

[43] *Schrieke, Indonesian Sociological Studies*, p. 154.

[44] *Schrieke, Indonesian Sociological Studies*, p. 154.

[45] Hamka, *Ayahku* ..., p. 132.

[46] Schrieke, *Indonesian Sociologikal Studie*..., p. 88. salah seorang di antaranya ialah Sjamsuddin, seorang aktivis propogandis yang tadinya aktif di Langsa, Aceh, kemudian pindah ke Padang, di mana ia bekerja menggarap buruh pelabuhan di Teluk Bayur. *Key Document*..., p.108.

[47] *Key Document*..., p. 102.

[48] *Key Documents* ..., p.102.

[49] Schrieke, *Indonesian Sociological Studie* ...., p. 153.

[50] *Key Documents* p.106

[51] Di sini propaganda digerakan oleh Hadji Djala. Radjo Katjik, Limin dan Tajjib. Keempat tokoh ini memegang peranan dalam pemberontakan Silungkang nantinya. *ibid*.... p.102.

[52] Di sini propaganda dilakukan dibawah pimpinan Ahmad Latif alias

Bujang dari Padang Panjang dan Rusli alias Hamid alias Usman gelar Sutan Keadilan alias Dawud (bekas editor Surat kabar "*Nyala*". Dari tempat ini propaganda selanjutnya juga dilancarkan ke Palembang, tetapi, sebelumnya, yaitu kira-kira bulan Juli 1962, propaganda telah dilakukan juga oleh Sadaruddin, yang terakhir ini kemudian tertangkap dan kemudian digantikan oleh Mahmud. Schrieke, *Indonesian Sociological Studie* ...., p. 153. Juga *Key Documents*..., pp. 197-119.

[53] Di sini propagandisnya terkenal Abdul Hamid alias Hasan Karuni, berasal dari Pasar Rebo Padang Panjang. Kegiatan ini dilakukannya sambil menjadi guru Agama disana (di Baligo) antara Februari-Maret 1926. Sebelum itu, dia aktif dengan kegiatan propaganda di Sianok, Bukittinggi, *ibid.*

[54] Di sini propaganda dilakukan oleh Zainul Hasan dan Sutan Said Ali di mana mereka sengaja lewat disana sambil pulang balik ke Singapura, *ibid.*

[55] Di sini propaganda digerakan oleh Djalaluddin dari Terusan. Di Teluk lebih dari 40.000 penduduknya dari berasal Minangkabau, usaha propaganda digerak juga oleh Radjo Sampono dan Talaha gelar Sutan di Langit, keduanya dari Silungkang. *ibid.*

[56] Pernyataan politik komunis ini dalam memorandum resmi PKI, yang antara lain ditandatangani oleh tokoh inti anatra lain Sardjono, Winanata dan Boedisatjitro tertanggal 16 Desember 1925. McVey, *The Rise of Indonesia Communist*..., p.113.

[57] Tan Malaka telah membentangkan pandanggnya tentang bahaya dari tindakan-tindakan orang-orang komunis itu dalam buku kecilnya; Naar de Republiek Indonesia (Canton 1925), kemudian (Tokio 1925); Lihat juga *ikhtisar pandangan Tan Malaka dalam koran SI Bendera Islam* (14-21 April 1927); *Kolonial Verslag 1927*..., pp .10-15; *Key Documents*..., pp. 129-137, 149, 153-58.

[58] *Key Documents*..., pp. 159ff.

[59] Panas (5 Agustus 1925). Lihat juga J. Kreemer, "Het Sumatra' s Weskust Rapport ...", p 128; Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*,.... p. 160- 161.

[60] Nama-nama semboyan dan aliran yang mewakili kedua akses itu adalah bermacam-macam seperti yang dapat kita temukan dalam banyak pergerakan sosial tradisional pada umumnya. Archisme terdapat dalam *revivalisme, nativisme, tradisionalisme*, (gerakan kembali kepada kepribadian asli, karena itu keduanya, baik "archaisme" maupun " futurisme" adalah "utopis".

[61] *Encylopaedie van Nederlansch Indie II* (S Gravenhage Nijhorf, 1918), p.429

[62] J. Kreemer, "Het Sumatra's Weskust Rapport....." p. 282.

[63] Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*..., p 165.

[64] J. Kreemer, "Het Sumatra'a Weskust Rapport"..., p 282

[65] Ungkapan ini dikemukakan oleh Sjamsuddin SM, lihat *Doenia Achirat, No 13, tahun ke III* (30 April 1924); Lihat juga Schrieke, Indonesian Socilogical Studies ..., p. 166.

[66] Hamka, *Kenang2-an Hidup*...., p. 94. Lihat juga *Key Documents* ...., p. 113.

[67] *Key Documents* ...., p. 113. Not governed by people from foreign island It is only now are being rulled (by others) But the air is change every day....".

[68] *Key Documents*...., p 120

[69] *Ibid.*

[70] *Ibid.*

[71] Ruth T.Mc.Vey, *The Rise of Indonesian Communism*..., p.481

[72] Ia juga dibantu oleh beberapa orang stafnya antara lain, Tajjuddindari Air Hangat, Achmad (Indo-Kiling), Zainuddin gelar Sutan Palembang. Orang-orang ini siap melakukan kontak dengan pemimpin-pemimpin lokal yang membutuhkan senjata, misalnya dengan Radjab dari Fort de Koct dan Mohammad Jatim dari Padang.

[73] Khusus mengenai keahlian merakit bom di Padang dikenal nama Na'min. Bom itu dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada di daerah itu, sedangkan misiunya didatangkan diam-diam dari Batavia dan Surabaya. Sejak bulan Juni 1926, Sarun seorang tokoh komunis subseksi Silungkang telah menbawa bom itu dari Padang ke Silungkang.

[74] Jumlah senjata api yang terbanyak dikumpulkan gerakan adalah dari subseksi Pariaman, dimana pusat impor senjata gelap sudah lama berlangsung. Tetapi setelah pemerintah mengadakan operasi pembersihan terhadap peredaran-peredaran senjata gelap itu, jumlah senjata yang tersebar dalam 200.000 penduduk di daerah itu tidak begitu banyak.

[75] Lihat, *Kolonial Verslag 1927*....., p. 145

[76] J. Kremer, "Het Sumatra's Westkust Rapport .....", p. 281 ; *Schrieke, Indonesian Sosiological Studies*...., p. 148

[77] *Ibid.*

[78] Panas , 31 Desember 1925

[79] *Kolonial Verslag 1927*...., p. 12; Adapun nama yang diberikan pada organisasi gerakan "bawah tanah" itu diserahkan kepada pilihan masing-masing daerah, sebab itu apa yang disebut dengan "Syarekat Djin" atau "Syarekat Itam" itu adalah realisasi dari gagasan pembentukan DO di Sumatra Barat berdasarka Instruksi dari CC PKI pada akhir Maret 1926.

[80] *Deskripsi tentang peristiwa ini bisa dijumpai dalam Kolonial Veslag 1927*...., pp. 16-18.

[81] *Key Documents...*, p. 148

[82] C. Boterhoven de Haan, "Enkele Anntekeningan ophet Rapport van Ssumatra's Westkust" dalam *Kolonial Tijdschrift (1928)*, pp. 297-308 ; Schrieke, *Indonesian Sosiological Studies....*, p. 160

[83] Suatu studi yang baik dalam hubungan ini adalah karya WMF. Mansvelt, "Onderwijs en Comunissme" dalam *Koloniale Tijdschrift XII, deel I (1928)*, pp. 203-225. Penulis itu telah melakukan penelitian terhadap 1000 orang-orang komunis yang diinternirkan oleh pemerintah di Digul, Irian Jaya, sesudah pemberontakan tahun 1926/27.

[84] Frisko Wielenga, *Kommunistische Revoluttiepoging op Sumatra's Westkust* (Amterdam, 1976), p. 17.

[85] Schrieke, *Indonesian Sociological Studies....*, p. 133.

[86] *Key Documents ....* , pp. 152-153.

IV
Pemberontakan

Dalam dua bab terdahulu telah dijelaskan, bahwa kegiatan gerakan komunis di Sumatera Barat tidaklah berdiri sendiri. Di satu pihak ia tak terlepas dari perubahan-perubahan sosial ekonomi yang berlangsung cepat, dan di lain pihak juga berhubungan dengan perkembangan-perkembangan eksternal, yang terjadi di Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Oleh karena kebijakan pemerintah kolonial tidak menyediakan saluran-saluran yang wajar untuk merekayasa kekuatan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka terjadilah jalan buntu. Kebuntuan itu sebaliknya ditanggapi dengan kebijakan-kebijakan yang menindas, eksploitatif dan konfrontatif. Akibatnya masyarakat mencari jalannya sendiri. Ini terlihat jelas dari proses-proses emansipasi sosial yang ditandai dengan proses modernisasi, baik di bidang sosial-ekonomi, keagamaan maupun politik. Dalam hal yang terakhir ini, tidak ada kekuatan politik yang lebih efektif kecuali kaum pergerakan dari kalangan komunis.

Dengan kemampuan organisasi yang efektif, orang-orang komunis mampu mengemas aspirasi masyarakat ke dalam suatu gerakan emansipasi sosial yang semakin luas dan

semakin disadari, bahwa rakyat sedang ditindas oleh rejim penguasa kolonial alias pemerintah Belanda. Penyelesaian tiada lain, sejalan dengan resep komunis, ialah "revolusi".[1] Begitulah dengan dicetuskannya resolusi Prambanan tanggal 25 Desember 1925 tentang rencana "revolusi" menyeluruh di setiap daerah di Indonesia, gerakan komunis di Sumatera Barat khususnya mendapat legitimasi dan sekaligus saluran dari apa yang mereka dambakan selama ini. Untuk menunjukkan kesungguhan Sumatera Barat dalam mendukung program "revolusi", Ketua PKI Sumatera Barat, Sutan Said Ali ikut hadir dalam konferensi Prambanan, dekat Yogya bulan Desember 1925.[2]

Sebagaimana terbukti kemudian, resolusi Prambanan yang menetapkan rencana "revolusi" akan dilaksanakan tanggal 1 Mei 1926 tidak pernah dilaksanakan. Salah satu alasannya ialah terdapatnya sikap pro-kontra tentang resolusi itu, sehingga menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai.[3] Dalam bab ini kita akan melacak secara lebih dekat bagaimana perkembangan yang terjadi di Sumatera Barat paska resolusi Prambanan, sehingga mematangkan situasi ke arah pemberontakan Silungkang. Lebih penting lagi di sini akan dijelaskan mengapa konsentrasi aksi pemberontakan hanya terjadi Silungkang dan tidak di lain tempat?

1. Kondisi Umum Sebelum Pemberontakan

Sesudah menerima pembatalan resolusi Prambanan sekitar awal Mei 1926, pusat kegiatan PKI Cabang Sumatera Barat berpindah dari Padang ke Padang Panjang. Pertama karena Sutan Said Ali, PKI Cabang Sumatera Barat tertangkap di Medan tanggal 22 Mei 1926. Sebagai penggantinya naik Arif Fadillah, tokoh subseksi Padang Panjang. Namun perpecahan dalam tubuh partai di daerah ini, juga terjadi

karena alasan-alasan pribadi. Kubu Padang Panjang yang lebih berorientasi Islam sudah lama tidak menyukai pribadi Sutan Said Ali karena ia dikabarkan memiliki hubungan gelap, hidup bersama (*samenleven*) dengan seorang perempuan bernama Umi. Karena alasan itu, maka kubu Padang Panjang dan subeksi Solok, Sawah Lunto dan Silungkang sudah lama tidak mempercayainya. Sejak Februari 1926 keempat subseksi ini secara bersama-sama berupaya mem*bypass* kepemimpinan Sutan Said Ali.[4]

Kubu Padang Panjang mengutus Sarun ke Batavia mewakili kubu mereka untuk menjelaskan kedudukan organisasi di daerah. Diperkuat oleh surat *semi-official* dari Idrus, tokoh komunis Solok, kepada Komite Sentral (CC) PKI, ia dan "kawan-kawan" membela sikap pembangkangan mereka terhadap Cabang Padang. Walaupun CC PKI secara tegas menolak sikap kelompok indisipliner partai ini dan sebaliknya "hanya mengakui perwakilan Cabang Padang di bawah kepemimpinan dan tanda-tangan Sutan Said Ali," kubu Padang Panjang jalan terus tanpa rekomendasi pusat.[5]

Dengan tertangkapnya Sutan Said Ali bulan Mei, dan pindahnya kepemimpinan Cabang dari Padang ke Padang Panjang, maka terbukalah peluang untuk menyatukan kembali sikap politik partai di Sumatera Barat. Para pemimpin di Padang Panjang, dalam hal ini tidak keberatan dengan rencana baru dan taktik "massa-aktie" untuk menyiapkan "pemberontakan" terbuka melanjutkan resulosi Pambanan yang gagal itu. Namun kepatuhan Arif Fadillah terhadap sikap Tan Malaka, yang berada di Singapura menimbulkan persoalan baru. Tokoh ini sudah lama dikenal sebagai tangan kanan Tan Malaka di Sumatera Barat. Wibawa Tan Malaka di kampung halamannya, Minangkabau, tampaknya melebihi otoritas kemimpinan partai di pusat, Bandung dan Batavia.

Untuk meminta pandangan-pandangan Tan Malaka dan sekaligus meminta kesediaannya untuk mendukung rencana baru untuk melaksanakan aksi "revolusi", beberapa orang diutus ke Singapura. Dengan membawa sepucuk surat dari Arif Fadillah, Ketua seksi Sumatera Barat, berangkatlah Zainun gelar Radjo Merah,[6] bersama empat orang utusan lainnya ke tanah jajahan Inggris itu. Pada tanggal 10 September 1926, mereka sudah sampai di sana, tetapi baru dua hari berikutnya mereka dapat bertemu dengan Tan Malaka.[7]

Sebagaimana diketahui, sikap Tan Malaka sudah jelas. Sejak semula ia menolak resolusi Prambanan dan sekali lagi, saat ditemui utusan komunis Sumatera Barat, ia tetap bertahan pada prinsipnya yang lama dalam arti tidak mendukung sama sekali rencana "revolusi" yang dirumuskan Alimin, Muso, dan kawan-kawannya. Menurutnya persiapan pemberontakan sangat prematur, belum matang (*de tijd nog niet rijp*),[8] baik teoritis maupun praktis. Pendiriannya ini sudah dikemukakan secara lisan kepada Aliarcham dan Alimin, dua tokoh CC PKI yang merancang resolusi Prambanan sebelumnya, saat keduanya datang menemuinya di Singapura Fabruari 1926. Tan Malaka sudah menegaskan bahwa suatu "revolusi yang sesungguhnya" (*true revolution*) tentunya tidak menggantungkan bantuan dana dari luar negeri, tetapi kawan-kawan CC PKI dalam "resolusi" Prambanan justru mengharapkan bantuan dana dari Rusia. Rencana pemberontakan itu adalah sebuah *putsch*, suatu tindak kekerasan politik yang ceroboh, kurang perhitungan. Ketergantungan terhadap dana dari luar negeri itu sendiri sudah merupakan pertanda sisi kelemahan yang fundamental. Uang memang diperlukan, tetapi persoalan utama, menurut tesis Tan Malaka, ialah bahwa suatu revolusi yang murni dimatangkan oleh situasi di seluruh negeri dan oleh kematangan organisasi gerakan itu sendiri.

Jika kedua butir ini sudah matang, maka "sejarah toh sudah mengajarkan kita", demikian Tan Malaka, bahwa soal uang menjadi nomor dua dan dengan sendirinya biaya bisa diperoleh dari dalam negeri sendiri.[9]

Namun itulah masalahnya. Berkenaan dengan argumennya di atas, maka sejauh pengamatan Tan Malaka, tak nampak tanda-tanda "aksi-massa" di Jawa, baik dalam aksi-aksi mogok massal maupun demonstrasi umum. Juga tidak ada gerakan-gerakan rakyat di bidang ekonomi dan politik seperti di India, Shanghai atau di Jerman. "Sejauh massa masih takut terhadap tentara dan polisi, semua ikhtiar ke arah revolusi akan mengalami kegagalan", tambahnya. Menyadari gerakan komunis (PKI) masih relatif muda di negeri ini, maka tidak heran jika aksi propaganda gerakan masih rendah dan belum menjangkau seluruh pelosok negeri. Dengan kata lain, "selaku orang Marxist kita tak mungkin membangun spirit radikalisme atas arahan beberapa orang tokoh di Seksi PKI saja, tetapi tidak didukung oleh keterlibatan dan tanggungjawab kelompok kiri dan kanan sekaligus."

Sesungguhnya ada banyak hal yang disarankan Tan Malaka agar CC PKI di Jawa terlebih dulu mematangkan persiapan sebelum mengambil tindakan sebagaimana yang diajarkan dalam teori revolusi Marxisme. Semua ini tampaknya tidak diindahkan lagi oleh kawan-kawan di Jawa seperti Budisutjitro, Subakat, Winata dan Muso sendiri. Sejak akhir 1925, mereka mulai keranjingan dengan bayangan (utopia) keberhasilan "revolusi", tetapi tidak realistis dengan persiapan.

Sekali lagi, Tan Malaka memaparkan pendiriannya kepada utusan komunis dari Sumatera Barat yang datang menemuinya di Singapura dan mereka tampaknya dapat menerima baik pandangan-pandangan Tan Malaka di Singapura

itu. Sebelum kembali ke Sumatera Barat Tan Malaka masih sempat menyarankan agar mereka mendiskusikan kembali pendiriannya dengan Arief Fadhillah di Padang Panjang. Sebaliknya utusan Sumatera Barat ikut mendukung saran atas kesediaan Tan Malaka mendirikan Komite Sentral yang baru dengan pusatnya di Penang dan beliau sendiri sebagai pemimpinnya.[10]

Sementara itu di Jawa telah terjadi perkembangan-perkembangan baru. Terkumpul beberapa orang pemimpin komunis di Jawa, yang menjadi pendukung fanatik resolusi Prambanan, seperti Sukrawinata, Herujuwono, Samudro, Supardjo (dari Jawa) dan sebagian anggotanya berasal dari Sumatera Barat seperti Baharuddin Saleh,[11] Mahmud Sitjintjin,[12] Bakar, Dahlan,[13] Kamiri dan Hamid Sultan, termasuk kelompok "Komite Revolusioner". Artinya kelompok yang kecewa dengan gagalnya resolusi Prambanan. Untuk menuntaskan gagasan mereka akan revolusi, didirikanlah apa yang mereka namakan "Komite Penggalang Indonesia." Komite itu dipimpin oleh ketua terpilih Baharuddin Saleh dan secara organisatoris berada di luar program Komite Sentral PKI. Tujuan Komite itu, sesuai dengan namanya, ialah untuk menggalang aspirasi bagi percepatan jalannya revolusi. Komite itu sekaligus merupakan tindak-lanjut dari rencana revolusi Prambanan yang gagal sebelumnya. Komite itu bertindak di luar wewenang Komite Sentral, dan untuk merealisasikan ide-ide Komite, mereka mengirim anggota ke seluruh seksi-seksi partai di daerah guna mencari dukungan bagi rencana baru mereka itu.

Utusan ke Sumatera Barat langsung di bawah komando Baharuddin Saleh. Pada tanggal 8 Oktober ia dan kawan-kawan telah sampai di Padang dan seterusnya menuju Padang Panjang. Setelah mengadakan kontak-kontak pribadi,

Baharuddin akhirnya bisa bertemu dengan sejumlah tokoh di daerah, tetapi gagal untuk meyakinkan Arif Fadillah terhadap rencana baru Komite yang dipimpinnya itu. Kepatuhan kaum komunis Sumatera Barat terhadap sikap Tan Malaka tidak hanya mencerminkan wibawa tokoh kharismatik itu di kampung halamannya, Minangkabau, tetapi juga alasan-alasan yang secara teoretis dan masuk akal membuat mereka mengambil garis Tan Malaka. Tampaknya setelah kembali dari Singapura mereka langsung mengoordinasikan diri dan bertekad untuk membina kontak secara teratur dengan Tan Malaka di Singapura.

Karena itu, tidak heran jika mereka tidak mau mengambil resiko apabila rencana baru dari Komite Baharuddin benar-benar dilaksanakan. Apalagi berada di luar wewenang kepengurusan komite sentral. Baharuddin Saleh sebaliknya, meskipun kecewa karena gagal dalam meyakinkan Arif (pimpinan seksi Padang Panjang dan tangan kanan Tan Malaka), tidak mau putus asa manakala secara diam-diam ia terus berupaya meyakinkan sejumlah tokoh di jajaran yang lebih rendah di beberapa tempat. Berbekal keyakinannya akan rencana revolusi, ia akhirnya berhasil mempengaruhi beberapa orang tokoh dari sejumlah subseksi, termasuk di antaranya tokoh-tokoh seperti Hadji Muhammad Nur Ibrahim (dari subeksi Padang), dan Zaini (Padang Panjang) serta Alimin (sekretaris dari subseksi Silungkang).

Menjelang meninggalkan daerah Sumatera Barat, Baharuddin masih sempat menitip dua buah pesan penting kepada orang-orang yang berhasil dipengaruhinya. *Pertama*, memerintahkan kepada orang-orangnya agar terus-menerus berupaya mencari dukungan dari anggota subseksi yang lain dan pada saat yang sama ia juga mengingatkan agar jangan bosan mendekati Arif Fadillah sampai ia merubah pendirian-

nya. *Kedua*, tentang penentuan kapan saat yang tepat untuk memulai aksi pemberontakan dijanjikan akan menyusul nanti lewat berita telegram dari Batavia. Pesan ini kemudian betul-betul dijalankan oleh orang-orangnya dari subseksi Padang dan Silungkang yang berhasil dipengaruhi oleh Baharuddin.

Prakondisi yang menjadikan Silungkang sebagai pusat aksi pemberontakan tidak hanya didukung oleh kondisi-kondisi umum yang telah dijelaskan pada uraian pada bab 2 terdahulu, tetapi juga beberapa kondisi khusus yang memberi cukup peluang bagi meletusnya api pemberontakan itu di sana. Bagian berikut ini akan melacak secara lebih khusus bagaimana Silungkang akhirnya digiring ke situasi pemberontakan.

2. Radikalisme Gerakan di Silungkang

Silungkang hanyalah sebuah nagari yang kecil saja untuk ukuran nagari Minangkabau pada umumnya. Pada tahun 1920-an, nagari itu dihuni oleh sekitar 300 rumah tangga. Namun anak nagarinya tergolong maju dibandingkan dengan kebanyakan nagari di sekitarnya. Pada masa kolonial, nagari ini merupakan salah satu nagari di kawasan *Onderafdeeling* Sawah Lunto, sekitar 105 km dari Padang. Jarak antara Silungkang dan Sawah Lunto, ibukota *Onderafdeeling* (kecamatan) hanya sekitar 6 km saja. Seperti halnya dengan Sawah Lunto, kota tambang batubara tertua yang sudah dibuka sejak akhir abad ke-19,[14] Silungkang juga terletak di lembah perbukitan yang sempit, yang melingkar-lingkar secara sambung menyambung di antara gugusan bukit barisan di Sumatera.

Kebanyakan rumah penduduk didirikan di lereng-lereng bukit yang membentuk dinding-dinding alam di kedua sisi kenagaraian itu. Rumah-rumah ini, sebagaimana umumnya rumah adat Minangkabau dibangun dengan arsitektur "bagonjong" mirip tanduk kerbau, panjang dan besar, yang

dihuni oleh beberapa keluarga. Di tengah-tengah lembah yang sempit itu, hanya sedikit terdapat dataran, yakni antara rel kereta api dan jalan raya kampung. Di sanalah terdapat sebuah "pekan" (pasar) dan sebuah stasiun kereta api dan kantor pos pembantu. Rumah-rumah penduduk yang agak modern, sebagian bertingkat dan terbuat dari batu juga dapat ditemukan di sekitar pasar. Sebuah sungai kecil mengalir sejajar dengan alur rel kereta api, yang menghubungkan Sawah Lunto dan Padang via Solok dan seterusnya ke Padang Panjang, kota dingin di dataran tinggi yang sekaligus merupakan pusat pendidikan Islam terkemuka sejak awal abad ke-20. Di kota ini terdapat stasiun besar kereta api yang melayani penumpang dan barang ke tiga jurusan yang berbeda: ke Bukittinggi, atau ke Padang dan ke Sawah Lunto. Pada tahun 1920-an, jalan raya untuk kendaraan oto langsung dari Silungkang ke Padang belum tersedia selain kereta api.

Karena terletak di lintasan satu-satunya jalan yang menghubungkan antara kota tambang Sawah Lunto dan Padang, ibukota Karesidenan Sumatera Barat, Silungkang memperoleh manfaat yang besar dari jasa jalan kereta api yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk pengangkutan batubara dari tambang Ombilin ke Teluk Bayur di pantai barat Sumatera. Akses ini menjadi lebih penting bagi penduduk Silungkang, terlebih lagi karena bentang alamnya yang berbukit-bukit tandus dan kurang subur tanahnya, tidak memungkinkan penduduk untuk mengembangkan lahan pertanian secara leluasa. Sebagai akibatnya, kebanyakan anak nagari bergiat di luar sektor pertanian, menjadi pedagang atau pengrajin, di samping pergi merantau. Kerajinan anyaman dan industri rumah tangganya, khususnya kain "tenun Silungkang" sudah sejak lama termasyhur. Dan pada tahun 1920-an, perusahaan-perusahaan dagang bergengsi milik orang Silungkang

seperti "Sulaiman Labai & Zoon", "Datuk Sati & Co.", "Mochtar & CO." dan lain-lain sudah memasang iklan produk khas Silungkang di koran-koran Padang dan Betawi. Mereka memiliki kantor besar di pasar Silungkang dan cabangnya terdapat di Padang, Betawi dan Surabaya.[15]

Kehadiran perusahaan tambang di Ombilin, Sawah Lunto memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat Silungkang. Paling tidak jalan kereta api yang melewati nagari itu mempermudah hubungan ke luar untuk berbagai keperluan: berdagang, atau untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak muda. Kendati masyarakatnya relatif terbuka dan terbiasa berhubungan keluar, orang Silungkang terkenal teguh memegang adatnya. Terutama adat kawin-mawin dengan kelas yang berbeda jarang sekali terjadi. Apalagi dengan orang di luar Silungkang, dari kampung berdekatan sekali pun. Bila ini terjadi, maka yang bersangkutan pastilah dibuang sepanjang adat, biasanya tidak diperbolehkan tinggal di kampung. Tak banyak nagari Minangkabau yang dikenal keras dengan adat kawin-mawin semacam ini, selain Silungkang. Barangkali perlu juga disebutkan nama nagari Kota Gadang di Bukittinggi.

Yang banyak menderita karena adat lama pusaka usang ini tentunya kaum perempuan. Kata orang "banyak gadih tuo tak balaki" (gadis tua tak bersuami). Kaum lelaki boleh dan banyak yang berpoligami, tetapi mereka ini umumnya tinggal dan kawin di perantauan. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kaum perempuan — dalam kasus Silungkang, dan mungkin juga di Koto Gadang, tidak memperoleh perlindungan dari adat yang matrilineal. Kepemilikan lahan sebagai harta pusaka warisan di tangan perempuan cukup memberi jaminan kehidupan rumah tangga mereka, tetapi di Silungkang, lebih daripada itu, kehidupan sosial ekonomi mereka cukup kuat.

Usaha tenun umumnya dikerjakan oleh perempuan. Rata-rata rumah tangga orang Silungkang menjalankan usaha industri rumah tangga ini.

Kemajuan anak nagari ini di bidang perniagaan rupanya juga berpengaruh terhadap cara berfikir mereka yang lebih maju daripada kebanyakan nagari di sekitarnya. Ini antara lain tampak dari cara pandang masyarakat pedagang yang biasanya lebih berorientasi keluar (*outward looking*), dan yang menjadi dasar pandangan hidup kaum perantau umumnya. Lebih penting lagi, karena sebagian besar penduduk bekerja di luar sektor pertanian, mereka ini membentuk semacam kelas sosial yang relatif terbebas dari ikatan tradisi adat yang cenderung diciptakan untuk masyarakat agraris yang berbasis pada kepemilikan tanah. Pemikiran dan aliran-aliran baru dalam pergerakan tampaknya mudah diserap oleh kelompok ini.

Adalah kelas pedagang ini pula yang mula-mula menerima masuknya organisasi gerakan Sarikat Islam (SI) Silungkang sejak 1915. Tokoh-tokohnya dan anggota yang mula-mula berasal dari kelompok pedagang. Termasuk di antaranya Sulaiman Labai, ketua SI yang juga menjadi pemilik perusahaan tenun "Sulaiman Labai & Zoon", dan Datuk Bagindo Ratu dan Talaha Sutan di Langit adalah kelompok pedagang. Kegiatan SI di nagari itu cukup maju pula. Pada tahun 1918 kelompok SI Silungkang mengadakan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah kolonial. Pasalnya, sehabis Perang Dunia I (1918), bahan makanan, beras menjadi sulit. Untuk mengatasi kekurangan beras, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan penghematan melalui "ingkrimping" (Belanda: *inkrimpingen* = penciutan) tenaga kerja tambang dan mengeluarkan peraturan yang melarang penduduk mengangkut beras dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemerintah. Akibatnya semakin banyak pengangguran dan krisis

bahan pangan. Yang terakhir ini lebih dirasakan oleh rakyat Silungkang karena kebutuhan beras didatangkan dari luar.

Di mata rakyat Silungkang kebijakan itu tampak sekali pilih kasih, sebab Belanda sibuk mengangkut beras untuk kebutuhan tambang di Sawah Lunto, tetapi sangat kurang sekali jatah untuk Sawah Lunto. Kebijakan pemerintah yang tidak adil ini membuat aktivis SI Silungkang bertindak. Radikalisme pergerakan Silungkang mendapat sambutan di bawah kepemimpinan Sulaiman Labai. Ratusan anggota SI menghentikan kereta api di stasiun Silungkang. Saat kereta api memasuki stasiun, dua gerbang kereta berisi penuh karung beras dibongkar paksa, setelah mengancam masinis dan kepala stasiun dengan todongan senjata tajam sambil menyodorkan tanda terima (kwitansi) dari kepala stasiun, berikut sebuah pernyataan dari SI Silungkang. Dalam surat kecil itu dinyatakan bahwa SI Silungkang bertanggungjawab atas peristiwa pembongkaran itu. Tindakan itu diambil semata-mata hanya karena alasan keadaan darurat, yakni bahaya kelaparan yang mengancam rakyat Silungkang akibat krisis beras.

Namun apapun alasannya, ia dan sejumlah tokoh SI Silungkang harus berurusan dengan yang berwajib. Hanya dua jam setelah peristiwa di stasiun Silungkang itu, Kontrolir Sawah Lunto dengan konvoi *veld-politie* (polisi lapangan) datang ke tempat kejadian (sekitar 6 km dari Sawah Lunto) untuk mengambil beras yang disita orang-orang SI dan untuk menghukum pelakunya. Saat Kontrolir sampai di stasiun, beras itu ternyata telah habis dibagi-bagikan kepada rakyat dan segera setelah mendapat bagian, mereka pulang ke rumah masing-masing. Hanya pengurus yang tetap tinggal di stasiun. Mereka rupanya sudah memperkirakan akan menimpa diri mereka dan untuk siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Untunglah hanya dua orang pemimpin gerakan saja yang

ditangkap: Sulaiman dan Datuk Bagindo Ratu dibawa ke Sawah Lunto dan ditahan selama tiga hari, kemudian dilepaskan kembali.

Peristiwa di stasiun Silungkang itu ikut menaikkan citra tokoh dan organisasi pergerakan SI. Sejak itu cerita tentang kepahlawanan kaum pergerakan menjadi buah bibir masyarakat. Dalam tempo singkat hampir semua orang Silungkang jadi anggota SI. Pada tahun 1924 Sarekat Islam Silungkang melebur ke dalam Sarekat Rakyat. Walaupun organisasi Sarekat Rakyat jelas-jelas merupakan "onderdeel" PKI, tetapi dalam persepsi rakyat Silungkang waktu itu, kehadiran Sarekat Rakyat cenderung terkait dengan SI, khususnya SI Merah dan bukan PKI. Dokumen-dokumen pergerakan tak pernah menyebut organisasi mereka dengan PKI, kecuali dokumen Belanda, yang selalu menghubungkan PKI sebagai kelompok ekstrimis yang berbahaya.

Bagi mereka tak peduli apakah Sarekat Rakyat atau SI merah itu komunis atau bukan. Yang penting cita-citanya mulia, ialah pembela kepentingan orang banyak dan tokoh-tokohnya juga orang beragama dan menjalankan syariat Islam. Gerakan menentang kekuasaan kolonial perlu didukung dan di mana perlu mesti terlibat langsung di dalamnya. Sebab kalau kekuasaan sudah berada di tangan "kita", orang Indonesia, tidak ada lagi beban pajak atau peraturan-peraturan yang memberatkan rakyat. Karena itu banyak orang Silungkang yang bergabung menjadi anggotanya. Anggota Sarekat Rakyat atau SI Merah memiliki kartu anggota berwarna merah. Sekitar pertengahan 1926, jumlah anggotanya, menurut pengakuan Mohammad Jusuf gelar Sampono Kayo, berjumlah 1140 orang, tetapi jumlah itu agaknya termasuk anggota dari nagari-nagari di sekitarnya.[16]

Setelah SI yang lama meleburkan diri ke dalam Sarekat

Rakyat atau SI Merah Silungkang, tokoh-tokoh SI yang lama juga ikut meleburkan diri sebagai pemimpinnya. Mereka antara lain ialah Sulaiman Labai, M. Joesoef gelar Radjo Ketjik dan Datuk Bagindo Ratu serta Mohamad Jusuf gelar Sampono Kayo, pedagang kaya memiliki tiga oto sewaan dan sebuah rumah bertingkat, disebut "rumah tinggi" di pasar Silungkang. Selain itu terdapat sejumlah tokoh propagandis yang gigih dan intelek seperti Taib, Limin (atau Alimin), Talaha gelar Rajo Sampono, Nawawi Arif (di Sawah Lunto), Pakih A'in (atau Buya Pakih Berahim), Salim Emek dan Abdul Muluk. Tokoh propagandis yang paling terpelajar agaknya ialah Datuk Sinaro Chatib, seorang penghulu yang menjadi sekretaris Sarekat Rakyat Silungkang waktu itu. Koleksi bukunya mencapai lebih 1000 buah dan sebagian karya terjemahan dari bahasa Eropa dan Cina. Banyak pemuda yang memanfaatkan taman bacaan tokoh Sarekat Rakyat itu. Di antaranya ialah pemuda Abdul Muluk, salah seorang kader berusia 18 tahun.[17]

Industri tambang batu-bara tampaknya menjadi sumber persoalan. Di sana kaum kulit putih berkuasa. Dalam kata-kata kaum propagandis, perusahaan itu *harus dikitakan* (menjadi milik kita). Kata-kata itu memberi tekanan pada kesadaran bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. "Tanah ini adalah milik kita dan selamanya menjadi milik kita, tetapi mengapa justru orang lain yang mengeruk keuntungan daripadanya".[18] "Siapakah yang memiliki rumah-rumah bagus dan gaji yang besar? Siapa yang harus puas menerima kedudukan sebagai bawahan, jongos di negerinya sendiri? Demikian pidato para propagandis dalam menggugah anggotanya. Di sini lagi-lagi perasaan *inferior* pribumi dibangkitkan dengan cerdas untuk mendapatkan efek melawan rejim pemerintah. Bagi kaum propagandis, nasib pribumi hanya mungkin dirobah atau diperbaiki apabila

pemerintahan di tangan sendiri. Kalau sudah merdeka tidak ada lagi pajak yang memberatkan rakyat, pedagang mudah mendapatkan barang, kaum perempuan yang bekerja sebagai penenun dapat memperoleh benang secara gratis.[19]

Radikalisme kaum pergerakan menemukan amunisi sosial di Silungkang. Dari sanalah jaringan propaganda ke seluruh lini digerakkan. Para propagandis gerakan, mengikut ajaran Marxisme, membangun jaringan dengan sistem sel. Organisasi partai dipecah-pecah ke dalam unit-unit yang lebih kecil dan disusupkan ke dalam pelbagai jenis perkumpulan: sarekat sekerja, perhimpunan politik, pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, desa-desa dan kampung-kampung.[20] Masing-masing anggota secara vertikal dan horizontal tidak mengenal intim anggotanya kecuali seorang atasan dan bawahan dengan sistem informasi berantai. Di Silungkang dan demikian juga di daerah lain di Sumatera Barat dikenal dengan "kelompok nan sepuluh", di mana masing-masing kelompok kecil yang berjumlah tidak lebih 10 orang itu melakukan kontak-kontak teratur untuk "kursus lima menit", suatu istilah untuk saling menyampaikan pesan-pesan atau isu-isu propaganda mengenai berbagai hal, termasuk informasi tentang kemajuan gerakan.[21]

Media yang paling efektif ialah surat kabar bulanan *Panas* dan *Soeara Tambang*, keduanya bermarkas di Sawah Lunto, tetapi pengolahan redaksi *Panas* khususnya kadang-kadang dilakukan di Silungkang dan pencetakannya di Padang. Kedua koran itu sangat populer dan mencapai oplag 10.000 eksemplar dengan pelanggan dari seluruh kota-kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar sampai ke kampung-kampung tertentu di Sumatera Barat.

Berita yang dimuat dalam kedua koran itu tak hanya menyangkut kehidupan sehari-hari, tentang ketimpangan-ketimpangan sosial dan perlakuan tidak adil dari kaum Ulando

(Belanda), tetapi juga memuat berita politik tingkat tinggi. Mungkin sulit dibayangkan bagaimana sebuah surat kabar ukuran kampung seperti *Panas* No. 4 (1926) merasa perlu menulis Tajuk Rencana "Sediakan Payung Sebelum Hujan", yang membahas perselisihan antara Inggris dan Jerman dalam memperebutkan ladang minyak di Mosul, Irak yang waktu itu masih merupakan wilayah kekuasaan Turki. Tajuk rencana itu menggambarkan kerakusan kaum kapitalis dan bencana itu juga sedang mengancam "di sini" (maksudnya di tanah air). Tajuk Rencana itu pula yang mengakhiri riwayat *Panas* karena segera setelah empat kali terbit langsung dibreidel oleh penguasa dan pimpinan redaksinya dikenakan delik pers, menghasut. Koran *Soeara Tambang*, yang merupakan organ Sarekat Rakyat untuk buruh tambang di Sawah Lunto sekali waktu pernah mengekspose berita tentang ditemukannya kodok dalam rangsum (makanan) buruh tambang di Sawah Lunto.

Selain itu, para propagandis gerakan juga masuk ke dalam jaringan guru-guru agama yang memberikan pengajian di masjid-masjid di kampung-kampung. Tokoh yang populer, di antaranya termasuk Pakih A'in atau Pakih Berahim (Ibrahim?) dari Padang Sibusuk, penceramah agama tamatan sekolah agama terkemuka, Parabek. Ia dikenal sebagai ustadz yang dalam ilmu Islamnya dan ke mana ia pergi pasti dikenal orang kampung sebagai guru yang dihormati karena selain alim juga pandai memberikan pengajian. Lewat khotbah-khotbah Jum'at ataupun dalam wirid pengajian yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu, ia mampu memaparkan gagasan "perjuangan kelas" dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam masyarakat dengan mudah dapat diekploitasi secara efektif oleh para propagandis Sarekat Rakyat. Perusahaan tambang

batu-bara Ombilin di Sawah Lunto, selain menggunakan areal tanah milik penduduk, juga memperkenalkan sistem penyewaan tanah, pengupahan tenaga kerja dan perburuhan. Terdapat petunjuk-petunjuk yang kuat, bahwa hubungan sewa-menyewa dan upah kerja yang rendah dan pengerahan kerja-paksa di perusahaan Barat itu sering menimbulkan ketidak-puasan di kalangan masyarakat luas. Terutama karena pembayaran upah dan ganti rugi yang kecil dan eksploitasi tenaga kerja murah.[22]

Kondisi logis pada saat itu menunjukkan bahwa penduduk berada pada pososi yang dirugikan, tidaknya dalam penghadapannya dengan sistem kolonial tetapi juga dengan adat lama. Kelompok kelas bawah yang berdomisili di sekitar Silungkang, termasuk di Muara Kelaban, Padang Sibusuk, Sawah Lunto, pada umumnya adalah para buruh penggarap ladang-ladang milik kelas aristokrat adat (penghulu) Silungkang.[23] Secara sosial-ekonomi posisi mereka lemah. Pada mulanya kaum pergerakan yang didukung oleh kelompok pedagang itulah yang mulai memberontak melawan hak "previleges" golongan aristokrat adat itu. Terutama dalam hal upacara kenduri di kalangan mereka, pembatasan perkawinan antar suku yang tidak sederajat, penguasaan atas pemilikan tanah dan seterusnya.[24] Keadaan ini kemudian dimanfaatkan secara sistematis oleh kelompok Sarekat Rakyat dengan menggunakan slogan "perjuangan kelas," sehingga semakin matang dan makin disadari.

Belakangan, kelompok aristokrat adat (penghulu) telah mendirikan dengan apa yang disebut "SI Putih". Lalu kemudian mereka tidak menukai dan menentang propaganda kelompok "SI Merah". Namun pertentangan ini hanyalah merupakan permunculan dari pertentangan lama yang berpijak pada kerangka perbedaan basis sosial dan material antara kaum peng-

hulu yang berbasis pada masyarakat tani dan tanah, dan kelas menengah baru yang berbasis kekotaan, dagang dan buruh. Di Padang dan Padang Panjang, pertentangan itu muncul dalam bentuk lain. Di sana isu pertentangan mencuat antara Kaum Muda (modernis Islam) dan Kaum Tua (Islam ortodok) dan di Jawa pertentangan itu berakar dari pertentangan antara SI Merah (Semarang) dengan SI Putih (Yogyakarta).

Namun dikotomi semacam itu agakanya terlalu digeneralisasikan, karena di antara keduanya juga terdapat nuansa tumpang tindih. Di Silungkang misalnya ada banyak datuk-datuk (penghulu) yang bergabung dengan SI Merah alias Sarekat Rakyat seperti Datuk Bagindo Ratu dan sejumlah golongan menengah lainnya seperti golongan ulama, para haji, dan tokoh masyarakat umumnya. Begitulah kemudian apa yang disebut sebagai "SI kartu merah" di Silungkang dengan Sarekat Rakyat sebagai onderdeelnya, semakin lama semakin dominan.

Kondisi-kondisi logis akibat pertentangan adat lama dan ketidakpuasan yang bersumber dari industri tambang di Sawah Lunto, serta ditambah oleh tekanan-tekanan yang muncul akibat pengaruh pertumbuhan perdagangan atau sistem ekonomi baru, sebagaimana diuraikan dalam bab dua di muka, menimbulkan ketegangan baru. Tidak boleh dilupakan ialah kepanikan akibat gempa Padang Panjang yang terjadi bulan Agustus 1926. Pengaruhnya juga amat terasa ke Silungkang dan bahkan sampai jauh ke Kerinci di selatan. Ini semua ikut menambah ketegangan dan ketidakpastian. Dan dalam suasana demikianlah radikalisme kaum pergerakan untuk mencetuskan aksi "revolusi" atau pemberontakan tinggal menunggu waktu. Sebagaimana yang akan dilihat pada uraian berikut ini, radikalisme itu makin lama makin dekat dengan jilatan api revolusi.

3. Kaum Pemberontak Beraksi

Pasar Silungkang, petang Sabtu, 31 Desember 1926. Sebuah bangunan berlantai dua --orang di sekitarnya menyebutnya "rumah tinggi"-- terletak menghadap pasar Silungkang. Sore itu suasananya agak lain di sana. Pada hari-hari biasa lantai dasarnya dijadikan "lepau" (warung nasi) oleh pemiliknya, sedang lantai atas sebagai tempat tinggal. Muhammad Yusuf gelar Sampono Kayo, pemilik rumah tinggi itu, adalah orang kaya Silungkang. Saat itu ia punya tiga buah oto yang disewakan, di samping usaha warungan. Sore itu agak ramai orang datang ke sana, tetapi bukan untuk berbelanja. Pemiliknya konon punya hajat untuk mengawinkan anak gadisnya. Undangan cukup disampaikan secara lisan saja atau dari mulut ke mulut :

> ".... Datanglah ke Silungkang! Muhammad Yusuf di *rumah tinggi* telah memotong kerbau....".[25]

Petang Sabtu malam Minggu Tahun Baru 1927, para tamu semakin ramai berdatangan. Umumnya berasal dari nagari Silungkang, tetapi juga ada dari nagari sekitarnya: Muaro Kelaban, Pianggu, Sungai Tjangtjang, Sungai Luo, Siaro-aro, Tarung-tarung dan seterusnya. Yang punya hajat waktu itu sebetulnya bukan Muhammad Jusuf pribadi, melainkan pengurus Sarekat Rakyat. Mereka mengadakan jamuan santapan makan malam yang berlimpah ruah. Setiap orang boleh makan sepuas-puasnya. Sehabis makan, kebanyakan berkumpul di los pasar Silungkang, sebagian di halaman rumah dan sebagian lain di lantai atas.

Acara kenduri itu kelihatan agak sedikit lain. Selain yang mengurus dapur dan perjamuan semuanya kaum laki-laki, para tamu yang datang juga laki-laki semua. Tak ada perempuannya. Lebih menyolok lagi ialah bahwa kebanyakan tamu

membawa senjata tajam, di antaranya ada yang membawa "ruduih" (parang), klewang kapak, linggis dan sebagainya, sampai kepada senjata api seperti, pistol, granat tangan dan kareben. Tetapi ada juga yang datang melenggang dengan tangan kosong tanpa membawa senjata sama sekali.

Menjelang maghrib, tamu semakin ramai. Suasana di sekitar rumah itu tampak semakin riuh-rendah. Rombongan tamu terus berdatangan. Namun tuan tumah tak perlu cemas, sebab tadi sore yang empunya rumah telah menyuruh orang-orangnya: Berahim, Lawit dan kawan-kawan untuk menyiapkan segala sesuatu berupa hidangan makan dan minum yang cukup banyak. Para tamu benar-benar diberi kesempatan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan itu dengan sepuas-puasnya, atas nama keselamatan dan keberhasilan gerakan. Makanlah sepuas-puasnya. Mungkin ini jamuan terakhir bagi sebagian tamu, begitu fikiran para pemimpin pemberontak yang sebagian berkumpul di lantai atas.

Berahim dan Lawit cukup sibuk dan kewalahan melayani para tamunya. Sementara Talaha gelar Rajo Sampono dan Tajjib Ongah, tokoh Sarekat Rakyat Silungkang, sedang berpikir keras di lantai atas. Soalnya, saudara Limin yang diutus kemarin sore untuk menghadap Arif Fadillah, dari Padang Panjang tidak kunjung datang. Berbagai pertanyaan menggeluti pikiran mereka: bagaimana nasib Limin sekarang? Apakah ia tertangkap? Apakah rencana ini bisa diteruskan? Apakah yang akan terjadi jika rekan-rekan dari subseksi yang lain tidak jadi ikut atau menarik diri dari rencana ini? Apakah kepala seksi Padang Panjang masih bertahan dengan prinsipnya semula? Artinya masih keberatan dengan rencana besar yang tengah di hadapan ini!

Sejumlah pertanyaan lain muncul berentetan. Semua ini membuat mereka yang di lantai atas rumah tinggi itu tampak

gelisah. Jarum jam sudah menunjuk pukul 20.00. Di luar sudah mulai kelam, kecuali di sekitar lampu stroomking dan lampu-lampu telong yang dipasang di dalam dan pekarangan. Tampaknya berita yang mestinya dibawa Limin malam itu dari Padang Panjang tidak mungkin diharapkan lagi. Keputusan terakhir harus diambil. Keputusan yang akan dibawa ke dalam rapat kilat di ruang atas itu, sekalipun tanpa mendapat kejelasan tentang sikap Ketua Seksi, Arif Fadillah.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua, Talaha, salah seorang angkat tangan untuk minta berbicara. Dia adalah Kamaruddin alias Manggulung, ketua DO (*dood organisatie*). Ia tampak emosional ketika menyatakan penyesalannya terhadap sikap keragu-raguan dari pemimpin dari Padang Panjang itu. [maksudnya Arif Fadillah]. Lantang dan berterus terang. "Kita sudah terlalu sering mendengar pemimpin berbicara tentang rencana pemberontakan. Semuanya bicara tentang pemberontakan dalam rapat, tapi semuanya itu terhenti pula dalam rapat. "Kini," katanya, "kita bicarakan lagi masalah pemberontakan, tapi cukup untuk terakhir kali." Tidak ada pilihan lain, kecuali meneruskan rencana ini. Kita tidak mungkin lagi mengulur-ngulur waktu. Barang siapa yang hendak mencoba menunda, atau menghentikan rencana ini, maka saat ini juga harus dibunuh, sekalipun orang yang menghalangi itu adalah *mamak* atau ayah kita sendiri. Atau biarpun orang-orang dari komite subseksi sekalipun, kalau mau coba-coba menentang rencana yang ini, berarti dia mau mati dan harus tewas." [26]

Semua terdiam dan tegang. Pembicaraan itu kemudian membawa Silungkang semakin dekat ke arena pemberontakan. Kedua pemimpin gerakan telah mengambil keputusan, bahwa pemberontakan harus segera dijalankan malam ini juga. Ditetapkan tepat jam 00.00. Saat itu jam sudah menunjukkan

pukul 22.00 dan semua telah berada di halaman rumah tinggi. Masing-masing anggota pasukan menerima "selempang merah",[27] berikut alat perlengkapan senjata seperti pedang, "ruduih" (parang), klewang, linggis, kapak dan senjata-senjata tajam lainnya turut dibagi-bagikan kepada semua yang tidak membawa senjata. Selain itu, beberapa orang di antara mereka mendapat pembagian "pisau ubi" (senjata pistol), karaben dan granat tangan, yang sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan yang lalu.

Beberapa orang pengurus mulai mengatur barisan para tamu, yang tidak lain adalah pasukan "pemberontak". Barisan "perang", demikian mereka menyebutnya, dibagi ke dalam dua kelompok: (i) barisan inti dan (ii) barisan cadangan. Barisan inti formalnya terdiri dari anggota militer garnizun Sawah Lunto yang bersimpati dengan gerakan Sarekat Rakyat, dibantu oleh ratusan barisan cadangan. Jumlah barisan inti ada 27 orang di bawah pimpinan dua orang sersan: Sersan Mayor Pontoh, orang Manado yang dipecat dari dinas ketentaraan Belanda karena dituduh terlibat gerakan komunis. Satu lagi Sersan Ramuat, juga orang Manado dengan nasib yang sama dengan rekannya Pontoh.[28]

Barisan inti dipersiapkan untuk menyerang kota Sawah Lunto. Sasaran utama ialah merampas sejumlah kantor-kantor pemerintahan dan membunuh pegawainya. Selain itu mereka juga diperintahkan untuk menyerang gedung "Societeit" Sawah Lunto, yang tiap malam Minggu biasanya ramai dikunjungi oleh pejabat Belanda untuk bersenang-senang. [Ingat malam itu malam Minggu]. Pada malam itu mereka juga mendapat tugas untuk menyerang perusahaan tambang batu bara serta membunuh sejumlah pejabat tinggi di kompleks di sana dan selanjutnya terus ke penjara dengan maksud melepaskan semua tawanan, sehingga akhirnya dapat menguasai kota

Sawah Lunto secara keseluruhan. Paling tidak demikian dalam fikiran para pemimpin pemberontak malam itu.

Oleh karena sasaran untuk kelompok pertama lebih berat dan lebih banyak, maka jumlah tenaga yang diperlukan juga lebih banyak dari pada kelompok barisan yang lain. Ada sekitar 400 "barisan perang" diberangkatkan dari rumah tinggi, tetapi jumlah itu dipastikan akan lebih besar lagi, sebab akan ada yang bergabung dengan barisan di tengah jalan nanti. Mereka adalah "barisan cadangan" yang akan diperkuat oleh pasukan tambahan di sekitar kota atau pasukan pemberontak dari beberapa nagari sekitarnya. Sore itu mereka tidak dapat hadir di rumah tinggi, tetapi para pemimpin mereka telah mengirim pesan siap menunggu di tengah jalan untuk selanjutnya bergabung ke dalam barisan ke Sawah Lunto.

Sementara itu, pasukan cadangan yang lain dibagi-bagi lagi ke dalam sejumlah kelompok "barisan perang". Masing-masing menuju sasaran yang telah ditentukan. Saat sudah masuk ke dalam kelompok masing-masing, tiap anggota masih lagi mendapat pembagian gula-gula pepermin.[29] Selain bersiap-siap menuju kota Sawah Lunto, 9 km dari Silungkang, "barisan perang" itu juga ada yang dikirim ke Muara Kalaban, sebuah nagari antara Silungkang dan Sawah Lunto. Di sana terdapat pos polisi dan penjara tua. Kedua sasaran ini harus dilumpuhkan pada saat bersamaan dengan Sawah Lunto. Selebihnya tetap tinggal di Silungkang. Tugas mereka antara lain melakukan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat pemerintah, termasuk kepala negeri dan orang-orang yang dipandang loyal terhadap pemerintah seperti guru-guru dan sebagian pedagang yang dianggap bekerja sama dengan pemerintah.

Kelompok yang terakhir ini, karena lebih dekat letaknya dengan sasaran, lebih duluan menyelesaikan tugas mereka.

Jam 23.00 malam mereka sudah mulai beraksi. Sasaran pertama mereka ialah membunuh kepala negeri Silungkang, yaitu Muhammad Djamil gelar Rang Kajo Nan Gadang. Aksi pemberontak dipimpin oleh Salim Emek, *kemenakan* sang korban sendiri. Tanpa mendapat rintangan apa-apa, pasukan pemberontak langsung mengambilnya di rumahnya. Sararan selanjutnya ialah tiga orang guru: Guru Mahmud, Djumin dan Rahman. Ketiganya langsung tewas di rumahnya. Sesudah itu tukang mas Kari Sutan dan Menek, berasal dari nagari Matur, Bukittinggi. Ia bersama seorang anaknya yang terkecil Suman, turut menjadi korban pembunuhan brutal di malam itu. Setelah membereskan tugas mereka pada putaran pertama malam itu, para gerombolan pemberontak kembali ke markas mereka di rumah tinggi sambil menunggu aba-aba selanjutnya.[30]

Kira-kira jam 01.00 malam, sesudah beristirahat sejenak, pasukan pemberontak selanjutnya mendapat perintah untuk menyudahi kepala Stasiun Kereta Api Silungkang. Namun sebelum pasukan pemberontak sampai di sana, ia sempat melarikan diri sehingga selamat dari sasaran pembunuhan. Sebagai gantinya rumah calon korban jadi sasaran pembakaran dengan cara meledakkan dinamit. Setelah itu gerakan langsung menuju rumah Hamid gelar Sutan Pemuncak, seorang petugas karcis kereta api, yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban pertama. Karena terjadi keributan ketika gerombolan menyerang ke rumahnya, Hamid dan salah seorang anaknya mencoba melarikan diri ke arah stasiun dengan maksud menyelamatkan diri dengan cara membunyikan lonceng tanda bahaya yang ada di stasiun itu. Namun karena perbuatannya itu terlihat oleh para pemberontak ia langsung dikejar dan dihajar secara brutal dengan menggunakan golok dan sejumlah tembakan peluru hingga tergeletak saat itu juga bersama se-

orang anaknya.

Tidak puas dengan aksi itu, Berahim, salah seorang komandan pasukan pemberontak yang ditugaskan menggarap musuh-musuh di Silungkang, memerintahkan anak buahnya untuk merusak stasiun berikut alat perlengkapan yang ada di sana, temasuk merusak sambungan telefon, sehingga hubungan ke kota Sawah Lunto dan Padang Panjang terputus. Untuk sementara kemungkinan serangan balasan dari pasukan pemerintah sudah diblokir. Untuk menyempurnakan pekerjaan mereka, barisan juga merusak kawat penghubung bendera kereta api dengan stasiun dan tempat pemindahan jalur kereta api yang ada dekat stasiun itu.

Gerombolan pemberontak baru kembali ke markas mereka di rumah tinggi pada jam 03.00. Setelah sempat melepaskan lelah sebentar sambil menikmati hidangan yang tersedia di markas mereka itu, Muhammad Yusuf selanjutnya memerintahkan kepada pasukan untuk melakukan pembunuhan terhadap Tuan (Boentjit) Leurs, nama panggilan yang diberikan masyarakat kepada Kepala BOW (Departemen Pekerjaan Umum) dan satu-satunya calon korban dari kulit putih (Eropa) pada malam itu.[31]

Begitulah mereka bergerak di tengah malam ke rumah rumah Tuan Boentjit. Ada sekitar satu kilometer letaknya dari pasar Silungkang atau dari markas pemberontak. Pada saat itu Parin, salah seorang algojo kaum pemberontak, membawa pisau, kapak dan dua buah bom, sedang Sirin dan Berahim masing-masing membawa linggis dan senapan. Raoep dan Oenus membawa dua buah lampu stroomking yang sudah terpasang. Sementara Muhammad Yusuf sendiri, yang memberikan perintah di markasnya, tidak ikut. Sebagai pemilik warung rumah tinggi, ia ditunjuk sebagai penanggungjawab lalu lintas informasi dan kegiatan di markas dan memberikan

aba-aba atau bagi gerakan pemberontak selanjutnya.

Sebelum sampai di rumah calon korban, Salim memerintahkan gerakan agar berhenti sebentar guna mengatur siasat serangan ke rumah pembesar Belanda itu. Sebagian diperintahkan langsung mengepung rumah calon korban, sedang yang lain tetap menunggu di jalan. Hanya beberapa orang ditunjuk menuju pintu depan berlagak seperti tamu biasa. Pintu diketuk dan tuan rumah dipanggil-panggil dari luar. Namun karena tidak ada sahutan dari dalam rumah, maka mereka mulai menggedor pintu secara kasar, sehingga dengan cara begitu barulah terdengar teriakan ketakutan dari tuan dan nyonya Leurs. Firasat buruk agaknya sudah menghantui tuan rumah, sehingga dari dalam terdengar ucapan minta belas kasihan, dengan menyatakan mereka tak bersalah apa-apa.

Namun pintu telah terlanjur dibuka secara paksa. Beberapa orang langsung menyerbu masuk. Ma'amin telah lebih duluan memanjat ke atas loteng, sedang beberapa orang lagi masuk ke ruang tengah.[32] Beberapa kali rentetan tembakan mulai dilepaskan dan ketika tuan Leurs yang diserang mendadak itu tidak bisa lagi melarikan diri, maka sambil berdiri dalam keadaan luka, memeluk isteri dan anak-anaknya di depan pintu kamar dia masih sempat memohon dengan putus asa kepada gerombolan yang ada di depannya agar tidak mengganggu isteri dan anak-anaknya. Lalu dengan berat hati ia rela menyerahkan nyawanya. Para gerombolan, lantaran kalap dan tanpa pikir panjang langsung melepaskan tembakan beberapa kali ke dada korban dan berikut serangan dengan golok. Tindakan pembunuhan yang amat brutal itu lebih dari mematikan. Di saat sekarat, sebelum menghembuskan nafas terakhir, tuan Leurs masih sempat mengucapkan selamat berpisah kepada anak dan isterinya yang sedang dalam keadaan histeris.

Pemberontak memenuhi janji mereka. Isteri dan anak-anak pejabat Belanda yang naas itu tidak diapa-apakan. Sambil berlalu meninggalkan korban di pagi buta itu, sebagian gerombolan beralih ke gudang BOW (PU), yang terletak kira-kira dua puluh meter dari rumah kepala yang telah tewas itu. Tujuan mereka ialah membongkar gudang untuk mengambil beberapa kekayaan yang di dalamnya antara lain, berupa "oetji" (amunisi), pelor dan sumbu dinamit.

Begitulah tugas yang terakhir ini selesai. Gerombolan mulai bubar dari tempat kejadian. Sebagian ada yang kembali ke markas mereka di rumah tinggi, sedang yang lain kembali ke rumah masing-masing. Pada malam tahun baru itu pemberontak di Silungkang menewaskan tidak kurang dari tujuh orang korban, di samping melakukkan perampasan-perampasan dan pengrusakan terhadap bangunan milik pemerintah.

Sementara itu, barisan ke Sawah Lunto yang berangkat pertama kali dari markas, masih sedang dalam perjalanan. Sesudah itu, dengan arah yang sama, tetapi lebih dekat jaraknya daripada ke Sawah Lunto, menyusul barisan Muara Kalaban. Barisan ke Sawah Lunto antara lain dipimpin oleh Abdul Muluk, dan nantinya akan bergabung dengan "barisan inti" di Sawah Lunto, termasuk di antaranya Sersan Ramuat, tokoh sipil seperti Rajo Bujang dan Kasan Wijoyo, sedang ke Muara Kelaban di bawah Karim Marokko.

Barisan ke Sawah Lunto meninggalkan pasar Silungkang lewat jalan raya nagari itu sekitar jam 22.00 (pukul 10 malam). Di tengah jalan, sekitar satu kilo sebelum Muara Kelaban, mereka berhenti sebentar dan duduk-duduk di tengah jalan, sambil menunggu rombongan dari Rumbio dan Bukit Katciak, yang akan bergabung dengan barisan mereka. Jumlah rombongan pun semakin besar, mencapai 300 orang. Karena jalan terlalu padat, sebagian berjalan menyusur rel kereta api.[33]

Dipimpin oleh Karim dari Sungai Cacang, iringan pemberontak takut masuk "tunel" (lubang kelam) di malam hari. Di mulut "tunel" sana ada pos jaga polisi. Komandan barisan lalu mememerintahkan 19 orang anak buahnya memanjat tebing di sisi "tunnel" untuk mengintai polisi. Sebagian lain dari barisan Sungai Cacang, Rumbio dan Bukit Kacik sudah menyebar mendekat barak polisi di Muara Kelaban.

Polisi jaga di Muara Kelaban melihat tanda-tanda mencurigakan. Ratusan rombongan pasukan berjalan acuh tak acuh melewati kantor polisi Muara Kelaban. Mereka tengah menuju Sawah Lunto. Tugas untuk menggarap kantor polisi dan tangsi Muara Kelaban bukan tanggung-jawab mereka. Jadi untuk sementara diabaikan, sebab menurut Tajjib Ongah, salah seorang pemimpin di Silungkang, tugas itu berada di bawah tanggung jawab Karim Marokko. Serbuan ke tangsi Muara Kelaban akan dilakukan serentak dengan serangan ke Sawah Lunto. Jadi menunggu barisan ke Sawah Lunto masuk kota. Nantinya akan ada aba-aba dari perantara untuk barisan Muara Kelaban.

Merasa merasa aneh dengan iringan-iringan pejalan kaki menunju Sawah Lunto itu maka salah seorang polisi di pos jaga di Muara Kelaban itu memanggil barisan depan. "Sini, mau ke mana kalian?. Yang ditanya bilang "kami mau ke Sawah Lunto untuk menangkap ikan." Tidak puas dengan jawaban yang ditanya, dua orang polisi jaga di sana lalu memerintahkan agar mereka melapor ke pos di dalam untuk ditanyai. Sebelum bergerak menuju rumah jaga komandan di dalam, kedua polisi itu memerintahkan barisan pemberontak jongkok di tanah. Saat membelakang membuka kunci pagar, polisi tiba-tiba diserang gerombolan. Saat itu terjadilah pertempuran. Senjata polisi meledak dan bom pemberontak dilemparkan. Dua pemberontak tewas seketika dan yang lain mulai mundur dalam

kegelapan.[34]

Sementara itu barisan Abdul Muluk yang sedang bergerak di pendakian menuju Sawah Lunto tiba-tiba dikejutkan oleh serentetan letusan dan ledakan bom jauh di belakang. Mereka maklum sudah bahwa serangan di Muara Kelaban sudah dimulai. Mereka mulai gelisah lantaran telah terjadi sesuatu di luar rencana. Mestinya serangan ke Muara Kelaban berlangsung serentak dengan yang ke Sawah Lunto: tepat jam 24.00 atau 00.00. Sementara dari arah Sawah Lunto, yakni masih satu setengah kilo dari tempat mereka berada, tidak kedengaran letusan apa-apa.

Dengan perasaan bimbang pemimpin dan anggota barisan memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke Sawah Lunto. Namun belum beberapa menit berjalan tiba-tiba mereka melihat cahaya lampu mobil yang sedang meluncur cepat di depan dari arah Sawah Lunto. Setelah agak dekat, pengawal barisan di depan memberi isyarat dengan lampu senter menyuruh mobil berhenti seraya menanyakan: "Siapa?". Dari dalam mobil dijawab: "Kawan", lalu meloncat Marzuki dan Tayib Yahya, utusan Sarekat Rakyat Sawah Lunto. Dengan muka pucat keduanya melapor bahwa rencana pemberontakan sudah diketahui pihak keamanan Sawah Lunto. Juga dilaporkan bahwa komandan pasukan pemberontak di Sawah Lunto, Sersan Ramuat dan Pontoh anak buahnya telah ditangkap, sedang senjata pasukan dilucuti sebelum dikonsinyir.

Mendengar laporan ini, Abdul Muluk dan jajaran komandan barisan tampak gentar. Mereka seperti kehilangan akal, ibarat juru mudi kehilangan pedoman. Apakah akan terus maju ke Sawah Lunto? Itu berarti bunuh diri karena pihak keamanan di kota pasti sudah siaga. Kalau mundur ke markas di Silungkang tanpa mendapat instruksi dari pimpinan, berarti menyalahi komando. Dalam keadaan genting dan mulai

putus asa itu para komandan barisan memutuskan untuk menunggu perintah selanjutnya sambil beristirahat. Untuk itu kedua teman yang datang dengan mobil itu diminta meneruskan perjalanan ke Silungkang untuk seterusnya kembali membawa pesan instruksi selanjutnya.[35]

Mobil kawan mereka telah berlalu dan barisan mulai menepi di jalan raya guna beristirahat sejenak setelah berjalan kaki sekian kilometer. Namun baru saja beberapa menit beristirahat, dengan fikiran bersiap-siap untuk mundur ke Silungkang, tiba-tiba nampak cahaya lampu mobil konvoi motor dari arah depan. Konvoi itu berada di bawah komandan polisi Wartena. Setelah mendapat laporan dari polisi jaga di tangsi Muara Kelaban sudah jelas ia mengambil tindakan preventif. Anak buah dikumpulkan. Sebagian diperintahkan untuk menangkapi semua anggota gerakan yang dicurigai di kota tambang itu, sebagian lain, sebanyak enam orang polisi, ikut bergabung dengannya.[36]

Meluncur dengan mobil yang didahului konvoi motor di depannya, Wartena berpapasan dengan barisan pemberontak di tengah jalan sekitar 2 km dari Muara Kelaban. Pemberontak menyetop konvoi polisi dengan setengah berteriak: "Berhenti!" sambil bertanya "Kawan atau Lawan"? Jawaban selanjutnya ialah rentetan tembakan senjata api. Beberapa orang pemberontak roboh. Beberapa buah "kue lemper" (granat tangan) sempat dilemparkan pemberontak, tetapi tak mengenai sasaran. Barisan mulai panik. Sebagian tiarap dan yang lain melarikan diri. Mereka yang tertangkap, termasuk komandan barisan, Abdul Muluk terpaksa menyerahkan diri. Mereka langsung dilempar ke atas mobil untuk selanjutnya dikirim ke Sawah Lunto. Beberapa orang polisi mendapat instruksi untuk meneruskan perjalanan ke Maura Kelaban.

Sekitar jam 00.03 pagi, datang lagi bala bantuan polisi dari Sawah Lunto ke Muara Kelaban. Sekitar seratus orang barisan pemberontak kepergok dekat jalan kereta api. Pertempuran terjadi, tetapi pemberontak kemudian mundur ke atas bukit di dekatnya.[37] Asiten Residen Karsen di Sawah Lunto, segera memerintahkan pengamanan dalam kota. Pukul 04.00 pagi ditemani oleh Demang Rusad dan 14 orang polisi lapangan (*veldpolitie*) berangkat ke Muara Kelaban. Di sana ia menahan kereta api dari Sawah Lunto yang akan berangkat ke Padang Panjang, dan jam 06.00 pagi ia dan rombongannya meneruskan perjalanan ke Silungkang dengan menumpang kereta api. Sekitar tiga ratus meter sebelum stasiun, rombongan asisten Residen menyaksikan ada kumpulan massa di stasiun itu. Mereka adalah pedagang atau penumpang yang sedang menunggu kereta api pertama dari Sawah Lunto atau yang berangkat ke Solok. Agaknya tidak tahu kejadian tadi malam, sehingga saat itu seperti tidak terjadi apa-apa. Sebagian berdiri dekat peron, sebagian lain tengah mengobrol tanpa menunjukkan sikap yang mencurigakan. Ada yang duduk di samping "Buffet" stasiun, dekatnya terdapat beberapa tumpukan keranjang barang yang akan dibawa pedagang. Di antara mereka pastilah terdapat kelompok pemberontak. Namun Asisten Residen dari jarak kejauhan masih sulit mengidentifikasi mereka.

Kereta api semakin pelan dan pada jarak sekitar 80 meter ke stasiun, Asisten Residen mengeluarkan instruksi agar semua yang berada di stasiun mengangkat tangan ke atas seraya mendekat ke kereta api. Setelah orang pertama berjalan mengangkat tangan ke atas, Asisten Residen beserta polisi turun dari kereta api dan mendekati mereka pada jarak 40 meter dari stasiun dengan maksud untuk melalukan penggeledahan. Tiba-tiba dari arah sisi kereta api, berloncatan

barisan pemberontak yang tadinya bersembunyi. Jumlah mereka sekitar 35-40 orang dan masih banyak lagi yang bersembunyi di balik stasiun. Menggunakan selempang merah dengan senjata klewang, pistol dan bom siap dilemparkan, terjadilah pertempuran. Dalam serangan itu, 7 orang pemberontak tergelatak dan 4 orang luka parah. Sebanyak 21 orang dapat ditangkap. Selebihnya melarikan diri. Di pihak Asisten Residen hanya 2 orang terkena luka bacokan kelewang dan yang satu terkena tembakan revolver pemberontak.[38]

Beberapa saat di pagi subuh itu masih terjadi pertempuran dan kejar mengejar. Beberapa orang yang bersembunyi di rumah-rumah dekat stasiun dapat ditangkap. Di warung rumah tinggi ada empat orang yang mencoba melawan, tetapi akhirnya bisa dilumpuhkan. Dalam waktu singkat stasiun pun dapat dikuasai. Barang-barang stasiun ditemukan dalam keadaan rusak berat: "brankas" dibongkar paksa, alat telegraf dirusak sehingga tidak bisa dipakai lagi dan hubungan antar stasiun sudah diputuskan oleh pemberontak. Setelah situasi agak aman, kepala stasiun yang semalam sempat melarikan diri datang melapor. Rumahnya terbakar oleh dinamit pemberontak, sedang penjual karcis, meskipun berusaha melarikan diri, tewas di tangan pemberontak.

Dua puluh menit setelah pertempuran berlalu, datanglah kereta api dari Solok. Asisten Residen dan orang-orangnya dengan membawa sejumlah tawanan kembali ke Sawah Lunto, sementara kereta api yang ditumpangi Asisten Residen dari jurusan Sawah Lunto meneruskan perjalanan menunju Solok. Masih pada pagi yang sama, sekitar jam 10.00, Asisten Residen kembali ke Silungkang dengan 14 orang polisi, plus seorang dokter. Asisten Residen kemudian memberikan pertolongan kepada para korban, termasuk yang luka-luka. Bantuan yang sama selain diberikan kepada keluarga almarhum Tuan Leurs,

dengan mengirim mereka ke Sawah Lunto, juga kepada keluarga guru-guru yang didapati sedang berada dalam ketakutan.

Di tengah jalan dalam perjalanan dari Sawah Lunto ke Silungkang itu, Asisten Residen masih mendapat serangan sebanyak tiga kali. Barisan pemberontak ternyata mendapat bala bantuan dari nagari lain. Sekitar jam 08 .00 dua kendaraan oto dengan bendera mereka sedang melaju dari arah Tanjung Ampalu menuju Silungkang. Di Muara Kelaban kendaraan mereka dicoba ditahan oleh pos jaga polisi di sana, tetapi karena tenaga keamanan kurang, mereka hanya dapat menahan laju kendaraan pemberontak menuju Silungkang.

Pada jam 13.00 (pukul 01 siang), Asisten baru kembali ke Muara Kelaban, setelah melakukan perjalanannya yang kedua di Silungkang. Dengan kereta api ekstra dia dan anak buahnya berangkat ke Padang Sibusuk jam 15.00 sore. Stasiun kereta api di sini, seperti halnya di Silungkang, ditemukan dalam rusak berat. Asisten meneruskan perjalanannya dengan kereta api ke jurusan Sijungjung. Namun satu setengah kilometer dari stasiun, rel kereta api sepanjang 500 dibongkar pemberontak. Akibatnya terpaksa kembali ke stasiun. Dalam perjalanan itu Asisten Residen diserang "pasukan merah". Pertempuran pun terjadi. Beberapa orang pemberontak tewas di tempat, sementara pasukan kemananan Asisten Residen karena relatif terlindung dalam kereta api tidak ada korban.

Dalam pertempuran 1 Januari itu sekitar 49 orang pemberontak dapat ditangkap dan sejumlah korban meninggal dan luka-luka.[39] Pertempuran masih berlangsung pada hari-hari berikutnya. Di Padang Sibusuk, pemimpin gerakan pemberontak di nagari itu, Pakih A'in dan Muhamad Zen dan Sutan Golek membunuh kepala nagari Datuk Sutan Nan Gadang dan mengangkat Kupiah gelar Datuk Bandaro sebagai "pucuk"

nagari, yang sebelumnya adalah bekas punghulu kepala di nagari itu. Pagi subuh tanggal 2 Januari dibunyikan "tabuh larangan" dan beberapa ratus orang berkumpul di pasar Padang Sibusuk. Beberapa orang yang dianggap tidak loyal dengan gerakan "revolusi" ditangkap dan dikunci di kantor kepala nagari. Belakangan dikabarkan satu persatu dieksekusi dengan hukum pancung. Peristiwa yang sama juga terjadi di Silungkang, terutama terhadap orang-orang yang tidak mau memberontak, termasuk mereka yang melarikan diri dari pertempuran.[40]

Beberapa puluh orang diperintahkan menyerang Sawah Lunto. Dua buah mobil disediakan untuk barisan gerak cepat. Mobil mereka ditutupi bendera merah. Di tengah jalan, di depan pos jaga polisi di Muara Kelaban mereka dicegat oleh Demang Rusad bersama anak buahnya. Komandannya, Muhammad Zen dan anak buahnya berhasil ditangkap. Dua jam kemudian menyusul mobil kedua. Mereka mengalami nasib yang sama. Walhasil, serangan pemberontak ke sasaran utama, kedudukan pemerintah dan perusahaan tambang-batu bara di Sawah Lunto, tak pernah tercapai. Sementara kekuatan "bawah tanah" di sana sudah lebih dulu dipatahkan.

Selama satu minggu pertama Januari, aksi-aksi pemberontakan dan kerusuhan yang paling seru hanya terjadi di beberapa titik: Silungkang, Muara Kelaban, Padang Sibusuk dan Tanjung Ampalu. Namun ini tidak berarti bahwa nagari-nagari di balik bukit Silungkang itu tidak ikut sama sekali. Mereka umumnya bertempur setelah menggabungkan diri dengan salah satu dari keempat nagari di atas. Hanya Air Luo yang tadinya meluap-luap mempersiapkan pemberontakan tidak jadi terlibat sama sekali. Di sana gerakan dipimpin oleh guru Kamin, anak kepala *laras* Supayang, yang pernah dicekal pemerintah sebelumnya. Penduduk di nagari bukit yang relatif

terpencil itu sejak bulan-bulan terakhir giat melakukan rapat-rapat di *balai adat* nagari. Senjata klewang dan "ruduih" sudah diasah tajam-tajam dan sejumlah senjata api pun sudah pula tersedia sebanyak beberapa buah. Pada tangal 22 Desember 1926 komandan mereka, Kamin atas nama kepentingan pergerakan menyelinap ke Padang Panjang, tetapi sejak itu tidak pernah kembali lagi. Ketika Chatib Nan Gadang, juga tokoh pergerakan di kenagarian itu, meminta agar aggota gerakan berkumpul untuk siap-siap bergabung dengan Silungkang, perintah itu tidak dipatuhi. Sebab menurut perjanjian semula ia sendiri yang akan memimpin gerakan setelah kembali ke Air Luo. Namun yang bersangkutan ternyata tidak pernah datang lagi. Khabarnya lewat Padang Panjang, ia menyelinap ke Bangkinang dan ke Singapura.[41]

Bagaimanapun pemberontakan Silungkang tidaklah tergantung kepada dukungan Air Luo. Malahan sebaliknya Silungkang sejak semula telah memainkan peranannya sebagai pusat gravitasi gerakan bagi nagari-nagari di sekitarnya dan bahkan untuk Sumatera Barat secara keseluruhan.

4. Reaksi Dari Pihak Penguasa

Pihak penguasa Belanda di Sawah Lunto jelas sangat terkejut ketika mendengar terjadinya serangan mendadak dari kaum pemberontak di malam tahun baru 1927 itu. Meskipun sudah tahu bahwa akan terjadi gerakan perlawanan menentang pemerintah, terutama dari para pemimpin gerakan yang tertangkap sebelumnya, mereka sama sekali tidak membayangkan bahwa aksi-aksi kekerasan itu berlangsung demikian cepat dan brutal terhadap setiap elemen pemerintah.

Semua kekuatan pasukan pemerintah yang berada di Sawah Lunto sudah dikerahkan. Namun dengan hanya mengandalkan aparat keamanan yang di Sawah Lunto saja jelas

tidak mungkin, sebab amuk radikalisme sudah menjalar ke mana-mana dan tak terkendali. Asisten Residen Karsen di Sawah Lunto buru-buru minta bantuan ke Padang Panjang. Tiga unit pasukan brigade mobil dikirim ke Sawah Lunto di bawah pimpinan Letnan Simons. Unit pertama sampai di Muara Kelaban jam dua malam, dan setengah jam kemudian disusul dua brigade lagi. Namun letnan Belanda itu tewas diserang pemberontak di jembatan "viaduct" [penyeberangan jalan kereta api dan jalan mobil di bawahnya] di Padang Sibusuk.[42]

Brigade kedua datang menyusul. Antara Tanjung Ampalu dan Padang Sibusuk mereka beberapa kali dihadang dan mendapat serangan dari pemberontak. Tembakan balasan datang dari pasukan brigade, tetapi akhirnya mundur ke Sawah Lunto. Sementara itu, Kontroleur Sijunjung yang terancam serangan kaum pemberontak di sana buru-buru mengirim Demang dengan mobil dinasnya ke Sawah Lunto untuk mengirim informasi kepada Asisten Residen di Sawah Lunto. Namun di tengah jalan, lagi-lagi dekat Tanjung Ampalu, kendaraannya dapat dicegat oleh kaum pemberontak. Demang itu disudahi langsung di sana dan mobilnya diambil dan sebuah lagi "truk rodi", digunakan untuk mengangkut anggota untuk membongkar jalan kereta api dekat Padang Sibusuk.[43]

Jam 00.08 pagi tanggal 3 Januari, dua brigade militer Belanda dikirim lagi ke Padang Sibusuk. Satu brigade naik mobil dan yang satu lagi dengan kereta api. Kedua brigade itu ditugaskan untuk mematahkan perlawanan kaum pemberontak di sana dan sekalian untuk memasang kembali jalan kereta api yang dibongkar paksa oleh pemberontak sebelumnya. Di Padang Sibusuk militer Belanda mendapati 200 perempuan dikurung di los pasar di nagari itu. Kepala negeri Padang Sibusuk dan seorang guru[44] juga tewas di tangan

pemberontak.

Tanggal 4 Januari lagi-lagi dikirim satu brigade militer bantuan, lewat kereta api Solok ke Sawah Lunto di bawah seorang letnan pengganti Letnan Simons yang tewas dua hari sebelumnya. Di tengah jalan saat melewati Silungkang para pemberontak rupanya memasang rintangan berupa rantai besi yang diikatkan ke rel untuk menghalangi jalannya roda lokomotif. Saat membersihkan rintangan itu lagi-lagi terjadi serangan dan empat orang pemberontak tewas.[45] Militansi gerakan pemberontak Silungkang tidak pernah benar-benar dipatahkan sampai minggu pertama bulan Januari. Penguasa Belanda di Sawah Lunto masih membutuhkan lebih banyak personil militer, baik yang didatangkan dari Padang Panjang maupun Fort de Kock (Bukittinggi), sementara kerusuhan-kerusuhan sporadis di tempat lain juga membutuhkan brigade militer. [46]

Namun sejauh berkenaan dengan Silungkang, beberapa brigade yang dikirim dengan mobil maupun kereta api, ternyata masih memerlukan waktu lebih panjang untuk membersihkan anasir pemberontak. Mati satu tumbuh seribu. Dikejar ke sana muncul di sini. Ungkapan itu benar-benar terjadi saat aksi pemberontakan bergeser dari perang terbuka kepada main kucing-kucingan. Secepat gerak maju pasukan brigade militer mengejar "barisan perang" pemberontak, lebih cepat yang dikejar menyembunyikan diri atau masuk ke jalan tikus di kampung-kampung. Sementara rakyat kebanyakan yang tak ikut serta memberontak bersikap bungkam karena takut akan resikonya. Namun setelah brigade militer Belanda meninggalkan Silungkang, "barisan perang" kaum pemberontak muncul kembali. Menggunakan kendaraan hias berbendera merah, tak terkecuali "bendi", "gerobak tolak" serta sepeda, mereka kembali muncul tanpa sedikit pun menunjukkan kegentaran terhadap resiko yang akan menimpa mereka. Paling tidak,

demikianlah keadaannya sampai minggu pertama bulan Januari. Militansi ini dengan sendirinya memberi peringatan kepada pemerintah betapa tidak mungkin bagi keamanan untuk melenyapkan gerakan pemberontak itu dalam waktu yang singkat.

Memang, sampai tanggal 12 Januari 1927 pemerintah telah berhasil menangkap tidak kurang lebih dari 1300 orang yang dituduh terlibat dalam gerakan pemberontak itu. Rata-rata umum mereka adalah antara 17 sampai 30 tahun.[47] Sebagian besar tertangkap pada masa-masa perlawanan antara tanggal 2-5 Januari. Namun jumlah ini konon mencapai sekitar 4000 orang sampai bulan Februari. Dalam upaya tindakan pengamanan dan pembersihan: penyitaan ratusan bom, senjata api dan pelbagai macam jenis senjata tajam yang digunakan kaum pemberontak, pemerintah ternyata masih harus bekerja keras dan membutuhkan waktu sampai tanggal 28 Februari 1927.

Masih lebih lama lagi waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengadilan tersangka. Namun dalam prakteknya hukuman sudah dijatuhkan sebelum mereka dikirim ke pengadilan. Penjara Sawah Lunto penuh sesak dan keadaanya sudah seperti neraka. Kapasitas penjara itu sebenarnya hanya sekitar 150 orang, tetapi sekarang diisi oleh ratusan orang. Meskipun sebagian dikirim ke penjara Durian, sekitar 2 km jaraknya dari Sawah Lunto, keadaannya tetap seperti neraka. Satu sel yang tadinya diisi untuk 1-2 orang kini diisi 15 –20 orang. Sel yang agak besar normalnya berisi sekitar 20 orang kini dijejal sekitar 100 orang lebih. Dalam keadaan semacam itu, mereka harus rela tidur berhimpit-himpitan, sekalian di sana makan minum, dan buang air besar dan kecil. Tidak begitu salah kalau hukuman penjara pra pengadilan itu jauh lebih buruk keadaannya dari pada kandang ternak.

Untuk menyelesaikan kasus per kasus *Landraad* (Pengadilan) Sawah Lunto bekerja maraton dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dengan satu orang hakim ketua dan sekaligus anggota, jadi hakim tunggal, dibantu dengan seorang panitera, keduanya orang Belanda totok, sedang jaksa terdiri dari orang Indonesia. Jangan harap ada pembela bagi pesakitan sekali pun tuduhan yang dikenakan atas diri mereka adalah hukum mati.

Berat ringannya vonis hukuman tergantung pada kedudukan, keterlibatan dan perbuatan tersangka dalam pemberontakan. Namun itu menurut kacamata jaksa penuntut dan vonis hakim. Hukuman terberat adalah hukuman mati, yakni hukum gantung sampai mati. Ada lima orang yang dijatuhi hukuman mati. Pertama ialah Muhammad Zen dan Pakih A'in (Pakih Berahim), keduanya adalah tokoh dari Padang Sibusuk, tetapi putusan ini kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup. Berikutnya adalah Kamaruddin gelar Manggulung, Ketua DO Sarekat Rakyat Silungkang, Muhammad Jusuf Sampono Kayo, pemilik rumah tinggi, markas gerakan Sarekat Rakyat di pasar Silungkang, dan yang terakhir ialah Pakih A'in (atau Pakih Berahim), propagandis Sarekat Rakyat yang juga bertanggungjawab dalam membereskan musuh-musuh di nagari Silungkang.

Kamaruddin alis Manggulung khususnya menyisakan kenangan seorang nasionalis tulen yang percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah semata-mata demi kemerdekaan bangsanya. Dalam *pledooi*-nya di depan *landraad* Sawah Lunto, Kamaruddin mengakui terus terang perbuatannnya dan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukankanya,[48] disadari sepenuh hati karena, menurutnya, Belanda dan orang-orang Indonesia yang dite..ıbaknya adalah *pihak sana*, anti kemerdekaan dan selalu menghina pergerakan. Dia menerima

hukuman mati yang dijatuhkan atas dirinya, dan tidak akan naik banding. Namun dengan suatu permintaan bahwa ia mohon diperbolehkan menjalani hukuman gantung di pasar Silungkang, di halaman markas gerakan yang dipimpinnya dan juga minta agar sebagian daging tubuhnya diiris untuk dikirim kepada ratu Belanda, Wilhelmina.

Sudah barang tentu permintaannya itu tidak dapat dan mustahil dikabulkan oleh *landraad*. Eksekusi hukumannya tetap dilakukan di penjara, yakni di halaman antara dua bangunan sel Penjara Durian, Sawah Lunto. Namun kiranya dapat dibayangkan betapa seorang Kamaruddin telah bersedia menjadi martir bagi bangsanya yang tengah diperjuangkannya. Ia tak pernah menyerah sampai akhir hayatnya. Baginya tangan mencencang bahu memikul. Itulah nasib seorang pemimpin nasionalis sejati. Ia bahkan menolak ketika diberi kesempatan menerima nasehat terakhir dan tuntutan "sakratul maut" seorang ulama untuk dirinya. Ia menampiknya karena ulama yang memihak kepada Belanda, menurutnya, adalah kaki tangan Belanda dan mengkhianati bangsa dan agama Islam. Dia pun menolak menggunakan tutup mata ketika dibawa ke tiang gantung karena ia tidak takut menghadapi maut dan karena dia percaya bahwa dia siap mati syahid. Dengan mengucap *"Allahu Akbar* dan kalimah syahadat: *Laailaaha Illallaah"*, Kamaruddin gelar Manggulung akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Dua tokoh yang dihukum gantung berikutnya, Muhammad Jusuf gelar Sampono Kayo dan pemuda Ibrahim menjalani eksekusi di tempat yang sama, di penjara Durian. Untunglah orang nomor satu dalam pergerakan dan pemberontakan seperti Sulaiman Labai dan Tajjib Ongah tidak dijatuhi hukuman mati. Mereka masing-masingnya mendapat hukuman penjara 20 tahun untuk Tajjib Ongah dan 28 tahun

untuk Sulaiman Labai. Mereka menjalani hukuman penjara berpindah-pindah dari penjara ke penjara di Jawa. Masih lebih berat hukuman dibuang ke Digul (Papua). Tokoh Silungkang yang dibuang ke Digul antara lain ialah Datuk Begindo Ratu dan isterinya Salamah, Talaha Sutan di Langit, Saleh Mangkuto, Talaha Sutan Jambi, Jamal Basri, Upik Itam dan lain-lain.

Di luar kategori hukuman berat yang disebutkan di atas, proses pengadilan diputuskan secara kolektif menurut kedudukan mereka dalam gerakan: kepala "barisan perang" 8 tahun, anggota barisan antara 2 sampai 4 tahun. Mereka yang mendapat hukuman di bawah dua tahun cukup dijebloskan ke penjara Sawah Lunto atau Durian, sedang yang di atas dua tahun dikirim keluar berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lain sampai ke Jawa: Gelodok, Cipinang di Batavia, Ambarawa, Malang, Sragen, Surabaya, Pamekasan Madura dan lain-lain. Dari sekian ribu tawanan, banyak juga yang dilepaskan karena tidak terbukti bersalah.

Dengan jumlah pesakitan sekitar 4000 Pengadilan Sawah Lunto akhirnya dapat menyelesaikan perkara pada bulan September 1928. Demikianlah dengan padamnya pemberontakan, berikut vonis yang diterima para tawanan, maka panggung sejarah jaman pertama yang penuh pergolakan di Sumatera Barat berakhir pula. Sejak itu pemerintah kolonial mulai bertindak keras dan lebih represif, mempersempit ruang gerak kaum nasionalis.

***

Catatan Akhir

[1] Kecuali arsip-arsip Belanda, orang-orang komunis, begitu juga dokumen-dokumen partai, sebenarnya tidak pernah dan enggan menyebut rencana "aksi" mereka dengan pemberontakan, melainkan "revolusi", sebuah revolusi yang lebih dini yang dirancang secara "nasional" oleh orang-orang komunis par excellence.

[2] Lihat dokumen Belanda yang diterbitkan dan diedit oleh Harry J. Benda dan Ruth T. McVey (eds), *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents* (Ithaca: Cornell University Press, 1960), p. 116. [selanjutnya disingkat *Key Documents*].

[3] Tentang perpecahan ini dan polarisasi dalam kemimpimpin komunis pusat ke dalam tiga kubu yang berbeda-beda telah dikemukakan dalam bab 3 di muka.

[4] *Key Documents*...., p. 116.

[5] Ibid.

[6] Zainun adalah utusan dari subseksi Padang dan bekas kondektur trem dan kereta api di Aceh. Ia merupakan tangan kanan Sultan Said Ali, tokoh komunis di Padang pada masa-masa sebelumnya.

[7] *Key Documents*...., pp. 158-159.

[8] Pendirian Tan Malaka dalam hubungannya dengan rencana pemberontakan yang akan digerakkan kaum PKI sejak 1925 telah ditulis dalam brosurnya berjudul *Naar de Republiek Indonesia* (Kanton: April 1925), dan diterbit ulang di Tokyo Desember 1925.

[9] Pandangan Tan Malaka ini dipetik dari sumber Belanda yang mengutip bukunya *Naar de Republiek Indonesia*. Lihat "Overzicht van het Onlusten ter Sumatra's Westkus", dalam *Verslag van Bestuur en Staat van Nederlandsch-Indie, Suriname en Curaçao, 1927/ 1928, no. 5. Bijlage B II (Gedrukt ter Algemene Land'sdrkkerij, 1928)*. [selanjutnya disingkat dengan *Kolonial Verslag, Bijlage B II*].

[10] Ibid., p.157.

[11] Baharuddian Saleh berasal dari Kota Anau, Solok, pernah menjadi Ketua PKI Seksi Padang Panjang dari bulan September 1924 sampai Mei 1925. Dia juga pernah ditawan karena dituduh melakukan agitasi dan kemudian setelah dilepaskan pada bulan Agustus 1926 dia meninggalkan Sumatera Barat untuk selanjutnya menuju Bandung di mana ia sempat mengenal lebih dekat Tan Malaka lewat Supardjo, pimpinan Komite Sentral PKI di Bandung.

[12] Mahmud Sitjintjin kadang-kadang juga mengunakan nama samaran Muhammad Yusuf, ia berasal dari Sicincin, Lubuk Alung,Padang. Dia pernah aktif sebagai staf seksi PKI di Padang Panjang dan bersama rekannya Zaini dari Padang juga pernah berkenalan dengan Tan Malaka di Singapura, di mana mereka pernah bertukar pikiran sekitar tentang gerakan PKI tapi Ia tidak terpengaruh dengan argumen yang diberikan Tan Malaka kepadanya.

[13] Dahlan tidak diketahui secara pasti di mana daerah tempat asalnya di Sumatera Barat. Dia pernah sekolah di Stovia, tapi kemudian aktif dalam PKI cabang Batavia, dan pernah datang ke Singapura.

[14] W.H. de Greve, *Het Ombilin-kolenveld in Padangsche Bovenlanden en het Trasportstelsen op Sumatra's Westkust* (s'-Gravenhage: Algemene Landsdrukkerij, 1871). Versi yang lebih singkat lihat artikel berjudul "De Ombilin-steenkolenmijnen", *De Mijnbouw*, no. 2 (1939), pp. 67-69.

[15] Catatan Abdul Muluk Nasution dalam bukunya

[16] Kesaksian Mohammad Jusuf gelar Sampono Kayo dalam "Pemeriksaan Landraad Sawah Lunto terhadap pelaku Pemberontakan Siloengkang", dimuat secara bersambung dalam koran PSII, *Bendera Islam*, No. 122/ Th ke-4, 27-28 Juni 1927. [selanjunya disingkat "Pemeriksaan Landraad Sawah Lunto..."].

[17] Abdul Muluk Nasution, lahir 1907 di Cubadak, Talu, Pasaman dari suku Madailing. Sejak usia remaja ia merantau ke Silungkang ikut kakaknya yang bekerja sebagai mandur proyek jalan antara Silungkang-Muaro Kelaban. Muluk termasuk salah seorang aktivis Sarekat Rakyat yang ikut dalam aksi penyerangan tahun baru 1927; ia ditangkap dan dibuang ke beberapa tempat di Jawa.

[18] "The land is ours, and will always be ours, but other people walk off with benefits of it". Dikutip dari Schrieke (1955), p. 165.

[19] "Ordeel over den Opstand ter Sumatra's Westkust," dalam *Locomotief*, Maandag (Senin), 17 October 1927.

[20] "Pemeriksaan landraad Sawah Lunto..."], *Bendera Islam*, No. 98, 21 Maret 1927.

[21] *Key Documents* ...., p. 107.

[22] *Locomotief*, Maandag (Senin), 17 October 1927.

[23] *Key Documents*....., p.102.

[24] "Silungkang, Ordeel over den Opstand ter Sumatra's Westkust", *Locomotief*, Maandag [Senin], 17 October 1927.

[25] *Key Documents*...., p. 171.

[26] *Key Documents*...., p. 172.

[27] Tanda "selempang merah" ini bukan terbuat dari kain semuanya, tetapi hanya beberapa helai benang merah yang ditaruh di atas bahu kanan melingkar kepinggang kiri. Tetapi selain itu beberapa orang pemimpin gerakan memakai juga baju dan daster serta bendera merah.

[28] Waktu itu garnizun militer Belanda Sawah Lunto hanya terdiri dari 30 orang di bawah tiga orang komandannya orang Belanda dan komandan yang lebih rendah adalah orang Indonesia. Umumnya dari Manado, Ambon, Aceh dan Batak,

[29] *Key Documents*...., p. 177.

[30] *Key Documents*...., p. 177.

[31] "Pemeriksaan landraad Sawah Lunto..."], *Bendera Islam*, No. 98, 21 Maret 1927.

[32] "Pemeriksaan landraad Sawah Lunto..."], *Bendera Islam*, No. 98, 21 Maret 1927.

[33]

[34] *Koloniaal Verslag, Bijlage B II* (1928), p. 5.

[35] Catatan Abdul Muluk tentang *"Pemberontakan Silungkang..."*.

[36] *Key Documents* ...., p. 172.

[37] *Koloniaal Verslag, Bijlage B II* (1928), p. 5.

[38] Ibid., p. 6.

[39] Ibid., p. 6.

[40] *Key Documents* ...., pp. 172-73 untuk kasus Silungkang dan p. 175 untuk kasus Padang Sibusuk. Untuk Silungkang termasuk di antaranya Manan, Sekretaris Kepala Negeri, seorang supir bernama Manan dan tukang periksa karcis kereta api Sutan Pamuncak dan lain-lain sebanyak belasan orang. Sebagian dapat melarikan diri karena saat eksekusi dilakukan, tiba-tiba datang patroli polisi dari Sawah Lunto, sehingga keadaan menjadi kacau.

[41] Ibid., p. 171.

[42] *Koloniaal Verslag, Bijlage B II* (1928), p. 6.

[43] Ibid.

[44] Ibid.

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Jumlah ini berdasarkan penghitungan *Koloniaal Versalg 1927, Bijlage B II*, hal. 8.

[48] Berapa jumlah persisnya orang yang dibunuh Kamaruddin tidak diketahui, tetapi sumber Belanda hanya menyebut secara umum saja bahwa yang meninggal di pihak pemerintah, termasuk orang Indonesia yang dianggap

berpihak kepada Belanda adalah 18 orang, sebagian besar orang Indonesia, sedang dipihak pemberontak sebanyak 25 orang, di samping ratusan korban luka-luka. *Koloniaal Versalg 1927*, Bijlage B II.

V
Penutup

Halaman-halaman di muka telah mencoba menelusuri latar belakang dan proses-proses pemberontakan Silungkang di Sumatera Barat tahun 1927. Sebagai suatu gerakan sosial, kasus pemberontakan itu memiliki karakteristik yang unik, tapi kompleks, baik di dalam sejarah lokal Sumatera Barat khususnya, maupun di dalam sejarah Indonesia modern umumnya. Sebab itu, barangkali masih ada gunanya untuk mempelajari perkembangan gerakan sosial tersebut dalam beberapa catatan penutup.

Kasus Silungkang, secara ideologis tidak dapat diragukan lagi adalah suatu gerakan yang secara sadar menyuarakan ideologi nasionalisme yang tengah berkembang di Hindia-Belanda pada masanya. Betapa pun kerangka kerjanya masih mengesankan kurang sistemik dan programatik sebagaimana diungkapkan dalam nilai-nilai sosial dan politiknya. Ideologi gerakan itu dengan jelas mencerminkan gabungan aspirasi-aspirasi nasionalis sebagaimana diungkapkan dalam propagandanya dalam istilah "kamerdikaan" yang menjadi semakin militan dan khas Minangkabau.

Dalam hal ini, beberapa fenomena dapat diamati. Misalnya, aksi-aksi protes dan reaksinya yang keras, militan, dalam melawan *status quo* pemerintah kolonial, serta keluhan-keluhannya yang lantang terhadap kepincangan-kepincangan ekonomi dan sosial. Munculnya tuntutan-tuntutan yang tidak sabaran sebagaimana diungkapkan dengan cara melancarkan aksi-aksi kekerasan tersebut, menunjukkan suara "kebebasan" alam fikiran dan sekaligus cara bertindak Minangkabau. Di situlah nilai-nilai kebersamaan dan kesamaan ditunjukkan dan dibela, walau dengan bagaimanapun. Pemberontakan adalah sebuah klimaks dan sekaligus jalan terakhir untuk mencapai apa yang diyakini bersama oleh para pelakunya, atas nama rakyat jajahan di Minangkabau.

Barangkali kekacauan analisalah yang sering menyebabkan anggapan bahwa setiap respon keras bernada anti-asing (dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda) sebagai suatu pencerminan nasionalisme. Di dalam sejarah Indonesia abad ke-19 dan dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-20, sesungguhnya banyak terjadi pergerakan-pergerakan sosial menentang pemerintah kolonial. Dalam kasus sejarah Jawa, pada periode ini, telah ditunjukkan dengan baik oleh Prof. Sartono Kartodirdjo dalam studi pergerakan sosialnya yang terkenal.[1] Di Sumatera Barat sendiri rangkaian pergerakan menentang unsur asing telah berlangsung hampir terus menerus; dua yang terpenting di antaranya ialah kasus Perang Paderi abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 terlihat dalam kasus "Perang Balesting" atau "Perang Kamang" pada tahun 1908, di samping serangkaian gerakan sosial-intelektual seperti yang ditunjukkan dalam tulisan-tulisan Schrieke dan Taufik Abdullah.[2] Kesemuanya itu merupakan pergerakan-pergerakan sosial menentang rejim kolonial atau setidaknya reaksi keras terhadap setiap kebijakan kolonial yang berakibat buruk

terhadap kondisi masyarakat.

Gerakan pemberontakan Silungkang juga demikian. Tetapi dalam banyak hal, pemberontakan Silungkang lebih menunjukkan ciri-ciri pergerakan sosial modern daripada kebanyakan pergerakan sosial tradisional yang sebelumnya, terutama di dalam segi ideologi, kepemimpinan, perlengkapan atau organisasi dengan pengertian yang seluas-luasnya. Sebelum menunjukkan ciri kemodernan dari gerakan ini, barangkali masih perlu dikemukakan ciri-ciri umumnya sebagaimana yang banyak ditemukan dalam gerakan sosial di Indonesia jaman kolonial umumnya.

Salah satu ciri umum dari gerakan ini antara lain ialah tradisi protesnya yang mirip dengan kebanyakan gerakan sosial yang terjadi dalam masa kolonial pada umumnya. Sebagaimana lazimnya suatu gerakan sosial, gerakan ini juga menunjukkan reaksi terhadap lingkungan yang sedang berubah. Telah tercatat di depan bagaimana perubahan-perubahan ekonomi dan sosial, serta penetrasi sistem kolonial yang semakin intensif, terutama praktek-praktek kolonial dalam pemungutan pajak dan penggerogotan pemilikan tanah secara tradisional, merupakan penyakit yang kronis sebagaimana yang dialami oleh kebanyakan gerakan sosial pada masa kolonial umumnya. Situasi kolonial yang demikian, telah menimbulkan berbagai fenomena baru yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan kolektif. Ini bisa dilihat dari latar belakang umumnya dan sikap anti asing mereka sebagaimana tercermin dalam kebanyakan gerakan sosial pada masa ini.

Dalam hampir setiap gerakan sosial, seperti juga dengan gerakan sosial yang tengah dipelajari ini, sikap anti asing telah diwujudkan dalam pelbagai manifestasi: melalui propaganda, ungkapan-ungkapan tradisional berupa pepatah-petitih dan klimaksnya ialah melalui tindakan kekerasan, sadisme, dan

pengrusakan, di mana motif-motif dan pengalaman pribadi juga ikut berperan, umpamanya, unsur balas dendam atau kesempatan mencari keuntungan bagi kepentingan pribadi. Namun hal ini sebenarnya dapat dipahami, karena di dalam kelompok massa yang terlibat dalam aksi-aksi pemberontakan itu terdapat berbagai golongan sosial yang sedikit banyak memiliki pengalaman emosi dan motif-motif yang berbeda-beda. Demikian juga sebab tingkat emosional seseorang yang biasanya ditentukan pula oleh latar belakang dan pengalaman-pengalaman pribadi di masa lampau. Endapan rasa jengkel, kemarahan dan rasa benci misalnya, tercermin dalam tindakan sadisme yang mereka lakukan.

Dengan perkataan lain, pengalaman perseorangan tampaknya menentukan tingkat emosional dan keagresifan seseorang dalam menyerang sasaran atau musuhnya. Juga telah tercatat tindakan-tindakan sadisme yang telah mereka lakukan terhadap sejumlah pejabat pemerintah, baik yang pribumi maupun yang kulit putih secara brutal dan tanpa belas kasihan. Sudah barang tentu ini tidak dilakukan oleh setiap anggota massa pemberontak waktu itu, tetapi hanyalah oleh beberapa orang tertentu yang berhubungan erat dengan jabatan atau latar belakang pribadinya, di samping kedudukannya dalam organisasi pemberontakan. Beberapa orang di antaranya berperan langsung sebagai dalang dan di antaranya sebagai "tukang jagal" atau algojo dalam aksi-aksi yang mereka lakukan.[3]

Tidak dapat di sangkal, bahwa selain dari unsur-unsur yang disebutkan di atas, ada juga motif "aucthor intellectualis"-nya, juga terdapat unsur-unsur motif pribadi di mana orang-orang terlibat di dalamnya dan menggunakan kesempatan mengeruk keuntungan pribadi, misalnya dengan cara mencuri atau merampok secara terang-terangan. Dalam hal ini perlu

disebutkan peran yang dimainkan oleh kelompok Sarekat Djin atau Sarekat Itam, suatu kelompok bawah tanah yang sering melakukan tindakan sadis dan perbuatan semacam itu atas nama gerakan, tetapi sekaligus menangguk "di air keruh", sehingga sangat ditakuti baik oleh umum ataupun oleh pihak pemerintah sendiri.

Selanjutnya masih memungkinkan kiranya untuk membuatkan suatu generalisasi terbatas dalam hal kepemimpinan gerakan itu. Bahwa dalam hampir setiap gerakan sosial, unsur kepemimpinan dan agama Islam sangat memegang peranan penting. Dalam gerakan ini kecenderungan serupa itu jelas ada, setidak-tidaknya pada fase awalnya. Kita juga telah menunjukkan kehadiran dan peranan dari Hadji Datuk Batuah bersama-sama dengan kawan-kawanya dengan surat kabar yang terkenal dengan "Pemandangan Islam" dan "Djago Djago" di sekolah agama Thawalib, serta propaganda-propaganda yang disebarkannya, yang jelas memuat semangat (ajaran) unsur Islam. Namun pentinglah dicatat di sini, bahwa kepemimpinan Islam di dalam gerakan ini adalah berbeda dengan kebanyakan gerakan pada masa ini. Corak kepemimpinan Islam dalam gerakan komunis di sini jelas berbeda dari yang dapat ditemukan dalam kasus Jawa. Bila di Jawa, sinkretisme Islam-komunis berjalan bersama perlahan-lahan di bawah kepemimpinan Islam ortodoks atau konservatif, seperti Hadji Misbach di Surakarta[4], maka di Sumatera Barat, gerakan itu tampil dan berkembang di bawah kepemimpinan kaum modernis. Ini adalah suatu ciri khas yang sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan gerakan sosial tradisional pada umumnya.

Memang kenyataan bahwa mayoritas modernis yang lain telah menolak tegas ajaran komunis ini adalah benar, terutama karena prasangka atheis ajarannya. Namun dengan terlibatnya

sejumlah kaum terpelajar dan tokoh-tokoh intelektual di dalam gerakan ini tidak mengurangi fakta, bahwa secara organisatoris ia sebenarnya lebih mengutamakan gerakan sosial modern, dalam kadarnya ketika itu. Selaku demikian telah terlihat, bahwa gerakan sosial yang menjadi gerbong pemberontakan merupakan bagian dari serangkain kegiatan orang-orang PKI yang semula merencanakan pemberontakan dan meluas untuk seluruh daerah Sumatera Barat. Hanya saja karena terjadi perpecahan di kalangan pemimpin partai itu, terutama soal penentuan "waktu" dilakukannya "revolusi", di samping rentetan peristiwa penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin gerakan sebelumnya, maka gerakan pemberontakan Silungkang pada akhirnya ditinggalkan dan akhirnya mengambil inisiatif sendiri.

Adalah tidak begitu sulit untuk menyebutkan, bahwa PKI itu sendiri adalah suatu kelompok kepentingan.[5] Selaku demikian dia memenuhi prasyarat-prasyarat bagi kondisi-kondisi teknis dari suatu organisasi, tetapi juga relevan dengan kondisi-kondisi sosial dan politis dalam mana sudah termasuk ideologis kepemimpinan, perlengkapan-perlengkapan yang dalam hal menunjukkan ciri kemodernannya.

Juga telah tercatat bahwa organisasi, ideologi, perlengkapan-perlengkapan seperti persenjataan, media massa dan latar belakang pengalaman pemimpin-pemimpin gerakan yang sampai pada batas-batas tertentu cenderung bersifat kosmopolitan. Kenyataan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam gerakan tidak dengan sendirinya menunjuk tipe tradisional dari suatu kepemimpinan,[6] karena dia dipilih dan disetujui berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang bersifat rasional, bukannya irasional. Dan ini sekaligus juga membedakan dari kebanyakan gerakan sosial tradisional umumnya. Ketika terjadi penangkapan-penangkapan atas pemimpin

mereka, gerakan itu tidaklah dengan sendirinya terhenti. Ia dilanjutkan oleh yang lain yang mana hal ini sekaligus membedakannya dengan gerakan tradisional di mana penangkapan atas seorang pemimpin atau gerakan biasanya merupakan cara yang paling efektif untuk mengakhiri suatu gerakan tradisional itu sama sekali.

Gerakan komunis Sumatera Barat, karena terdiri dari kepengurusan yang mapan, hal-hal yang serupa itu tidaklah berlaku sepenuhnya. Tetapi sampai batas-batas tertentu, dia juga tidak memiliki ciri kepemimpinan kharismatik. Dalam hubungan ini tampak sekali ketergantungan pemimpin-pemimpin di Silungkang terhadap pemimpin mereka yang di cabang, seperti Arif Fadillah di Padang Panjang. Ini dan sedikit banyak mencerminkan kharisma kepemimpinannya dan di lain pihak juga atas dasar hubungan organisatoris kepartaian. Tidak kurang dari enam kali para pemimpin di Silungkang bolak-balik ke Padang Panjang menghadap tokoh Arif Fadillah (pemimpin generasi terakhir dari gerakan komunis di Sumatera Barat) untuk segera meletuskan rencana pemberontakan itu. Seperti ternyata kemudian bahwa rencana pemberontakan itu tertunda-tunda sekian kali karena tidak mendapat persetujuan dan sokongan dari Arif Fadillah. Namun pada akhirnya pemimpin di Silungkang mengambil jalan sendiri. Tanpa Arif pun, pemberontakan akhirnya dikobarkan. Dilihat dari segi kepemimpinan dan organisasi gerakan, maka tidak diragukan lagi bahwa gerakan itu lebih merupakan gerakan sosial modern, di mana hubungan pemimpin dengan yang dipimpin berpijak pada landasan organisatoris yang terencana dan aturan main organisasi.

Erat kaitannya dengan butir di atas, dari segi penampilan aksi-aksi yang dilakukan, juga satu kecenderungan yang dapat dicatat. Serangan yang dilancarkan ke pos-pos polisi, ke

penjara, memblokir jalan-jalan dengan cara menebang pohon-pohon yang terletak di kiri kanan jalan, pembongkaran rel kereta api dan percobaan-percobaan untuk menguasi jalur komunikasi utama seperti hubungan telepon, stasiun-stasiun, telah memberi banyak bukti bahwa massa pemberontak rupanya telah melakukan sesuatu yang telah diperhitungkan secara intelektual dan rasional guna menguasai kontrol penguasaan secara cepat dan disiplin, dan di situ juga tersimpul bahwa ledakan gerakan pemberontakan tersebut bukanlah kerusuhan tiba-tiba berupa keranjingan, permusuhan, amukan atau panik-panik umum yang muncul secara mendadak. Sesungguhnya ia merupakan suatu gerakan yang telah lama direncanakan, meskipun program kerja mereka terkesan berantakan.

Akhirnya pembahasan sampai pula kepada persoalan terakhir yang paling rumit dan sensitif, dan juga berkaitan dengan persoalan di atas. Perlu dicari jawaban atas pertanyan: di manakah letaknya peristiwa ini, baik dalam sejarah lokal Sumatera Barat khususnya dan dalam sejarah Indonesia modern umumnya? Dengan lain pertanyaan apakah pemberontakan ini ada hubungannya dengan spirit nasionalisme yang sedang berkembang di Indonesia waktu itu? Jawaban atas persoalan ini barangkali dapat dibantu dengan percobaan beberapa sarjana supaya membicarakan fenomena nasionalisme dalam bentuknya yang lebih luas dan terutama variasi nasionalisme anti kolonial yang berkembang di Indonesia pada waktu itu.[7]

Sejumlah penulis telah menampilkan pandangan yang berbeda, kalau bukannya bertentangan, bahwa gerakan pemberontakan komunis tahun 1926-1927 atau secara khusus Pemberontakan Silungkang di satu pihak dipandang sebagai bersifat "proto nasionalisme" dan di lain pihak dipandang sebagai pencerminan kesadaran "nasionalisme" anti kolonial,

yang tengah berkembang di Indonesia waktu itu. Pertama-tama adalah Harry J. Benda,[8] yang mengemukakan pandangan yang pertama di atas, bahwa gerakan itu harus dilihat sebagai fase akhir dari fenomena yang lebih awal dengan apa yang disebutkan sebagai "Proto Nasionalisme".

"Masyarakat Indonesia ketika itu," demikian Benda, "adalah ahli waris yang kebingungan akibat pelebaran horizon ekonomi dan sosial mereka." Dari itu ia memandang gerakan pemberontakan itu sebagai tidak lebih dari manifestasi dari keputusasaan dan kekecewaan rakyat berupa loncatan-loncatan dari harapan utopis, yang sedikit banyak mungkin meringankan penderitaan mereka. Sebab itu katanya gerakan itu mirip dengan produk gerakan petani tradisional umumya.

Timbulnya ideologi-ideologi utopia yang menekankan suatu impian tentang hilangnya konflik sosial dalam masyarakat dengan cara ingin kembali pada suatu keadaan "pra industri yang hipotesis" atau dengan harapan untuk menciptakan bentuk kehidupan yang diingini di mana apa yang disebut dengan "kontradiksi" antara kepentingan-kepentingan ekonomi dapat dihilangkan. Tentu saja katanya Karl Marx dan pengikut-pengikutnya adalah penganjur-penganjur utama dari pendapat-pendapat serupa itu, namun pemberontakan itu jauh lebih tradisional dan jauh lebih sederhana dari suatu gerakan modern.

Nampaknya Benda lebih banyak mendasarkan bahannya pada hasil penelitian *Komisi Penyelidikan* yang dibentuk pemerintah kolonial tak lama setelah pemberontakan itu. Karenanya analisanya sedikit terperangkap dengan prasangka-prasangka kolonial yang tersimpul dalam laporan. Memang sumber primer yang paling dipercaya sejarawan untuk menemukan detail-detail dari kasus pemberontakan ini berasal dari hasil laporan tersebut.

Persoalan pokok di sini bukanlah sejauh mana dan bagaimana pemberontakan itu ditampilkan atau mengapa pemberontakan itu gagal. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah mengapa semua itu terjadi dan apakah mereka tidak bisa dikatakan sebagai mewakili perkembangan kesadaran nasionalisme yang timbul ketika itu. Sekalipun di dalam laporan itu ditemukan banyak sekali data-data mentah yang berharga sekali, namun juga dapat ditemukan *bias* (prasangka) yang tersimpul di balik itu semua, sehingga lebih mengeruhkan dari pada menjernihkan akan arti peristiwa yang partikular.

Jika menyelidiki lebih jauh, tidak satupun dari informasi laporan itu yang membayangkan tentang akhir dari kekuasaan kolonial di masa datang.[9] Mereka seakan-akan tak percaya terhadap implikasi-implikasi nyata dari pemberontakan itu, bahwa rakyat bergerak memberontak dengan tujuan untuk mengusir pemerintahan kolonial dari negeri mereka dan ingin mendirikan suatu pemerintahan sendiri. Tentang bagaimana pandangan mereka, kaum pemberontak itu sendiri mengenai "nation state" yang diidam-idamkan tidak bermanfaat di sini, sebab hampir dapat dikatakan bahwa semua aliran-aliran politis-ideologis, baik komunis Indonesia maupun nasionalis sekuler dan Islam sesungguhnya mempunyai pandangan-pandangan sendiri tentang impian suatu negara Indonesia yang merdeka yang mereka idam-idamkan itu. Yang terlebih penting dalam hubungan ini adalah jawaban atas pertanyaan apakah pemberontakan itu ada atau tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan nasionalisme Indonesia waktu itu?

Pandangan kedua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stromquist,[10] menegaskan bahwa pemberontakan itu tidak lain adalah pencerminan dari nasionalisme yang tengah berkembang di Indonesia. Dengan bertolak dari pertanyaan: apakah di dalam rancangan politik gerakan komunis itu tidak

ada di antara pemimpin mereka yang memiliki konsepsi tentang negara Indonesia yang merdeka? Stromquist mengembalikan jawaban pertanyaan itu, dengan beberapa kali mengutip pendapat tokoh-tokoh gerakan komunis, serta mengidentifikasi fenomena nasionalisme itu dengan perkembangan masyarakat Indonesia ketika itu.

Salah satu kutipan terpenting yang diajukannya untuk memperkuat tesisnya di atas adalah artikel Semaun di dalam laporan Pers Internasional yang berisi kutipan tentang publikasi nasionalis yang bernada tuntutaan revolusi sebagai berikut:

> .....Freiheit der Presse, Versammlungs-und Organisationsfreiheit! Amnestie fur alle politischen Gefangenen und Verbanten! *Allgemeine Umgestaltung der staatsform in dem Sinne, dass das volk das Recht erhalt sich selbst zu regieren*! Allgemiene Umgestaltung der Steuern, Steuererniedrigung fur die Indonesischen Massen! Arbeitergesetzgebung und Arbeiterschutz! Erweiterung und Verbasserung des Unterrichts![11]

Sungguhpun terdapat perpecahan dan ketidaksepakatan di kalangan pemimpin komunis mengenai kapan revolusi menentang kolonial Belanda akan diledakkan, namun di sana ada dasar gagasan umum tentang tujuan revolusi. Tujuan terakhir dari revolusi, sebagaimana dikatakan oleh Tan Malaka, adalah menyusun suatu negara merdeka di mana semua "interest" (kepentingan) dari elemen-elemen proletariat dan non proletariat akan diperhatikan. Bagi mereka penggulingan kapitalis adalah suatu sinonim dengan penggulingan pemerintah Belanda. Sebab itu kesimpulan yang diberikan oleh Stromquist bahwa pemberontakan itu dalam pengertian real bagaimanapun juga, adalah nasionalisme dalam kadar dan pandangan mereka. Pemimpin-pemimpin mereka adalah anggota dari sebagian besar minoritas golongan yang terpelajar. Dan tujuan mereka adalah termasuk mencapai

kemerdekaan menurut pengertian dan kemauan yang mereka ingini.

Adalah menjadi pandangan penulis buku ini, bahwa agaknya tidak begitu berbijaksana untuk menetapkan pilihan hitam-putih antara sifat "proto-nasionalisme" atau "nasionalisme" sebagaimana yang dikemukakan dua penulis di atas. Sebab warisan ideologi zaman kolonial sesungguhnya menyangkut hal-hal yang lebih luas dari pada sekedar menerima patokan-patokan barat. Dapat dilihat perluasan pemerintah kolonial, terutama suatu penetrasi kekuasaan asing dan eksploitasi ekonomi ataupun bentuk penguasaan lainnya, sehingga mengubah dan mengintensifkan sejumlah sikap yang berhubungan dengan identitas, sikap moral dan integrasi serta keterbukaan bagi kritik nilai-nilai yang berlaku dan susunan dalam masyarakat. Sebab itu nasionalisme itu sendiri seringkali dinyatakan menurut *interest* masing-masing kelompok masyarakat dan ini adalah merupakan karakteristik dari semua gerakan di masa itu. Lagi pula masa perubahan yang pesat itu justru timbul pada masa kekuasaan kolonial sedang menghalangi pergerakan kemerdekaan, dengan munculnya pelbagai aliran-aliran ideologis politik modern.

Jelaslah sekarang bahwa tidaklah tepat untuk mengira, bahwa tidak ada persamaan sikap dan pendirian dalam menanggapi anti kolonial di setiap daerah di Indonesia atau justru di negara-negara kolonial lainnya. Namun lebih sangat tidak tepat untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Sebagai akibatnya, setiap sikap yang berbeda memberikan tanggapan yang berbeda pula atas situasi kolonial itu. Dengan kata lain bahwa sifat khas dari permusuhan terhadap sistem kolonial ditentukan oleh sikap-sikap yang berhubungan erat dengan konteks sosial dan kultural setempat. Ini adalah benar dan sudah jelas sebagaimana yang dapat dipelajari dalam

beberapa studi terdahulu.

Lagi pula, selain dari ideologi nasionalisme ada lagi ciri ideologi yang lain, entah yang namanya messianistis atau millenaristis, maupun revivalistis atau nativistis. Dari itu walaupun masih mungkin untuk membedakan tema-tema nasionalisme anti kolonialisme pada masa-masa yang paling awal, kebanyakan nasionalisme adalah memang hal yang baru saja timbul waktu itu. Lagi pula hampir bisa dikatakan bahwa semua aliran-aliran ideologis politis yang mempengaruhi Indonesia di awal abad ke-20 pada umumnya berasal mula dari luar negeri, maka gerakan komunis pun juga demikian. Dan telah ditunjukkan bahwa perkembangan-perkembangan ini paralel dengan kebangkitan nasionalisme anti-kolonial di Indonesia. Juga telah ditunjukkan bahwa gerakan Pemberontakan Silungkang merupakan serangkaian dari program PKI, khususnya gerakan kaum komunis Sumatera Barat.

Sungguhpun pemberontakan itu bisa berhasil dipadamkan dalam jangka waktu yang relatif pendek, namun momok dari pemberontakan itu tidak dapat dikuakkan dengan mudah. Banyak konvensi-konvensi ungkapan metafora yang masih membekas dalam kalangan masyarakat luas sampai dewasa ini seperti "baulando meminta tanah", "aksi datang kantor", "lalu pinjaik lalu kulindan" dan banyak lagi yang lainnya dari ungkapan ironisme sejarah yang dihayati umum sebagai warisan sejarah gerakan pemberontakan itu.

Terlebih penting lagi ialah, keterkejutan mendalam yang muncul di kalangan masyarakat kulit putih di tanah jajahan umumnya. Kalangan penguasa kolonial, juga di negeri Belanda sendiri, telah menempatkan peristiwa itu seperti mempunyai arti penting yang sangat menetukan bagi arah masa depan politik kolonial.[12]

Bagaimanapun juga, terlepas dari prasangka-prasangka

apapun, studi ini masih ada manfaatnya, bukan saja untuk melihat dan memahami kekuatan-kekuatan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi yang pernah berkembang dalam sejarah Indonesia pada umumnya dan dalam sejarah Sumatera Barat pada khususnya. Tetapi, kiranya studi ini juga dapat menarik pelajaran berharga dari pengalaman sejarah kolonial di masa lampau.

***

Catatan Akhir

[1] Lihat Sartono Kartodirdjo, "Pergolakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia", *Lembaran Sejarah, No. 7* (Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah FSK Universitas Gadjah Mada, 1971).

[2] Schrieke (1973) dan serangkaian tulisan Taufik Abdullah (lihat daftar kepustakaan di belakang).

[3] Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan terhadap sasaran mereka yang terjadi di Silungkang telah dilakukan oleh si Jembel Salim Emek dan Berahim. Keduanya adalah penganggur yang sering bikin kegaduhan sebelum pemberontakan itu meletus. Lihat selain proses verbal dalam *De Locomotief*, 15 October 1927, dalam mana diungkapkan sedikit tentang latar belakang dari para pemberontak yang tertangkap.

[4] Mengenai riwayat Hadji Misbach, lihat surat kabar *"Doenia Achirat"* (10 Juli 1924), di bawah judul Hadji Misbach dibuang, p. 3; *Mededeelingen der Regering omtrent Enkele Onderwerpen* (Weltevreden: 1924), pp. 13-15.

[5] Konsep "kelompok kepentingan" di sini mengacu pada suatu kelompok yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berhubungan dengan suatu legitimasi atas suatu pola hubungan kekuasaan tertentu antara mereka yang memiliki kekuasaan (authoritive) dengan mereka yang tidak memilikinya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan kelompok kepentingan itu di sini tidaklah termasuk perkumpulan-perkumpulan seperti perkumpulan sepak bola, catur dan sejenisnya. Lihat Nasikun, "Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia" dalam *Seri Penerbitan Fak. Sospol. Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta: 1974), pp. 22-26.

[6] Pengertian terhadap proses ini, yaitu untuk membedakan tipe kepemimpinan modern dan tradisional barangkali akan semakin jelas dan

dapat dibantu dengan meminjam konsep kepemimpinan yang dirumuskan oleh Max Weber dalam apa yang disebutnya sebagai tipe ideal kepemimpinan dalam sejarah umat manusia. Weber menggunakan kategori kekuasaan yang melekat pada seorang pemimpin untuk menentukan (membedakan) tipe-tipe kepemimpinan itu, sehingga dengan demikian menurutnya ada tiga tipe kepemimpinan yang antara lain dilegitimisasikan oleh kekuasaan-kekuasaan tradisional, kharismatik dan rasional. Lihat Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, translated by A.M. Henderson and Talcott Parson (New York: Oxford University Press, 1947), khususnya pada pp. 324-385. W.M. Bruce Cameron, *Modern Social Movement: A. Sociological Outline* (New York: Random House, 1966), pp. 73-78. Max Weber juga membedakan pengertian tentang power dengan authority; dia mengartikan authority sebagai kemungkinan perintah-perintah seseorang dalam posisi atau kedudukan tertentu. Karena itu berbeda dari power yang kekuasaannya bersumber dari dalam kepribadian seseorang.

[7] Lihat H. Bouman, *Enige Beschouwingen Over de Ontwikkeling van Het Indonesisch Nationalisme op Sumatra's Westkust* (Groningen, Batavia: Bij. J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij nv., 1949).

[8] Lihat artikelnya, "The Communist Rebellions of 1926-1927 in Indonesia" dalam *Pasific Historical Review, XXIV* (1955), pp. 139-152.

[9] Dalam kata-kata seorang sejarawan: "Hanya sedikit saja kalau bukannya tidak ada sama sekali orang yang sebelumnya melihat, sebagaimana Snouck Hurgronje melihat, bahwa kolonialisme Belanda pada akhirnya akan sirna". Harry. J Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), p. 50.

[10] Shelton Stromquist "The Communist Uprisings Of 1926-1927 in Indonesia: A Reinterpretation", dalam *Journal of Southeast Asian History, Vol. 8 no. 2* (1967), pp. 189-110.

[11] Ibid., pp. 98-99.

[12] Lihat Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit....*, p. 87. Di dalam kata pendahuluan yang ada di penerbitan edisi bahasa Inggris: *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Document* (1960), H.J. Benda kemudian mengubah tesisnya tentang "proto-nationalist" itu, di mana ia setidak-tidaknya tanpa menyebutkan tesisnya yang terdahulu itu, mengakui secara implisit ciri embriyoner dari gerakan yang bercorak nasionalis.

Kepustakaan

DOKUMEN PEMERINTAH :

Geheime-nota voor Adviseur voor Inlandsche zaken over de Communisme ter Westkust van Sumatra's (30 Juli 1925).

Harry J. Benda dan Ruth. T. McVey, *The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. Ithaca, New York: Cornell University, 1960.

Mail rapport No. 934 X/'26: Nota over Toestanden ter Westkust van Sumatra (Agustus 1926).

Mail rapport No. 1320 X/'27 (Microfilm): *Politiek Verslag van de Residen Sumatra's Westkust over het le* (half-jaar, 1927).

Memorie van overgave van den aftreden den Gouvernour van Sumatra's Westkust W.A.C. Whitlau (1926).

Verslag van Bestuur en Staat van Nederlandsch-Indie, Suriname, en Curacao [Koloniaal Verslag, 1924, 1927].

SURAT KABAR

Bendera Islam (Jogjakarta 1924,1927, 1928).

De Locomotief Soematra issue (Semarang, 17 Oktober 1927).

Djago Djago! (Padang Pandjang, 1923-1924).

Doenia Achirat (Bukittinggi, 1923-1924).
Palito (Taroentoeng, 1927).
Pamandangan Islam (Padang Pandjang, 1923).
Panas (Siloengkang, 1925)..
Pemberita Hindia (Mingguan, Padang, 1922).
Petir (Padang, 1925).
Radio (Padang, 1923-35).
Seng Po (Fort de Kock [Bukittinggi], 1927).
Soeara Boemipoetra (Fort de Kock,1925-29).
Soematra Bergerak (Mingguan, Padang, 1922-23).
Soematra Tengah (Mingguan, Padang, 1914-15).
Soeara Tambang (Sawah Loento, 1925).

BUKU DAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH :

Abdullah, Taufik, "Adat and Islam: An Examination of Conflik in Minangkabau", dalam *Indonesia*, 2 (October 1966), pp. 1-24.

Abdullah, Taufik, *Identity Maintenance and Crisis of Identity in Minangkabau*, Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1978.

Abdullah, Taufik, "Masalah Kesadaran Sejarah dan Sejarah Daerah" dalam *Yaperna*, 2, Jakarta: Yayasan Perpustakaan Nasional, Agustus 1974, pp. 10-20.

Abdullah, Taufik, "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of Twentieth Century", dalam Claire Holt, at. al. (eds), *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca & London: Cornell University Press, 1972.

Abdullah, Taufik, School and Politics: *The Kaum Muda Movement in West Sumatra*. Ithaca, New York: Modern Indonesia Projeck Southeast Asia Program, Cornell University Press, 1971.

Abdullah, Taufik, (ed), *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1971.

Abdurrauf, *Komunisme dalam Teori dan Praktek*. Djakarta: Bulan Bintang, 1971. (disadur dari Richard M. Ketchum, *What is Communism: A Picture Survey of World Communism*).

Berkhofer, Jr., Robert F., *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. London & New York: A Free Paper Back, Macmillan Publishing Co. Inc., 1971.

Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (terjemahan). Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Benda, Harry J., "The Communist Rebellion of 1926-1927, in Indonesia" dalam *Pacific Historical Review*, 24 Mei 1955, pp. 139-152.

Blumberger, J. Th. Petrus, *De Communistische Beweging in Nederlandsch-Indie*. Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1941.

Bauman, Hendrik, *Enige Beschouwingen over de Ontwikkeling van het Indonesisch Nasionalisme op Sumatra's Westkust*. Groningen: J.B. Wolters, 1949.

Cameron, Wm. Bruce, *Modern Social Movements. A Sosiological Outline*. New York: Random House, 1966.

"Cooperatie op Sumatra's Westkust", dalam *Indische Gids*.

De Haan, Boterhoven, C., "Enkele Aantekeningen op het Rapport van Sumatra's Westkust", dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 7 (1928), pp. 297-308.

"De Indische Beweging, Politieke Situatie Onrust ter Sumatra's Westkust", dalam *Het Koloniaal Weekblad*, 51 (22 Desember, 1932).

De Josellin de Jong, P.E., *Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia*. Jakarta: Bhratara, 1960.

Dobbin, Christine, "Economic Change in Minangkabau as a factor in the Rise of the Padri Movement", dalam *Indonesia*, 23. (April 1977), pp. 1-38.

Dobbin, Christine, "Islamic Revivalism in Minangkabau at the turn of the 19 th Century," dalam *Indonesia*, 3. (1974), pp. 319-356.

Dobbin, Christine, "Tuanku Imam Bondjol (1837-1846)", dalam *Indonesia*, 13. (April, 1972), pp. 37-60.

Eckstein, Harry, "On the Etiology of Internal Wars", dalam Gorge H. Nadel, *Studies in the Philosophy of History, Selected Essays from History and Theory*. New York: Harper Torchbooks, 1965, pp. 117-147

Ensyclopaedie van Nederlandsch-Indies, Tweede Deel. S. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918, pp. 428-30.

Evers, Hans Dieter, "Changing Pattrens of Minangkabau Urban Landownership", dalam *BKI*, 131. (1975), pp. 64-96.

Federspiel, Howard M., "Islam and Nationalism", dalam *Indonesia*, 24. (October, 1977). pp. 39-86.

Gripp, Richard C., *The Political System of Communism*. New York & Toronto: California State University, Dod Meil & Co., 1973.

Hansen, Erik, "Marxist and Imperialism: The Indonesian Policy of Duch Social Demokratic Workers Party (DS-DWP), 1894-1914", dalam *Indonesia*, 16 (October, 1973), pp. 7-48.

Joustra M., *Minangkabau: Overzicht van het Land, Geschiedenis en Volk*. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923.

Junus, Umar, "Some Remaks on Minangkabau Social Structure", dalam *BKI*, 120. No. 3. (1964), pp. 293-326.

Kanh J.S., "Tradition Matriliny and Change Among the Minangkabau of Indonesia", dalam *BKI*, 132. (1976).

Kartodirdjo, Sartono, "Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sedjarah Indonesia", dalam *Lembaran Sedjarah*, Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah FSK-Universitas Gadjah Mada, 1970.

Kartodirdjo, Sartono, "Pergerakan Sosial Dalam Sedjarah Indonesia", dalam *Lembaran Sedjarah*. Jogjakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah FSK-Universitas Gadjah Mada, 1971.

Kartodirdjo, Sartono, *Protest Movements in Rural Java*. Singapura: Southeast Studies, 1973.

Kartodirdjo, Sartono, *The Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course, and Sequel. A Case Study Social of Movements in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1966.

Kato, Tsuyoshi, "Change and Cotunuity in Minangkabau Matrilineal System", dalam *Indonesia* 25. (April, 1978), pp. 1-16.

Kautsky, Jonh H., *Communism and the Polities of Development. Persistent Myths and Changing Behavior*. New York & London: John Willey and Sons, Inc.

Koch D.M.G., *Om de Vrijheid. De Nationalistische Beweging in Indonesie*. Djakarta: Jajasan Pembangunan MCML [1950].

Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1977.

Leyds, J.W., "Larassen In Minangkabau", dalam *Koloniale Studien*, 10 deel 1 (1926).

Lubis, Muhctar, "The Indonesia Communism Movement" dalam *Far Eastren Survey* (November 1954).

Mansoer M.D. et. al., *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara, 1970.

Mansuelt, W.M.F., "Onderwijs en Communism", dalam *Koloniale Studien* 1, Welteveden, 1928.

Marazek, Rudolf, "Tan Malaka: A Political Personalities, Stucture of Expxrience", dalam *Indonesia*, 14. (October, 1972), pp. 7-48.

Maretin J.V., "Disappearance of Matriclan Survivals in Minangkabau", dalam *BKI*, 117. 1961.

Marsden, William, *The History of Sumatra.* London, Kuala Lumpur: Oxford University Press, cetak ulang, 1975.

Maruhum Batuah, Datuk A.M. & HD.Dt. Bagindo Tan Ameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau.* Djakarta: Pusaka Asli, 1956.

McVey, Ruth T., *The Rise of Indonesian Communism.* Ithaca, NY: Cornell University Press, 1968.

Mendelaar, J.J., "Bestuur en Besturen in Minangkabau", dalam *Indische Gids* 62. (1940), pp. 529-549.

Mitchel, I.G., The Socio Curtural Environment and Mental Disturbance: Three Minangkabau Case Histories", dalam *Indonesia*, 7. (1969), pp. 123-138.

Mortimer, Rex, "Social Cleavage and Indonesian Communism", dalam *Indonesia*, 8. (October, 1969), pp. 1-20.

Naim, Muchtar, *Merantau. Pola Migrasi Suku Minangkabau.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.

Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Fak. Sospol, UGM, 1974.

Nasroen, Muhammad, *Dasar Falsafah Adat Alam Minangkabau.* Djakarta: Pasaman, 1957.

Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia 1900-1942.* London & New York: Oxford University Press, 1973.

Roesand, Van, "De Minangkabausche Toestanden, Orgaan van Nederlandsch-Indischen Politiek Ekonomischen Bond", dalam *Indische Gids* 4. (1923).

Roo, de La Faille, P. de, *Het Sumatra's Westkust Rapporten de Adat.* s'Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1928.

R.W.W., van, "Midden Sumatraansche Problemen", dalam *Indische*

Post, 31. (28 Juni, 3, 5 Juli, 1924).

Schrieke, B.J.O., *Indonesian Sosiological Studies. Vol. I*, The Hague: W. van Houve, 1955.

Schrieke, B.J.O., *Pergolakan Agama di Sumatera Barat. Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Terjemahan. Djakarta: Bhratara, 1973.

Schrieke, B.J.O., "Het Probleem der Bestuur Organisatie ter Sumatra's Westkust", dalam *Koloniale Studien*, No.1 (1927).

Smelser, J. Neil, *Theory of Collective Behavior*. London: Routledge and Kegan Paul, 1962.

Spat, C., *Adat en Sjariat in Alam Minangkabau*. Amsterdam: Vragen van de dag, (tt., micrifish).

Stromquist, Shelton, "The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: A Re-interpretation", dalam *Journal of Southeast Asia History*, Vol. 8, No. 2 (1967).

Van Niel, Robert, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. The Hague: W. van Houve, 1960.

Vlekke, Benard H.M., *Nusantara A History of Indonesia*. The Hague: W. van Houve, NV. Uitgeverij, 1966.

Wertheim, W.F., *Indonesia Society in Trasition: A Study of Social Change*. The Hague & Bandung: W. van Houve, 1959.

Westenenk, L.C., "De Islandsche Bestuurhoofden ter Sumatra's Westkust", dalam *Koloniaal Tjidschrijft* 2. (1993), pp. 390-408.

Wynaensdts, W. van Resand, "Het Verkeersvragstuk in Midden Sumatra", dalam *Koloniale Studien*, 2. Weltevreden: G. Kolf & Co., 1928.

Lampiran

Pemerikasaan Landraad Sawah Lunto terhadap Beberapa Orang Pesakitan dalam kasus Pemberontakan Silungkang 1927.*)

Pada hari Saptoe tanggal 18 juni 1927 *Landraad* di Sawahloento telah moelai periksa perkara pemboenoehan pada toean Leurs di Siloengkang jang berhoeboeng dengan pemberontakan pada 2 Januari 1927. Soesoenan Raad ada sebagaimana biasa.

Dalam hal ini perkara tertoedoeh 8 orang jang menjadi pemboenoehan seperti di bawah :

1. Mahamad Joesoef gelar Sampono Kajo
2. Berahim
3. Maali
4. Maamin gelar Lenggang
5. Simat gelar Pakih Simat
6. Leman
7. Badoe Paman gelar Pandoeko Malin
8. Samik gelar Malin Koening

Poekoel 8 persidangan dimoelai, semoea, persakitan disoeroeh masoek dan djaksa batjakan soerat toedoehan sebagai berikoet :

Toedoehan

A. Tantangan tertoedoeh 1.

Bahasa dianja pada petang Saptoe malam Minggoe tanggal 1 masoek 2 Januari 1927 kira-kira poekoel 3 dengan bertempat dalem ataupoen dekat roemah jang didiaminja di Siloengkang district dan onderafdeeling Sawahloento soeda prentahken pada kawan-kawanja jang sama-sama tertoedoeh dengan dia boeat memboenoeh toean Leurs dan dengen mempergoenaken pengareohnja pada orang-orang terseboet dan mengantjem itoe, bahoea kalaoe tidak maoe menoeroet prentahnja marika itoe akan di boenoeh.

Dengen sengadja telah bikin, soepaja kawan-kawanja itoe, soedah dengen berhati sabar dan sesoedah dipikir dengan bertenang-tenang dengan niat aken memboenoeh pada toean Leurst terseboet.

Marika dengen bersama-sama dan sepakat boeat melangsoengkan maksoednja itoe, telah pergi keroemah toen Leurs terseboet di Silungkang dengen kedjadian tertoedoeh 8 memoekoel toean Leurs itoe dengen lading sesoeda memetjah pintoe roemah: tertoedoeh doea memberikan satoe senapan jang berisi pada tertoedoeh 4 dengen mana teroes ditembaknya; tertoedoeh 3 menembak dengen pistol; teroedoeh 5, 6 dan 7 masing-masing memoekoel dan menoesoknja dengan sendjatanja tadjem, hingga toean Leurs itoe mendapet; 1 loeka berlobang boelat ditengah-tengah roeng dadanja sebelah sekelilingnja hitam, dan seloeroehnja moelai dari kepala

sampai pada kakinja mendapat beberapa loeka jang menjebabkan sebentar sesoedah itoe toean Leurs tersebut mendjadi mati.

Tentangan tertoedoeh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

Bahasa mereka itoe bersama-sama dan sepakat masing-masing sesoedahnja dengan berhati sabar dan berpikir dengan tenang-tenang lebih doeloe telah bermaksoed boeat memboenoeh toean Leurs pada Petang Saptoe malam Mingoe terseboet dengan sengadja boeat melangsoengkan maksoednja itoe, soedah pergi bersama-sama dari roemah bertoejdoeh 1 keroemah toean Leurs terseboet, dan berkedjadian seperti diatas.

B. Tentangan tertoedoeh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8

Bahasa mereka itoe bersama-sama dan sepakat dan beberapa orang lain pada malem jang terseboet diatas pada waktoe terdjadinja peroesoeahan jang terjadi pada waktu itoe telah mengambil dengen maksoed boeat goenanja sendiri dengen tida berhak: 140 oetjis, 83 pelor dan 25 dunamiet jang berharga f. 16-50 dari dalem goedang B O W di Siloengkang kepoenjaannja Gouvernement, pendeknja kepoenjaan orang lain dari mereka jang tertoedoeh, sesoedahnja mereka itoe memetjah pintoe goedang, boeat membikin djalan masoek kedalamnja oen toek melakoekan penjoerian jang terseboet diatas.

Kesalahan mana ada melanggar fatsal 55, 340.363. dari *Wetboek Van Strafrecht.*

Pemeriksaan

Sesoeda persakitan mendengar dan dikasi mengerti apa jang ditoedoeken pada mereka, maka bermoela dipriksa persakitan Mohammad joesoef gelar Sampono kajo, sedeng lain-lain persakitan disoeroeh keloear.

Pr. Betoel sebagaimana jang ditoedoehken pada kaoe itoe.

Pes. Betoel tetapi kerna disoeroeh Taib

Selainnja dari jang tertoedoeh ada joega lain orang jang toeroet lagi ?

Jang saja inget Karim, Lenggang Maradjo Oenoes, Raoef dan Parin sedeng lain dari itoe masih banyak orang lain lagi tetapi oleh saja begitoe terang namanja.

Kaoe soedah masoek communist?

Ja, 5 boelan seblonnja pemberontakan sama Taib dan bajar F. 83,-

Soeda berapa lama terdirinja perkoempoelan communist di Siloengkang?

Saja tidak ketahoei bener, hanja sadja saja poenja kaartjis ada bernomor 1140.

Siapa jang djadi kepala diitoe waktoe?

Doelonja saja denger kabar Soelaiman Labai dan M. Joesoef gelar Radjo Katjik dan Dt. Bagindo Ratoe, tetapi waktoe itoe jang saja taoe. Taib, Alimin dan Tahala gelar Radjo Sampono.

Ada sebab Taib menoempang diroemah kaoe?

Taib menoempang sendiri 20 hari sebelonnja pemberontakan terjadi, boet oeroes pergerakan communist sebab harinja, karna saja tida maoe di boenoehnja.

Apa kaoe tida djadi kepala atau menoeloeng Taib dalem pergerakan communist.

Tida

Sebab apa kaoe masoek communist?

Karena takoet aekan diboenoeh

Koe taoe maksudndja communist?

Menoroet keterangan Taib, sekarang belasting terlaloe berat, sebab itoe kita tjari permoefakatan aken beroentak mengoesir pamerentah dan meboenoe Ass. Resident, Controleur dan semoea penggawe- penggawe pamerenta dan nanti kaloe rajat soeda-menang Soeleman Labai diangkat djadi kepala.

Apa kaoe sendiri berasa berat itoe belasting ?

Tida saja bajar belasting teoen 1926 banjaknja f. 46,- dan belasting auto f 75 ,-

Kace bekerja apa?

Saja ada mendjadi soedagar kain, getah, dan mempersewakan 3 auto.

Waktoe teon 1926 bagaimana djalan perniagaan kaoe?

Sedeng sadja

Djadi kaoe terpandang satoe orang jang hartawan boeat bagian Siloengkang?

Ja,

Sebelon berontak kapan Taib mengadaken rapat ?

Kira-kira 15 hari sebelonnja pemberontakan terdjadi dan 2 hari sebelonnja rapat, saja disoeroeh oleh Taib boeat panggil Salim Emek.

Apa jang dibitjarakeen di itoe rapat ?

Taib bilang, nanti pada petang Saptoe tanggal 1 Januari 1927 akan diadakan pemberontakan soepanja orang-orang semoea berkoempoel di Siloengkang dimoeka roemah saja pada poekoel 8 malem, sedang saja disoroeh boeat memberi tahoekan pada waktoe jang ditentoekan itoe pemberontakan.

Pada siapa jang soeda diberi taoekan?

Pada Latip kepala dari Pianggoe dan Pondek kepala Taroeng-taroeng.

Kaloe begitoe kaoe dengen soeka, soeda beri tempat pada communist boeat berapat dan menoeloeng memberi taoekaen pada orang-orang jang aken berontak.

Boekan saja soeka , tetapi menoeroet kerna terpaksa.

Dari siapa kaoe dapet prentah jang 1 Januari 1927 moesti berontak?

Dari Ariffadillah di Padang Panjang.

Poekoel berapa orang banjak itoe berkoempoel di moeka roemah kaoe?

Betoel sebagaimana jang diberi taoeken jaitoe poekoel jam 8 pada petang Saptoe itoe orang soeda berkoempoel.

Orang-orang itoe setengahnja ada jang pake sendjata, sedang pada siapa jang tidak mempoenjai sendjata Taib berikan masing-masing satoe roesoes dan boeat orang-orang jang berdjoemlah kira-kira 250 ada disediakan makanan di waroengnja Berahim, jang mana segala ongkost ada ditangoeng oleh Taib.

Siapa jang bitjara diitoe waktoe?

Taib sedeng saja sendiri tida ada berbitjara apa-apa.

Doeloe kaoe menerangkan ada kaoe toeroet berbitjara mengatakan saatnja communist soeda dateng soepanja diadakan pemberontakan.

Betoel, saja berbitjara jtoema menjamboeng pembitjaraanja Taib sedeng boeat mengatoer itoe barisan saja tida toeroet.

Apa itoe orang banyak semoea boeat berontak di Siloengkang sadja?

Tida, Taib bagi-bagi, jaitoe boeat ke Moeara Kalaban dan ke Sawah loento semoea ada berjoemlah 200 orang sedeng jang selebihnja tinggal di Siloengkang.

Poekoel berapa itoe orang-orang berangkat?

Kira-kira poekoel 11, dan sesoedah itoe barisan berangkat, sebentar antaranja Taib poen berangkat poela menoedjoe djalan arah ka Moera Kalaban sedeng sebelonnja berangkat ia ada perintahkan pada saja soepaja georoe-goroe, toekang-toekang mas dan toean Boentjit (Leurs) diboenoe mati.

Apa sebab itoe orang-orang mesti diboenoe?

Karan mereka itoe ada jang menjadi mata-mata dari pemerenta dan toean Leurs itoe kerna ia orang Belanda.

Poekoel berapa koe kembali dari memboenoe goeroe-goeroe dan tukang-tukang mas itoe dan sesoedahnja itoe oang-orang banjak pergi ke station lebih doeloe, baroe kira-kira poekoel 2.30 mereka dateng kembali kewaroeng boewat makan dan minoem.

Beberapa orang jang keoembali ?

Ada kira-kira 20 orang saja tida ingat betoel lagi.

Sesoeda mereka makan saja beri inget sama Karim dimoeka orang-orang itoe, soepaja mereka pergi ke roemah toean Leurus itoe?

Karim, Sampono Mardjo, Oenoes, Roef selainnja dari Leman semoea jang soeroeh kasikan oleh djadi anak samang saja.

Maali pistol atau lading, Parin kapak, Samik linggis, Oenoes dan Roef membawa lampoe strongking, jang lain saja tidak inget lagi.

Apa kau tidak antjem pada mereka boet moesti pergi ke roemah toean Leurs.

Tida.

Poekoel berapa itoe orang-orang kembali?

Kira-kira poekoel 4 mereka dateng kembali dengen memberi taoeken jang toen Leurs soedah mati di boenoe, serta

Maali kesikan djoega pada saja dybeberapa dynamite dan oetjisnja jang diambil oleh mereka dari dalem goedoeng. B.O.W, jang mana saja itoe barang disimpen lantai.

Ada mereka terangken siapa jang memboenoe?

Maali dan Maamin

Berapa banyaknja pelor jang kaoe kasikan bersama senapan pada Berahim?

Kalaoe saja tida kliroe ada berjumlah 23 dan waktoe dikoempoelkennja itoe senapan tjoema ketinggalan 1 peloer sadjajang ada didalemnja.

Apa boleh jadi itoe pelor-pelor soeda dipergoenakan boeat goeroe-goeroe dan toekang-toekang emas ditembak?

Ja, barangkali boleh djadi

Kapan kau ditangkap

Minggoe tanggal 2 Januari 1927

Apa sebab kaoe ditangkap?

Itoe waktu saja dalem bersemboenji, karena takoet sama Salim Emek dan orang-orang communist jang memaksa saja djoega boeat tjari orang-orang jang aken diboenoe; kebetoelan sekali itoe toean Ass. Resedent bersama *Onderdistrict-hoofd* dan beberapa politie liwat moeka roemah saja dan bilang joega soepanja orang-orang jang berada diatas roemah semoeanja toeroen tida maoe toeroen dipasang.

Lid Dr. Radjo Batocah: Kaoe taoe itoe senapan aken dibawanja ka roemah toean Leurs itoe?

Pes. Taoe.

Pr. Doeloe kaoe terangken bahoae itoe senapan kaoe kasiken sama Berahim boeat dipakai oentoek pemboenoe orang-orang jang moesti di boenoe.

Pes. Tida, saja kasiken tjoema boeat dipakai sadja.

Kaoe kenal ini senapan

Ja, itoelah senapan jang saja soeroeh kasiken sama

Berahim.

Lid Dr. P. Malano, Semoea orang-orang communist itoe laki-laki.

Tida tahoe.

Semoea pake salempang?

Ja, tetapi boekan kain hanja benang merah sadja beberapa lembar.

Apa sendjata Taib itoe Waktoe?

Pistol.

Pr. kaoe soeda taoea dihoekoem?

Pes. Belon

Sesoeda pause dipanggil dan ditanja Pesakitan kedoea Berahim.

Pr. Betoel sebagaimana jang ada ditoedoehken pada kaoe itoe?

Pes. Betoel

Kaoe soedah masuk communist?

Soeda, sama Taib kira-kira 3 boelan sebelomnja berontak dan bajar f.0,83.

Doeloe kaoe tinggal dimana?

Saja poenja tempat tinggal tetap di djambi, tetapi saja sering djoega ke Singapore dan Soerabanja dan pada 4 boelan jang belakangan ini sebelonnja pemberontakan saja tinggal di Sioelungkang berlepau-nasi bertempat di ebelahnja toko Mohammad Joesoef tertoedoeh satoe. Kapitaal saja dapet dari Mohammad Joesoef dengan perdjandjian nanti keoentoenganja dibagi 5 dengan Oemar, Laoeat, Endang, Saja dan Mohammad Joesoef (pes .1)

Apa sebab kaoe masoek Communist?

Taib bilang kalau tida masoek communist nanti dapat soesah, sedang maksudnja communist jang sedjati sama sekali sadja tida taoe.

Apa belasting kaoe berasa berat?

Tida, di Siloengkang saja dikenakan pada taoen 1924. f. 240 dan lain taoennja daja kena di Djambi dengan bajar f. 12.90

Doloe kaoe ada menerangken, jang menoeroet katanja Taib, karena rakjat terlaloe berat belasting.

Saja tiada bilang begitoe

Siapa jang djadi kepala communist di Siloengkang?

Itoe waktoe jang saja taoe Taib, tetapi doeloenja saja dapat kabar Soelaman Lebai dan M. Joesoef gelar Radjo Katjik.

Ada kaoe toeroet rapat di rumahnja tertoedoe satoe?

Tida

Kapan kaoe taoe orang berontak?

Saja baroe tahoe pada hari djoemahatnja, karena tertoedoeh kesatoe bilang sama saja, sediakan makanan banyak-banyak dan di soeroeh beli 2 piokoel beras, kira-kira 75 kilo daging jang berharga kira-kira f. 60,-.

Siapa jang bajar?

Jang kasi oewang M. Joesoef (tertodoeh satoe)

Pokoel berapa itu orang banjak dateng?

Kira-kira poekoel 7 malem pada petang Saptoe

Orang-orang jang berjoemlah lebi koerang 300 soeda dateng, hingga dimoeka dan didalem roemahnja M. Joesoef datang, hingga dimoeka dan didalam roemahnja M. Joesoef penoe dengan orang, setengahnja ada jang pake sendjata dan mana jang tida mempoenjai, oleh M. Joesoef (tertoedoeh 1) dikasi sendjata roedoes.

Siapa jang bitjara di itoe waktoe?

Taib, Katab, Kamaruddin gelar Manggoeloeng Djamin dan M. Joesoef (tertoedoeh satoe), tetapi apa bitjaranja mereka itoe koerang terang oleh saja karena saja denger sembari

meladeni orang banyak, jang saja inget jalan pergi ke Sawah Loento boeat boenoe pada semoea Belanda dan penggawe [pegawai] pamerentah.

Poekoel berapa itoe barisan dibagi-bagi ka Sawahloento, ka pintoe lobang, Moeara Kalaban sedeng lebihnja tinggal si Siloengkang dan sedjoemlahnja kira-kira 30 orang kemoedian di bagi poela boeat djaga simpang-simpang djalan.

Berapa banjaknja dalem satoe barisan?

Tida taoe

Siapa jang kasi prentah boeat boenoe itoe beberapa orang?

Kata M. Joesoef nanti poekoel 2 kita moelai memboenoe goeroe-goroe toekang-toekang mas, hal techef jang diseboetkan namanya satoe persatoe dan begitoelaah pada poekoel jang tersebort saja dengen bersenjataken senapan dengen beberapa kawan-kawan lain soeda djalan itoe prentah dan waktoe kami aken boenoe pada haltechef kebetoelan itoe orang tida ada diroemah.

Apa kaoe tida tjari pada itoe haltechef?

Tida, hanja kami soeda bakar sadja roemahnja dan station dibakar.

Sesoeda itu kaoe orang kemana lagi?

Kami kembali kemoeka roemahnja M. Joesoef dimana kami diprentahkennja boet pergi ka roemah toean Leurs (Jang dinamai oleh pesakitan toean Boentjit) jang djaohnja dari pasar kira-kira setengah paal.

Siapa-siapa orang jang pergi kesana?

Moelai dengen bersendjataken pistol dan klewang, Parin Memake, piso kampa dan membawa doea bom, Sirin membawa Linggis jang laennja pake lading-lading sedeng Raoep dan Oenoes toekang bawa lampoe strongking jang

soeda terpasang serta tertoedoeh. Tetapi M. Joesoef sendiri tida ikoet.

Kenapa kaoe soeka sadja toeroet?

Takoet aken diboenoei

Bagaimana djalan melaoekan itoe pemboenoehan?

Sesampenja kami disana, moela-moela dimoeka roemahnja orang aken diboenoe diadakan permoefakatan. Kemudian orang jang banjak itoe oleh Karim dibagi boeat jaga disekeliling itoe roemah dan sesoeda itoe lantas Parlin lemparkan satoe lagi; baroe rusak.

Dari dalem itoe roemah kedengaren toean dan njonja Leurust bertereak jang menjatakan ia tida bersalah.

Siapa jang memboeka pintoe?

Tia taoe, karena semoea sudah berkoempoel dimoeka itoe pintoe, dan sewaktoe pintoe terboeka kelihatan Maali jang moela-moela masoek kedalam diikoeti oleh Maarkoef. Badoe Raman, Maamin, Leman, Simat Sanik, dan Raoef serta Oenoes bawa lampoe, jang lain tinggal di bawah.

Kapan kaoe kasiken senapan pada Maamin?

Waktoe ia aken naik toe roemah saja kasiken padanja sedeng saja melihat dari djalan besar dan dari satoe papan jang terboeka kelihatan Maali tembak pada itoe boean jang sedeng bertereak-tereak.

Kaoe lihat itoe toean?

Tida, Saja tjoma lihat sebentar sadja waktoe ia terdjatoeh sesoedanja saja denger boeni pistoel dan antara tida berapa lama kedengaran poela boeni senapan jang tentoe sadja ada keloar dari senapan jang saja kasiken pada Maamin.

Sesoedah itoe baroe saja lihat keatas, dan kenjataan toean itoe soeda mati dan mendapat beberapa loeka dibadanja.

Doeloe kaoe terangken, tempo pintoe terboeka kaoe naik keatas loteng, kaoe lihat Maali menembak menoedjo

kebilik jang ditempati oleh Toean Leurs, kaoe kasiken senapan pada Maamin jang soeda tembakan doea kali bertoeroet-toeroet, soeda itoe baroe kaoe pergi menoenggo kejalan besar.

Ja, Betoel, saja loepa.

Begitoe joega kaoe terangken doloenja, sesoedanja selesai pemboenoehan itu, Maamin toeroen kebawah dan kasiken kembali itoe senapan pada kaoe, dan tida naik boeat lihat pada toean Leurs.

Ja, betoel saja tida naik, tjoema lihat dari tjelah dinding sadja dan kelihatan itoe toean dapetken loeka-loeka.

Dari sana kemana lagi?

Kami pergi kegoedang B O W jang berantara kira-kira 20 meter dari itoe roemah jang disoeroeh oleh Maamin dan Karim.

Itoe goedang terkoentji?

Ja, orang banjak bersama-sama boeka itoe pintoe goedang dengan dan berganti-ganti meroesakkan dengan kapak.

Siapa jang masoek kedalam?

Maali dan ambil beberapa oetji, doea goedang soemboe, dan beberapa kalamainja, diboengkoes dengan kain bawah kepasar dan dikasikan sama M. Joesoef.

Dari sana kaoe kemana?

Saja poelang keroemah sadja, karna mata sadja sangat mengantoek. Poekoel 6 kembali itoe waroeng saja boeka karna begitoe prenta dari M. Joesoef soepanja orang djangan taoe.

Kira-kira poekoel 7 kedengeran boenji senapan arah di station, kerna saja ketakoetan, itoe waroeng saja toetoetup kembali dan saja bersama M. Joesoef naik keatas loteng ditangkap?

Kira poekoel 9 pada itoe hari Minggoe dari bawah kedengaran secara jang menjoeroehken toeroen kakoe tida

maoe toeroen ditembak kerna takoet kami toeroen, jang mana dibawah soedah menanti toean Ass. Resident Onderdistrictshoofd dan beberapa politie.

Apa sebab doeloe kaoe tidak terangken jang Leman dan Badoe Teman ada toeroen bersama-sama pergi keroemah toean Leurs?

Sekarang baroe saja ingat.

Dari mana dapat itoe bom ?

Jang saja taoe dari M. Joesoef

Dimana tertangkanja itoe senapan?

Poekoel 6 waktoe waroeng saja boeka, dateng Aminoellah minta itoe senapan dan sebentar antaranja dateng itoe Salim Emek dan Boejoeng gelar Soeltan Sinaro minta sendjata, saja bilang tida ada lagi.

Kaoe kenal sama ini senapan?

Ja, itoelah senapan jang saja bawa itoe malem

Ini pistoel kaoe kenal?

Ja, Maali jang biasa pegang seperti itoe

Kamoe soeda taoe dihoekoem.

Beloem.

Ditanja pesakitan pertama jang mengatakan merasa keberatan jang Berahim memenerangkan ia ada djadi kepala serta memaksa orang itoe.

Sesampe disini poekoel 1.20 persidangan ditoetoep dan disamboeng pada hari Senen dihadep.

Dipanggil dan ditanja pesakitan ketiga Maali.

Pr. Betoel sebagaimana jang soeda ditoedoehkan pada kaoe itoe?

Pes. Betoel

Kaoe masuk communist?

Ja, sama Taib jang itoe Waktoe ada djadi kepala bersama Alimin.

Apa sebab kaoe masoek communist?

Kerna terpaksa

Apa maksoed Communist itoe?

Menoeroet keterangan Taib aken mentjari sepakat boeat belasting boet beroentak, jang kalaoe soeda berhasil belasting dan oewang serajo dihapoesken.

Apa boeat belasting kau merasa berat?

Ja, terlaoe berat, dalem taoen 1925 f. 240 tetapi didalam tahoen 1926 saja moesti bajar f. 7. 80.

Boleh djadi dalam taon 1925 salah ditaksir atau di taon 1926 pentjarian kedoe betambah.

Saja tetap menjadi koeli toekang djahit.

Kapan kaoe boenoei pada toean Laurs?

Moela-moela pada petang Djomahat saja tamoe dengan Jamin gelar Radjo Boejang di Pasar, dengan kasiken satoe pistoel bersama 18 peloernja ia kasi itoe sama saja soepanja datang besok sore jam 8 dimoeka roemahnja M. Joesoef di pasar. Kebetoelan besoknja kira poekoel 6.30 Karimoen jang tinggal deket roemah saja kasi taoe jang seorang suda banjak dateng ka pasar, sebab mana saja berangkat kapasar.

Pr. Poekoel berapa kaoe sampe di pasar?

Pes. Kira-kira poekoel 8 saja di pasar dan depati orang soeda banjak, jang berjoemlah kira-kira 150. Separoeh dari mereka sadja lihat ada pake memakai sendjata, begitoe joega ada poela jang makan diwaroeng Berahim. Sebentar antaranja itoe orang banjak soeda pakai benang merah tetapi dari siapa itoe benang didapat sejatidak tahoe, dan Djamin ada dibilang sama saja apa maoe toeroet ka Moera Kalaban atao maoe tinggal di Siloengkang; kaloe tinggal Si Siloengkang moesti toroet perintah ia atau M. Joesoef jang mana saja bilang saja minta tinggal di Siloengkang.

Sedeng orang-orang lain itoe soedah berdjalan kamana

jang diprentahkan.

Sampe poekoel berapa kaoe tinggal dimoeka roemah itu ?

Kira-kira poekoel10 sesudah itoe orang berangkat, kami jang tinggal berdjoemlah kira-kira 20 orang berdjalan poela disekeliling kampoeng dan kembali kamoeka roemah M. Juesoef Sebentar kami disana M. Djamin kasi taoe sama orang-orang itoe, soepanja pergi keroemah Mahmoed, dan kira-kira poekoel 11 soedah goerge itoe mati, kami kembali lagi ke waroeng dimana saja tidoer.

Doloe kaoe menerangkan M. Joesoef ada kasi prentah buat boenoe pada itoe goeroe-goeroe Mahmud, Rahman Djoemin dan toekang-toekang mas Kari Soetan, Menek Seteroesnja boenoe pada tuan Leurs.

Ja, betoel ia ada prentahkan begitoe ke sekeliling kampoeng, ia itoe waktoe ada berdiri di pintoe, tetapi tida seboetken namanja satoe persatoe.

Sampe poekoel berapa kaoe diitoe Waroeng?

Itoe orang-orang kembali lagi boeat membonoe goeroe-goeroe jang lain dan toekang-toekang mas, tetapi saja tida toeroet, kira-kira poekoel 1 itoe kembali ke itoe tempat dan teroes poela ke station. Sepoelangnja dari station kira-kira poekoel 1 itoe orang kembali lagi ke waroeng, dan sesoeda makan, M. Joesoef ada kasi prentah soepanja orang pergi ka roemah toean Boentjit (Leurs).

Apa M. Joesoef berbitjara dengen keras?

Ja

Pr. Poekoel berapa kau berangkat ka roemah toean itu?

Pes, Sebentar sesoeda itoe kami teroes berangkat, sedang seja itoe waktoe ada membawak pistol, Srin bawa linggis.

Karim bawa pistol dan lading, Berahim bawa senapan. Parin bawa kampak dan bom, Oenoes dan Raoef masing-

masing bawa lampoe stromking. Maaroef (ini orang masih lari belon tertangkap) bawak pistol. Simat, Badoeraman, Samik masing-masing bawa lasing dan Leman saja tida inget itoe waktoe sedeng M. Joesoef sendir tida toeroet tjoema waktoe kasi prentah sadja.

Kira-kira satoe KM dari pasar, sesampe kami disana, moela-moela saja berdiri djoega, kedengaran bom, berbonji, waktoe saja dekat kesitoe kenjataan pintoe roemah itoe rusak sedikit, dan Samik boeka itoe roemah dengen linggis sampe terboeka.

Orang-orang banjak masoek, sesampenja didalem kelihatan Maamin soeda doeloe naik keatas loteng itoe roemah denger bawa senapan jang dikasiken oleh Berahim, dibelakangnja Karim dan saja serta orang-orang lain. Karim perintahken pada Maamin soepanja ditembak menoejoe kamarnja toean Leurs, tetapi maamin tidak toroet itoe perintah, jang Mana Karim soeroeh pada saja dengan keras, karena takoet, saja lepaskan tembakan doea kali menoedjo itoe kamar; sesoedah saja tembak baroe Maamin tembak poela satoe kali dan kedengaran itoe toean bersama njonja bertereak.

Siapa lagi kawan-kawan kaoe itoe jang naik?

Onoes dan Raoep ada toeroet di blakang saja dengan memegang lampoe strumking masing-masing ditangan saja.

Samik naik poela keatas loteng itoe, dan kemaek pintoe kamarnja itoe toen jang masih terkontji hingga terboeka.

Sesoeda pintoe terboeka kaoe lihat itoe toean?

Sesoeda pintoe terboeka Karim prentakan lagi pada saja boeat tembak itoe toean, soeada itoe Maamin tembak poela satoe kali, hingga kelihatan itoe toean terdjatoeh dimoeka pintoe kamar dibelakang Karim sesebagai belon poe .vas prentakan lagi apda saja boeat tembak, tetapi saja bilang pistol; saja boet tembak, telah roesak dan Karim kesiken

pada saja lading serta disoeroeh poekoel ken, saja menjawab itoe Simat, tetapi Karim prentahkan djoega soepaja dipoekoel, jang mana teroes saja poekoel doea kali.

Ld DR Batoeah, Siapa lagi jang diatas itoe roemah?

Pes. Njonja dan 5 orang anaknja

Pr. Apa sebab itoe njonja tida diboenoe?

Pes. Karna prentah dari Karim itoe njonja tida boleh diboenoe.

Dari sana kaoe kemana?

Karim prentahkan soepanja kami pergi ke goedang jang djaoe dari roemah itoe toean.

Siapa jang boeka itoe goedang?

Saja, Maamin dan Samik dengen kampak dan linggis.

Sesoedah terboeka saja ambil dari loear satoe pak dinamiet serta soemboe soebo dan laloe saja boengkoes dan teroes dibawa kerumah M. Joesoef, jang mana itoe barang saja kasikan sama M. Joesoef. Sebentar antaranja dateng Taib kasi prentah soepaja itoe barang saja simpan dan hari Senen baroe dikembaliken padanja.

Kemana kaoe bawa itoe barang?

Saja bawa bersemboenji masoek oetan, dan hari senen kira-kira poekoel 09.30 baroe itoe barang saja kasikan sama Taib sesoeda itoe saja makan diwaroeng Brahim, Taib perintahkan lagi pada saja boeat toroet barisan IPO menati kedatanganja saldadoe didekat jembatan.

Sempenja kami disana kami ddipasang oleh saldador hingga satoe antara kami dari barisan IPO itoe nama daham menjadi mati sedang saja joega kena oleh pelor saldadoe jang mengenai tangan kiri saja ,(Persakitan waktoe dihadapan landraad masih diperban tanganja) jang tidak berapa lama datang mertoea deket roemah datang poela Berahim mertue laki boeat toelonegn saja serta ambil pistol saja boeat

disimpanja.

Kapan kaoe ditangkap?

Delapan hari sesudah itoe saja ditangkap oleh soldaoe dalem roemah saja.

Doloe kaoe menerangkan, ada melihat toean Leurust berdiri dimoeka tempat tidurnja dan tembak tiga kali serta boekan diperintahken oleh Karim tetapi oleh Berahim jang mana keterangan kaoe itoe banjak berbeda dengan sekarang?

Sebetoelnja doeloe doega saja tjeritakan seperti tadinja, tetapi Hoofddjaksa soera djoega saja mengakoe seperti jang ditoelis.

Koe taoe senapan?

Ada, seperti jang dipake Berahim itoe malem.

Kaoe toean djoega ini pistol?

Ada, jang saja pake malam

Apa sebab toean Leurs di boenoe?

Kerna aken mengambil dunamiet perloe itoe toean diboenoe, jaitoe menoeroet apa jang diprentahken oleh Taib.

Kaoe soeda tahoe dihoekoem?

Belon

Sesoeda Paze dipanggil pesakitan keempat Maamin.

Pr. Betoel sebagaimana jang ditoedoehken pada kaoe itoe?

Pes. Betoel kerna dipaksa oleh karim (boet djawab itoe pesakitan soeda poeter-poetar pembitjaraannja, hingga terpaksa president kasi nasehat aken mengakoe teroes terang sadja, karna dengan mana ia djadi bisa dapet hoekoeman jang berat).

Apa kaoe soeda masoek communis?

Doloe betoel saja soeda masoek sama Karim, blakangan sesoeda saja peenja roedoes ditangkap, saja minta brenti, tetapi M Joesoef antjem boet pada saja karna mana saja tinggal tetep djoega djadi communist?

Apa salahnja kaoe tida masoek communist?

Tida dapet beli beras dan lain-lain serta diantjem aken diboenoe.

Apa maksoed communist itoe?

Menoeroet keterangan Karim belasting dan rodi terlaloe berat, aken diadaken pemberontaken boeat memboenoe Ass. Resident, Controleur dan lain-lain penggawe, dan kalaoe berhasil belasting tida mebjar lagi.

Apa kaoe dengan soeka toeroet itoe?

Ja

Kalao begitoe kaoe menoeroet boekan karna takoet.

Moela-moela betoel, tetapi blakangan betol karna takoet.

Apa boeat belasting kaoe merasa berat?

Tida, saja bajar belasting f 4.30 orang serajo f. 1.50 dan rodi f 5 dan itoe djoemlah masih bisa saja bajar.

Kapan kaoe memboenoe toen Leurs

Saptoe sore sepoelangnja saja dari rimba kira-kira poekoel leontoe, sesampenja saja dipasar dimoeka roemah M. Joesoef kedapatan orang soeda banjak jang berjoemlah kira-kira 100 dan mangkin lama mangkin bertambah djoega. Itoe orang-orang setengahnja ada jang pake sedjata dan setengahnja lagi termasoek djoega saja tida ada pake sedjata serta mariksa dikasi makan di waraoengnja Berahim. Saja sesoeda makan tertidoer dalem dapoer. M. Joesoef sampe pokoel 9 dan poekoel 11 soedah kami minoem kopi, pada kami dikasikan benang merah, disoeroeh semoea kedjalan besar dimana Samid prentahkan pada saja beserta Mat Lilah

dan Samik boeat menoenggoe didjalan jang menoedjoe ka Soengai Lasi, kalaoe ada orang dateng ditahan disitoe.

Sampe poekoel berapa kaoe menoenggoe disitoe?

Kira-kira poekoel 3 dari arah station kedengaren boeni letoesan jang keras, kerna takoet saja maoe lari, tetapi ditjegah oleh kawan-kawan saja disitoe, dan tida lama dateng orang banyak dengen membawa lampoe stromking, serta Karim prentahkan; pada saja bersama kawan-kawan saja itoe, pergi ka roemah toean Leurs boeat toeroet memboenoe; moela-moela saja menjangkal, tetapi karna atjeman akhirja saja toeroet djoega.

Apa maksud kaoe menoroet itu?

Menoeroet saja dengan tidak bermaksoed djahat. Sesampe diroemah toean Parin, kerna takoet saja lari kapinggir soengai, tetapi Karim jang dapet lihat saja lari, teroes-boeroe pada saja dan dibawanja lagi keatas dimana saja ditendang dan Berahim kasiken pada saja satoe senapan moesti tembak itoe toean. Dimoeka pintoe saja dapati Samik lagi boeka pintu dengan linggis. Waktoe pintoe terboeka orang banjak masoek ka dalem dan waktu saja sampai ke dalam, kelihatan Maali soeda naik keatas loteng bersama toekang lampoe dari djanjang saja lihat, Maali soedah boeka pintoe dengen paksa, dan seblon terboeka Maali soeda lepasken tembakan 3 kali menoedjo kamar itoe toean.

Sesoeda pintoe terboeka dimana kaoe lihat itoe toean?

Saja liat ia berdiri dekat medja jang mana teroes saja tembak satoe kali. Sesoeda saja tembak dengen tida lihat apanja jang kena, saja toeroen kebawah dan oendjoekken kembali itoe senapan pada Berahim.

Kaoe kemana?

Waktoe saja maoe poelang, Maali pang[illegible]l pada saja, dan waktu kembali Karim soeroeh poela saja boeat ambil dynamit

dari dalem goedang itoe, Maali bawa itoe dynamiet diboengkoes dengen kain dan sesoeda itoe baroe saja poelang.

Kapan kaoe ditangkap?

Kira-kira satoe boelan sesoedah terjadi itoe pemboenoehan, saja ditangkap oleh soedadoe di roemah saja.

Menoeroet keterangan kaoe jang doeloe ada berbeda djaoeh sekali dari keterangan kaoe jang sekarang jang menerangkan menoeroet tidak karena takoet, tidak lari bersembunji ka tepi soengai, tidak dipaksa oleh karim, terima senapan waktoe soeda berada dalem roemah, tembak pada toean Leurs jang lagi berdiri dimoeka tempat Maali tembak beberapa kali, Simat poekoel dengen lading 3 kali. Leman toesoek dengan piso satoe kali dan waktoe aken pergi ka goedang tidak tjeritaken maoe poelang, tetapi teroes ke goeadang?

Pesakitan menjawab dengen sedikit bingoeng dan kebanyakan akoei keterangannja jang doeloe itoe.

Apa sebab itoe toean dibonoe?

Tidak taoe

Lebih Djaoe doeloe kaoe terangkan djoega, kerna terpaksa maoe boenoe itoe toean dengan piso sadja, tetapi sesampe disana kerna Berahim soeda kesiken senapan, kaoe tida djadi toesoek dengen piso, tetapi tembak dengen senapan?

Ja betoel begitoe

Soeda biasa kaoe mempergunakan senapan?

Belon, tjoema saja sering lihat orang menembak sadja.

Siapa jang lain berada diatas itoe roemah?

Saja lihat tjoema njonja dari itoe toean sadja

Kaoe taoe ini senapan?

Ja, itoe matjem senapan jang saja pake di itoe malem.

Ini pistoel kaoe taoe?

Tida

Belom taoe dihoekum?

Belon

Ditanja pesakitan Berahim, apa sebab ia berikan itoe senapan sama Maamin jang mana di djawab oleh Berahim kerna disoeroeh oleh Karim (SST).

Dipanggil pesakitan kelima.

Simat gelar Pakih Simat.

Pr. Betoel sebagaimana jang ditoedoehkan pada kaoe itoe?

Pes. Betoel, tetapi kerna terpaksa oleh Karim sedeng hati saja sendiri tida ada bermaksoed seperti itoe.

Ada kaoe toeroet memoekoel?

Ja, kerna dipaksa moesti memoekoel

Toeroet memboeka goedang?

Ja

Kaoe soeda masoek communist?

Soeda, sama Soeleman Labai pada boelan poeasa jang doeloe.

Kenapa kaoe masoek communist?

Kerna ditipoeh oleh S Labai kaloe tida masoek nanti diboenoe oleh militer atau communist.

Apa maksoed communist itoe?

Saja denger dari kawan-kawan jang sama-sama masoek communist soepaja negri aman, soepaja dapet kemerdikaan, terlepas dari pemerenta Belanda.

Berapa koe bajar belasting?

Saja tida merasa berat, kerna saja dikenakan f. 2. 40 dan serajo f.1.50

Bagaimana kaoe sampe boeat memboenoe itoe toean Leurst?

Pada itoe petang Saptoe tgl 1 Januari waktoe saja pergi berjalan-djalan ka pasar kedapatan dimuka roemanja M.

Joesoef orang soeda banjak jang berjoemlah kira-kira 200 orang dan waktoe saja pergi minum kopi ke waroeng Berahim ditempat mana saja biasa djoega minoem itoe kali tida dibajar.

Kaoe bawa apa itoe Waktoe?

Bawa roedoes jang dikasiken oleh Karim kira-kira 2 boelan jang laloe.

Apa perloenja kaoe bawak roedoes, sedeng kaoe hanja berjalan-jalan?

Barangkali itoe reodoes bakal dipriksa oleh jang kepala, kerna ada orang kasi taoe pada saja soepaja membawak roedoes.

Sesoeda kaoe minoem kaoe kemana?

Saja berdiri diloaer itoe waroeng, dimana ada orang jang saja tida kenal kasiken benang merah pada saja.

Apa perloenja itoe benang?

Boeat tanda, kerna itoe malem orang aken berontak, dan saja diprentahken boeat ka station bersama Bedek, Naoeman, Baieraman boeat menjaga disitoe, kaloe ada orang jang laloe dithan, kaloe tida maoe di antjem dan kaloe melawan diboenoe.

Poekoel berapa kaoe kembali ke pasar?

Kira-kira poekoel 2 saja kembali ka pasar dan tida lama ada orang saja tida kenal kasi prentah soepanja itoe orang jang berdjoemlah kira-kira 30 dalem mana termasoek djoega saja pergi keroemah toean boentjit (Leurs) boeat memboenoe itoe toean kerna takoet saja toeroet juoega tetapi hati saja sendiri tida ada maksoead boeat memboenoe. Sesampe disana kedapaten itoe roemah dikoenji sja berdiri dari djaoe.

Moela-moela kedengeren bom meletoes satoe kali, tetapi siapa jang melemparkan saja tidak taoe, begitoe djoega saja denger orang boeka pintoe dengen paksa dan siapa jang

memboeka itoe saja tida taoe.

Sesoeda pintoe terboeka siapa jang naik keatas itoe roemah?

Setengahnja ada jang naik dan setengahnja ada poela jang dibawah sadja sedeng saja berada dibawah. Sebenter antaranja kedengeren boeni letusan senapan. Sesoeda itoe saja bersama Badoeraman dipaksa oleh karim boeat naik djoega keatas itoe roemah serta moesti turut poela memboenoe, moela-moela saja menjangkal tetapi soedah di antjam, sajapoen menurut djoega. Sesampainja kami diatas kelihatan itoe toean tengkoeroep dengen badanja penoeh loeka-loeka tetapi beloen mati, saja poekoel dua kali dipoenggoengnja.

Apa orang lain ada djoega toeroet memoekoel?

Jang saja ketahoei tjoema Badoeraman sadja

Sesoeda itoe kaoe kemana?

Saja bersama Bedek dan Badoeraman [Abdoerrahman] berangkat doloe ke roemah M. Joesoef, dan jang lain pergi kegoedang, sebenter antaranja kami sampe disana, itoe orang-orang dateng poela, dan apa jang soeda diambilnja dari dalem goedang itoe saja tida perhatikan.

Teroes kaoe tinggal disitoe?

Sesoeda saja sembahjang Soeboeh kira-kira poekoel 5 liwat saja pergi ka Roembo, saja dapeti disana orang lagi bekerdja menimboen djalan kereta api dengen batoe dan saja toeroet poela sedikit, dan disana saja ketemoe dengen Salim Emek dan Oesin serta beberapa orang lain jang saja kenal.

Dari sana koe kemana poela?

Bersama itoe orang banjak saja pergi ke station. Sesampainja kami disana kebetoelan dateng Soldadoe, hingga itoe orang jang banjak semoea lari dan saja poean ikoet lari poela.

Tadi kaoe menerangkan kaoe pergi ka roemah toean

Leurs kerna dipaksa; tetapi sekarang dengen tida dipaksa kaoe soeda toeloeng bantoe boeat menimboen itoe djalan kereta api.

Pesakitan itoe mendjadi bingoeng

Doeloe kaoe menerangkan pergi ka station pada malem itoe kerna diprentahken oleh M. Joesoef.

Itoe tida terang bener oleh saja.

Doeloe kaoe menerangken pergi kepasar dengen membawa roedoes, kerna kaoe lihat orang banjak jang membawa roedoes?

Saja tida ingat lagi

Apa sebab itoe toean diboenoe?

Tida taoe

Kaoe kenal ini senapan?

Ja, jang dipake Berahim itoe malam

Ini pistoel kaoe taoe?

Tida

Kaoe poenja lading kemana?

Tida taoe lagi kemano ilangnja

Kaoe soeda taoe dihoekoem?

Belon

Kaoe ada lagi mempoenjai satoe kesalahan?

Ja perkara memoetoes kawat di station sewaktoe saja diprentahken berdjaga disitoe. Tetapi boekan kawat jang diatas, hanja kawat jang masoek kedalem tanah.

Apa kaoe poetoes?

Ada orang bilang pada saja, baik itoe kawat di poetoes kerana kaloe tida tentoe menjeosahkan kerna itoe perbilangan setodjoe dengen pikiran saja sebab itoelah saja potong soepaja soldadoe djangan dateng ka Siloengkang.

Sampe disini poekoel 2.30 persidangan di toetoep (S.S).

Catatatan Akhir

*) Dikutip dari sumber *Bendera Islam*, No. 122/ Th ke-4, 27-28 Juni 1927. [selanjunya disingkat "Pemeriksaan landraad Sawahlunto..."], koleksi Perpustakaan Nasional di Gedung Gadjah, Merdeka Selatan, Jakarta.

BIODATA

Mestika Zed, lahir di Batuhampar, Payakumbuh, 19 September 1955, Menyelesaikan kuliah pada Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada (1980). Kuliah Post-Garuduate Programme (M.A.) di bidang Sejarah pada Vrije Universiteit, Amsterdam (1981-1983) dan mengikuti program penyetaraan S2 (Magister Artrium, M.A.) Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta (1983-1984). Meraih gelar Doktor di bidang Sejarah pada Jurusan Niet-Westerse Geschiedenis, Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam (1991). Pernah menjadi anggota Dewan Redaksi Journal *Jambatan, Tijdschrift voor de Geschiedenis van Indonesie* (Amsterdam, 1987-1991); Ketua Dewan Redaksi Journal *Forum* IKIP Padang (1993-1995). Sekarang Ketua redaksi Jurnal *Tingkap*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, FIS, Universitas Negeri Padang (1996-sd. sekarang). *Visiting Scholar* Fulbright pada Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca, NY, USA (1996). Beberapa tulisannya telah diterbitkan, diantaranya dalam *Journal Sejarah* (Jakarta, 1986), *Journal of Asian and African Studies,* (Tokyo, 1989), *Prisma* (Jakarta, 1995), *Journal Budaya* Genta Budaya, (Padang, 1996). Menjadi Editor dan Penulis buku *Perubahan Sosial di Minangkabau* (1992); Co-Authors buku *Sumatera Barat di Panggung Sejarah Indonesia*

Merdeka, 1945-1995 (1996). Tulisannya "Dualistic Economy of Palembang in the Late Colonial Period" diterbitkan dalam T. Lindblad (ed.). *Historical Foundation of A National Economy in Indonesia* (1996). Publikasinya, *Somewhere in the Jungle. Sejarah PDRI. Sebuah Matarantai Sejarah yang Terlupakan* (Grafiti, 1998) memperoleh penghargaan sebagai buku utama IKAPI dan Kementerian Pendidikan Nasional (1999). Mantan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Cabang Sumatera Barat (1993-2001) dan kini menjabat Ketua Pusat Kajian Sosial-Budaya dan Ekonomi (PKSBE), Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang.

* * *

Indeks

A

*avoidance*v
A. Wahab 63
A.M. Henderson 165
Abdul Muis 51, 52, 53, 54, 55, 96
Abdul Muluk 133, 134
Abdul Muluk Nasution 147
administrator 86
agresivitas 94
Alimin 77
api revolusi 122
Archaisme 81
Arief Fadhillah 110
Arif Fadillah 108, 111, 157
aristokrat 121
Arnold C. Brackman 4
Asisten Residen Karsen 18
aucthor intellectualis 154
avoindance 8

B

B O W 187
B. Schrieke 14, 47, 96
balai adat 139
Bank Rakyat 33
Belanda 11, 35
belasting 37
Bendera Islam 14, 147, 201
Blumberger 4
Bodi-Caniago 21
BOW 75, 129, 131

C

C. Boterhoven de Haan 103
casus belli 25
CC PKI 61, 63, 76, 77, 85, 98, 99, 102, 107, 108, 109
class struggle 59
communist? 197
conspiracy 9

D

D.M.G. Koch. Om de Vrijheid 96
Datuk Mangchudum Sati 86
Datuk Batuah 58
Datuk Radjo Nando 30
De Communistische Beweging in Nederlansch-Indie 3
De Gang der Kommunistische Bewegeng ter Sumatera's 15

De Josselink de Jong 46
De Locomotief 14
dealer 33
Deliar Noer 97
Dictatorial Organization 90
Digul 145
discontents 9, 10
diskontinuitas 29
Djago Djago 13, 84
Djago-Djago 60
Djamaluddin Tamin 56
dood organisatie 125
Double Organization 90

E

eklektik 10
ekonomi uang 34
eksploitasi 121
eksploitasi ekonomi 162
emansipasi sosial 105
emosional 154
Encik Rahma El Yunusiyah 42
eskatalogis 80
eternal triangel 45

F

fighting spirit 87
Firman Boon 85
Fort de Kock 14, 141
Frisko Wielenga 103

G

genealogis 19
genelogis 20
genesis 12
George H. Nadel 17
gerakan anti-agama 74
gerakan Kaum Muda 41, 42
gerakan komunis 74, 126
Gerakan Padeti 46
gerakan sosial 6
gerakan sosial tradisional 155
Goeroe Ordonantie 42
Gunung Merapi 56

H

H. Bouwman 49
H.A. Steyin Parve 46
Hadji Agus Salim 52
Hadji Ahmad Chatib 56
Hadji Datuk Batuah 57, 58, 60, 61, 97
Hadji Misbach 155
Haji Misbach 57
Haji Muhammad Nur Ibrahim 63
hak ulayat 36
HAMKA 97
Hamka 96
harato pancaharian 22
harato pusako 31, 32
harato pusako tinggi 22
Harry J. Benda 159
Hindia Belanda 8

I

ideologi 66
ideologi komunisme 83
ideologi nasionalisme 2, 163
ideologis 151
ilmu sejarah 12
Imam Mahdi 81
Indonesia Communism: A History 4
Indonesian Sociological Studies 3, 16

inferior 118
inkrimpingen 115
inlander 59
intelektual 156
internal war 9
International Debating Club 58,71
IPO 192
Islam ortodoks 155

J

J. Kreemer 47, 101, 102
Jamaluddin al-Afghani 40

K

Kapitalisme 80
karakteristik 151
Karl Marx 58, 72, 159
kaum intelektual 93
kaum kapitalis 34, 120
Kaum Muda 73, 122
kaum nasionalis 145
kaum propagandis 118
kaum propagandis komunis 78
Kaum Tua 44, 122
Komisi Penyelidikan 159
Komite Penggalang Indonesia 110
Komite Perlawanan 89
Komite Revolusioner 110
Komite Sentral 107, 110
komunis primitif 81
komunisme 60
komunisme primitif 80
Kongres Komintern Ke V 99
Kongres Yogya 67
konservatif 69
konservatisme 11
Koto-Piliang 21

L

Landraad 143, 175
landraad 143, 144
Lembaran Sedjarah 45
lepau 94
lingkungan sosio-kultural Minangkabau 10
literatur 70
Lowry Nelson, Rural Sosiology 45

M

M. Djamin 190
M. Joesoef 192, 199
M.D. Mansoer 48
Magas 51
Mail Rapport dan Memorie Van Overgave 15
Manado 148
Marxisme 52, 56, 70, 71, 119
Marxistik 83
Masjidil Haram 40
matrilineal 21, 22, 23
Max Weber 165
MD. Masoer 47
Memorie van Overgave 15
mencokro 53
messianistis 163
metode kritik ekstern 12
millenaristis 163
Minangkabau 1, 6, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 40, 74, 93, 112
modernis 69
modernis Islam 56
Mohammad Abduh 40
Mr. H. Fievez de Malines Van Ginkel 17
Mr. Van Eck 85

Muara Kalaban 127
Muara Kelaban 121, 132, 135, 140
Muara Labuh 27
Muhammad Djamil 128
Muhammad Jusuf 144
Muhammad Jusuf pribadi 123
Muhammad Yusuf 129
MULO 93

N

nagari 7
nasionalisme 158, 161
Natar Zainuddin 56, 58, 60, 61, 68
nativisme 101
nativistik 2
necessary condition 12
neo-kolonialisme 2
Nyala 101

O

Ombilin 114
On The Etiology of Internal War 17
Onderafdeeling 7, 112
onderafdeeling 38
onderdeel 44
Onderwijs en Comunissme 103
Orde Baru 2
Ordonantie Nagarie 35
organisasi 66
outward looking 115

P

Prof. Dr. A. Sartono Kartodirdjo vi
P.E. De Josselin De Jong 45
Pacific Historical Review 16
Padang Panjang 8, 56, 113
paham komunis 51
Panas 119, 120
Partai Komunis Indonesia 51, 52
patit-bourgouse 68
patrilineal 23
Pemandangan Islam 13, 60, 84
Pemberontakan Madiun 2
Pemberontakan Pajak 1
Pemberontakan Silungkang 2, 5, 10, 158, 163
penghulu kepala 20
penghulu kepala 35
Perang Dunia I 115
pergerakan sosial modern 153
pergerakan sosial tradisional 153
perguruan Thawalib 64
Persatuan GuruAgama Islam (PGAI) 73
Petrus Blumberger 3
PID 89
PID Belanda 61
pipe-dream 81
PKI 66, 67, 68, 95, 98, 100, 106, 147, 156, 163
pledooi 143
political violence 8
politik eksploitasi 36
politik eksploitasi kolonial 30
Post-Garuduate Programme 203
precipitating factors 12
primus inter-pares 20
Prof. Dr. B.J.O. Schrieke 17
Prof. Sartono Kartodirdjo 152
propaganda 153
propagandis 119
proto nasionalisme 158
proto-nasionalisme 162
PRRI 1
PSII 147

R

Radikalisme 116, 119
radikalisme 122, 140
radikalisme Islam 42
Raport Van Commisie van Onderzoek 15
rejim kolonial 2
rekonstruksi sejarah 12
relative deprivation 9
represif 145
resolusi Prambanan 106, 108
revivalisme 101
revolusi 106, 108, 138, 156, 161
revolusi pertanian 26, 28
revolusioner 60
revolver 136
revoulutions 9
roode Kaartjes 89
ruduih 86
Ruth T. Mc. Vey 98
Ruth T. McVey 95, 100, 146
Ruth T. McVey The Rise of Indonesia Communism 4
Ruth T.Mc.Vey 102

S

Silungkang v
Sumatera Barat v
samenleven 107
Sarekat Djin 89, 91, 155
Sarekat Islam 59
Sarekat Itam 155
Sarekat Rakyat 71, 117, 120, 122, 123, 143
Sarikat Islam 51, 115
Sarikat Keboen 30
Sarikat Tani 75
Sartono Kartodirdjo 46, 164
Sawah Lunto 7, 86, 113, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 141, 142, 144
Schrieke 3, 26
Sejarah Lokal di Indonesia 16
Sekolah Tinggi Hukum Batavia 3
self sufficincy 29
Seng Po 14
sentimen nasionalisme 42
Shattariyah 75
Shelton Stromquist 165
SI Merah 53, 118, 121, 122
SI Putih 121, 122
Silungkang 7, 11, 88, 94, 112, 114, 117, 127, 134, 141, 145
Singapura 139
Snouck Hurgronje 165
Soeara Muslimin 13
Soeara Ra'jat 55
Soeara Tambang 13, 84, 119, 120
Sombart 29
SPPL 87
SR 66, 67, 68, 70, 78
status quo 152
Stromquist 5, 160, 161
struktur sosial tradisional 35
Sumatera Barat 5, 8, 13, 90, 92, 108, 110, 111
Sumatera Thawalib 57
Sumatra Thawalib 41
Sutan Said Ali 106, 107
Syekh Abdullah Ahmad 42
Syekh Ahmad Khatib 40

T

T. Ibrahi, 1Alfian 45
Talcott Parson 165

Tan Malaka 76,77,95,108,109,111, 146
tanam paksa 25
Taufik Abdullah 45, 49, 97, 152
Ted Robert Gurr 8
Teori Marxisme 59
teori offensif 87
teritorial 19, 20
Terusan Suez 28, 40
Thawalib 92, 155
The Communist Rebellions of 1926-1927 in Indonesia 16
The Communist Uprising of 1926–1927 in Indonesia 14
Tjokroaminoto 52, 53
tradisionalisme 101
true revolution 108
Tsuyoski Kato 48
turmoils 8

U

Universitas Gadjah Mada vi
Uni Soviet 4, 53

V

value capabilities 9, 10
value expectations 9, 10
veld-politie 116
veldpolitie 135
Verslag Van Bestuur en Staat Van Nederlandsch-Indi 15

W

W. Groeneveldt 17
W. Van Hoeve Ltd 16
W. Wertheim 47
W.H. de Greve 147
warming up 76
Why Men Rebel 8
Wilhelmina 144

Z

zaman kolonial v

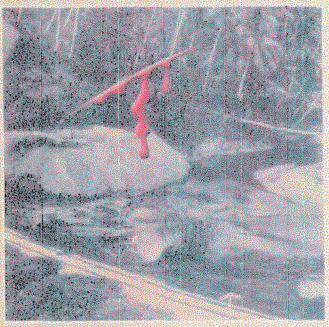

Pemberontakan Silungkang yang melibatkan kelompok komunis, sangat berbeda dengan apa yang diakukan orang-orang komunis periode yang lebih kemudian, baik semangatnya, sifat dan kerangka kerjanya. Juga konteks pengalaman historis yang berlaku.

Kekacauan pemahaman sejarah bangsa khususnya tentang pemberontakan Silungkang, mungkin sebab ia belum ditulis, atau karena masalah tafsir sejarah, atau sebab ideologi rejim orde baru yang menggeneralisasikan tiap peristiwa historis secara hitam putih menurut kacamata penguasa.

Buku yang berada di tangan pembaca ini berhasil menelaah dan menyajikan peristiwa pemberontakan di sebuah nagari, Silungkang, Sumatera Barat pada tahun 1927. Dan, masih relevan untuk memahami dinamika masyarakat yang senantiasa berubah sekarang ini.

ISBN: 979-96819-7-9
9 789799 681973 >

Foto: **Spoorweg Nabij Kalaban**(Sumatra)
Uitgave van het Koloniaal Museum te Harlem